



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

MAHKAMAH AGUNG

Profesional, Adil, Smart dan Sinergis



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengadilan Agama Banggai

Jln. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut,

Telp. / Fax (0462) 21544 Kode Pos 94791



pa-banggai.go.id



pa.banggai@yahoo.co.id



[pengadilan.agama.banggai](https://www.facebook.com/pengadilan.agama.banggai)



[pa.banggai_official](https://www.instagram.com/pa.banggai_official)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalâmu'alaikum War. Wab.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Banggai sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya sampai kepada pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini disusun dengan maksud sebagai dokumentasi hasil kerja selama tahun 2020 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Disamping itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan program kerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2021 nantinya.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini dibuat dengan berpedoman pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Oleh karena itu, dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 memuat tentang keadaan perkara, penyelesaian perkara, akreditasi penjamin mutu, sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi, serta pengawasan.

Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini, sebagai Pimpinan Pengadilan Agama Banggai kami mengucapkan terimakasih



kepada semua pihak, para hakim, seluruh pejabat struktural/fungsional dilingkungan Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga hasilnya dapat disusun dan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 yang akan disusun pada laporan tahunan yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangsih atau andil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Banggai, 30 Desember 2020

Ketua

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI	5
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. PENYELESAIAN PERKARA	12
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	12
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	13
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi....	14
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	14
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	15
- Posbakum	16
- Sidang Keliling/pelayanan Terpadu	16
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	20
BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA	21
- Mutasi	24
- Promosi	25
- Pensiun	26
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)	26



BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	29
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	29
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	37
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	45
- Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Banggai	45
- Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Banggai..	47
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	49
- Akreditasi Penjaminan Mutu	49
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	50
- Inovasi Pelayanan Publik	53
BAB VI PENGAWASAN	55
A. INTERNAL	55
B. EVALUASI.....	59
BAB VII PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. REKOMENDASI	89

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagaimana telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karakter kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan **“ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan “** demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas,

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manajemen peradilan sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan **“satu atap“**.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pesisir pantai sebagai pencari keadilan yang beragama islam tentang perkara perdata tertentu dalam wilayah hukum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Banggai. Kendatipun gedung, volume dan tata ruangan Pengadilan Agama Banggai masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Banggai tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.



Wilayah kompetensi Pengadilan Agama Banggai mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Dimana wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 11 (sebelas) Kecamatan sedangkan wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki 7 (tujuh) Kecamatan.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Banggai tahun 2007 telah terjadi penggantian Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Agama Banggai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Nama-nama Pimpinan Pengadilan Agama Banggai dari mulai berdiri sampai sekarang.

Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Banggai

NO.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1	Drs. Sangkala Amirudin	Ketua	2003 - 2008
2	H. Sutarman, S.H	Ketua	2008 - 2009
3	Drs. Komarudin, M.H	Ketua	2009 - 2012
4	Drs. Anis Ismail	Ketua	2012 - 2016
5	Drs. Ihsan	Ketua	2016 -2018
6	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.	Ketua	2018 - 2020
7	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.	Ketua	2020 - Sekarang

B. VISI DAN MISI

Sebagai instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu



pada visi peradilan tingkat pertama yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, maka visi Pengadilan Agama Banggai, yakni :

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI
LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA”**

Misi Pengadilan Agama Banggai dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung ialah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan kebijakan umum sebagaimana di atas, diperlukan perumusan program yang riil yang dituangkan ke dalam Perumusan Rencana dan Strategi, antara lain:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Berdasarkan rencana strategis di atas maka, ditetapkan uraian sasaran pencapaian melalui optimalisasi tupoksi, khususnya dalam rencana kerja tahun 2020.

I. Pelayanan Yustisial

- Penanganan dan penyelesaian perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Penertiban administrasi perkara dan keuangan perkara yang transparan.
- Memberikan pelayanan/bantuan hukum kepada masyarakat sesuai tugas fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Banggai.
- Memberikan penerangan hak dan kewajiban pencari keadilan dan lembaga peneliti dengan data yang akurat.
- Peningkatan sumber daya aparatur Pengadilan Agama Banggai dalam penanganan perkara.
- Membantu dalam meningkatkan fungsi dan peran lembaga hisab rukyat.

II. Pelayanan Non Yustisial

- Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur Pengadilan Agama Banggai.
- Peningkatan sarana dan prasarana gedung perkantoran.
- Terpeliharanya peralatan dan mesin perkantoran.
- Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
- Mengelola keuangan anggaran belanja secara profesional dan transparan.
- Melayani hak-hak aparatur Pengadilan Agama Banggai tepat waktu.

BAB II KEADAAN PERKARA

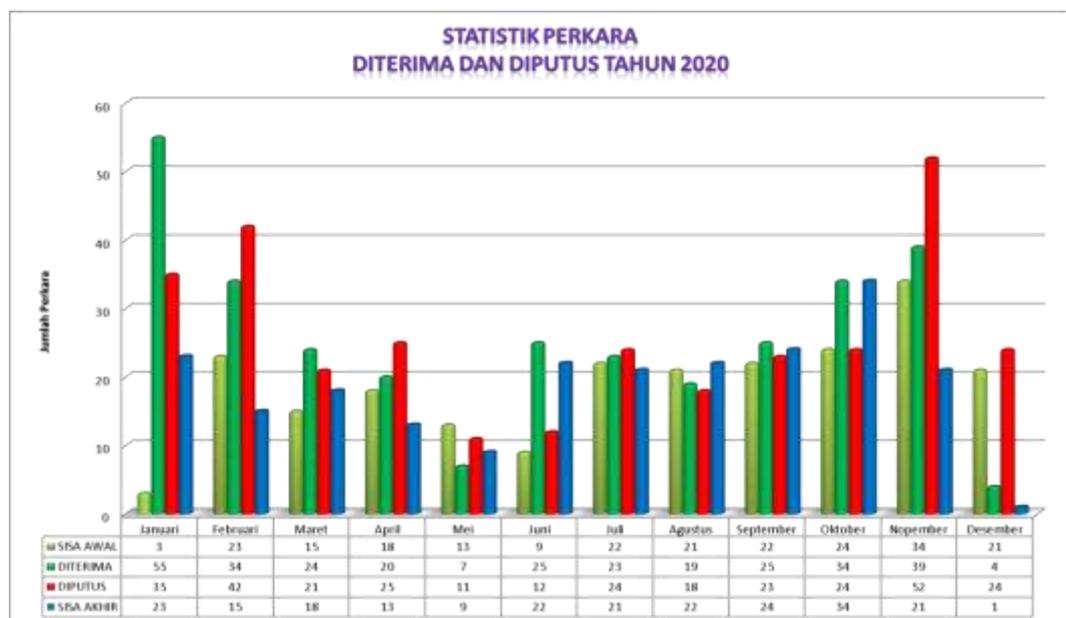
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Banggai

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Banggai, meliputi sisa perkara tahun 2019 sejumlah 3 perkara, perkara yang diterima sejumlah 309 perkara dan diputus selama tahun 2020 sejumlah 311, sehingga sisa perkara di akhir tahun 2020 sejumlah 1 (satu) perkara atau 99,68 % dari total perkara tahun 2020, dapat dirinci sebagai berikut:

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Sisa 2019	Masuk 2020	Total 2020	Cabut	Putus	Sisa 2020	%
3	309	312	26	285	1	99,68





Keadaan Perkara Tingkat Pertama Berdasarkan Jenis Perkara

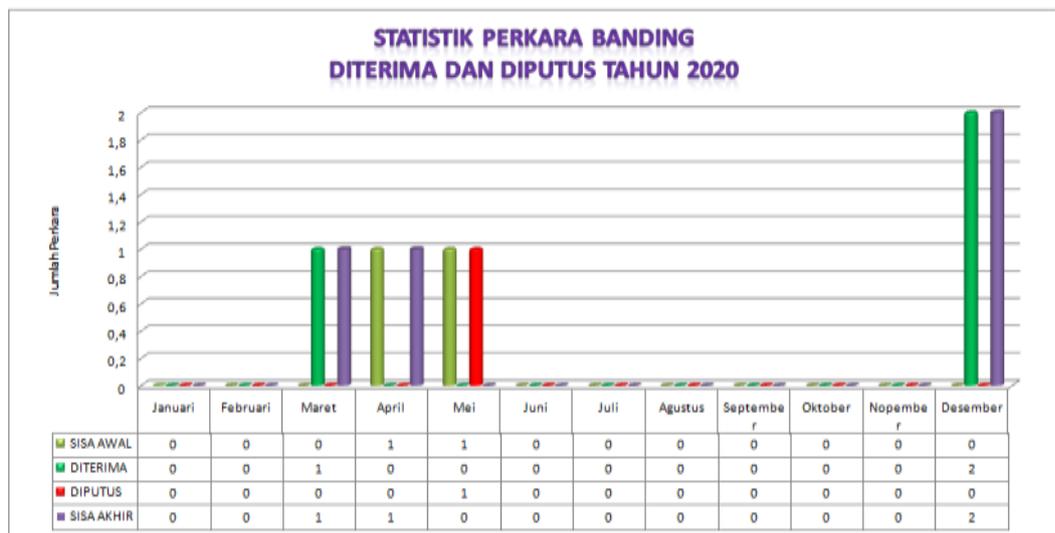
Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perk. oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	1	67	68	9	59	0
Cerai Gugat	1	169	170	16	154	0
Harta Bersama	0	3	3	1	1	1
Penguasaan Anak/Hadhanah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	3	3	0	3	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	0	1	1	0	1	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	8	8	0	8	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Despensasi Kawin	0	56	56	0	56	0
Wali Adhol	0	0	0	0	0	0
EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0
WARIS	0	0	0	0	0	0
WASIAT	0	0	0	0	0	0
WAKAF	0	0	0	0	0	0
ZAKAT/INFAK/SHODAQ OH	0	0	0	0	0	0
PENETAPAN AHLI WARIS	1	1	2	0	2	0
P3HP	0	0	0	0	0	0
DERDEN VERZET	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	1	1	0	1	0
Jumlah	13	309	312	26	285	1

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Keadaan perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Banggai, meliputi sisa perkara tahun 2019 sejumlah 0 perkara, perkara yang diterima Tahun 2020 sejumlah 3 perkara dan diputus selama tahun 2020 sejumlah 1 Perkara, sehingga sisa perkara di akhir tahun 2020 sejumlah 2 (dua) perkara. Dari total perkara banding tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020	%
0	3	3	0	1	2	33,3





Keadaan Perkara Tingkat Banding Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perk. oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	3	3	0	1	2
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak/Hadhanah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Despensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Wali Adhol	0	0	0	0	0	0
EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0
WARIS	0	0	0	0	0	0
WASIAT	0	0	0	0	0	0
WAKAF	0	0	0	0	0	0
ZAKAT/INFAK/SHODAQ OH	0	0	0	0	0	0
PENETAPAN AHLI WARIS	0	0	0	0	0	0
P3HP	0	0	0	0	0	0
DERDEN VERZET	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	3	3	0	1	2



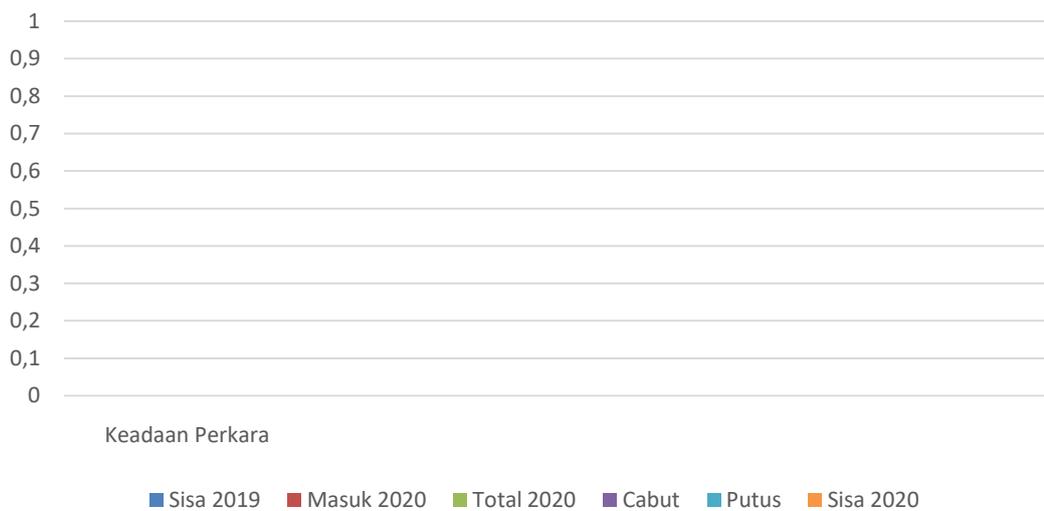
- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai tidak pernah menerima permohonan Kasasi.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
0	0	0	0	0	0

Grafik Keadaan Perkara Tingkat Kasasi



Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perk. oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0



Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak/Hadhanah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Despensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Wali Adhol	0	0	0	0	0	0
EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0
WARIS	0	0	0	0	0	0
WASIAT	0	0	0	0	0	0
WAKAF	0	0	0	0	0	0
ZAKAT/INFAK/SHODAQ OH	0	0	0	0	0	0
PENETAPAN AHLI WARIS	0	0	0	0	0	0
P3HP	0	0	0	0	0	0
DERDEN VERZET	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai tidak pernah menerima permohonan PK.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
0	0	0	0	0	0



Grafik Keadaan Perkara Tingkat PK



Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah 2020	Cabut	Diputus	Sisa 2020
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perk. oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak/Hadhanah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0



Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Despensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Wali Adhol	0	0	0	0	0	0
EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0
WARIS	0	0	0	0	0	0
WASIAT	0	0	0	0	0	0
WAKAF	0	0	0	0	0	0
ZAKAT/INFAK/SHODAQ OH	0	0	0	0	0	0
PENETAPAN AHLI WARIS	0	0	0	0	0	0
P3HP	0	0	0	0	0	0
DERDEN VERZET	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Banggai mempunyai tugas pokok dan fungsi “memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah” sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- *Jumlah Sisa Perkara yang Diputus*

Sisa perkara Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2019 sejumlah 3 (tiga) perkara, yang terdiri dari:

- Cerai Talak : 1 Perkara
- Cerai Gugat : 1 Perkara
- Penetapan Ahli Waris : 1 Perkara +
- Jumlah : 3 Perkara**



Sisa perkara tahun 2019 tersebut di atas telah diputus pada tahun 2020, sehingga tidak ada lagi sisa perkara tahun lalu yang menjadi sisa pada tahun 2020.

Sisa Perkara Yang Diputus tahun 2019	Keterangan
3	100%

- Jumlah Pekara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Banggai selama tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

- Sisa Perkara Tahun 2019 : 3 Perkara
- Penerimaan perkara Tahun 2020 : 309 Perkara +
- Jumlah : 312 Perkara**

Perkara yang diterima tahun 2020 ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sehingga berjumlah 312 (tiga ratus dua belas) perkara, yang telah diselesaikan tepat waktu berjumlah 311 (tiga ratus sebelas) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Diputus 1-3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus >5 Bulan	Belum Diputus s.d. 5 Bulan
310	1	0	0

Dari 311 (tiga ratus sebelas) perkara yang diselesaikan pada tahun 2020, seluruhnya diputus tepat waktu dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan.

- ***Jumlah Pekara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali***

Selama Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) perkara yang mengajukan upaya hukum banding sedangkan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali tidak ada, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada tahun 2020 sebagai berikut :

Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
Bandung	Kasasi	PK	
309	311	311	99,36%

- ***Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi***

Dalam setiap perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, terdapat beberapa perkara yang wajib dimediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses litigasi. Dalam upaya mediasi tersebut dijumpai oleh seorang hakim atau nonhakim yg ditunjuk harus mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar perkara tersebut tidak berlanjut ke persidangan.

Jumlah perkara perdata gugatan yang ditangani Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2020 sebanyak 239 perkara, dari jumlah perkara tersebut yang bisa dilakukan mediasi sejumlah 59 perkara. Hal ini disebabkan karena adanya perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara diselesaikan secara verstek (tanpa hadirnya pihak lawan). Dari 59 perkara yang dimediasi, sebanyak 53 perkara dilaporkan tidak berhasil dimediasi dan 6 perkara dilaporkan berhasil.



Dari 6 perkara perdata yang berhasil dimediasi; 1 perkara dengan akta perdamaian; 1 perkara berhasil sebagian; dan sisanya dengan pencabutan perkara berjumlah 4 perkara.

Yang Dimediasi Tahun 2020	Mediasi	
	Berhasil	Tidak Berhasil
59	6	53

- *Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi*

Selama Tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai belum pernah menerima perkara anak melalui diversi, karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banggai.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Banggai kepada masyarakat pencari keadilan yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa pengadilan, Pengadilan Agama Banggai telah menyusun langkah-langkah menuju pelayanan yang prima.

Dengan berpedoman kepada Buku Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik yang bersifat efektif, efisien dan transparan.

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama, setelah memenuhi kriteria penilaian mutu sesuai dengan standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama.



Pengadilan Agama Banggai salah satu Pengadilan yang ada di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu dan juga termasuk yang telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 yang Alhamdulillah telah berhasil mendapat Sertifikat dengan Predikat A Excelent berturut-turut.

- Posbakum

Pengadilan Agama Banggai tidak mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sehingga belum pernah melaksanakan kegiatan posbakum sebagaimana yang dimaksud.

Anggaran DIPA (Rp)	Revisi DIPA (Rp)	Jumlah Masyarakat Dilayani (orang)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Menit)
0	0	0	0	0

- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

• Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Anggaran DIPA (Rp)	Revisi DIPA (Rp)	Serapan Dana (Rp)	Target	Jumlah Perkara
50.000.000	-	49.740.000	18	20

Adapun Manfaat Sidang Keliling diantaranya ialah:

- o Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara;
- o Biaya transportasi lebih ringan;



- o Menghemat waktu;

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

- o Isbat Nikah : pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
- o Cerai Gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- o Cerai Talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- o Penggabungan perkara Isbat dan Cerai Gugat/Cerai Talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
- o Hak Asuh Anak : Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- o Penetapan Ahli Waris : Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
- o Permohonan Wali Adhal.

Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Pengadilan Agama Banggai telah merealisasikan alokasi dana sejumlah Rp. 49.740.000,00 dan telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan dengan jumlah perkara sebanyak 20 (dua puluh) perkara dengan rincian dengan tempat pelaksanaan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.



- **Pelayanan Terpadu**

Dengan mengacu pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang terlebih dahulu telah menerangkan dasar hukumnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun tentang Spesifikasi Blangko serta Formulir Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 8 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka diperlukan kerja sama dalam mewujudkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ruang



lingkup tugas dan kewenangan masing-masing baik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program-program sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum baik Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, bagi masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan dalam nota kesepahaman ini untuk mempercepat kepemilikan status hukum (Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran) bagi masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan status hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah, dan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh status hukum baik Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran secara mudah, cepat dan biaya ringan.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati tersebut di atas, Pengadilan Agama Banggai selama tahun tahun 2020 tidak ada perkara atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu.

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dalam berperkara di pengadilan dapat beracara secara cuma-cuma dengan dibiayai negara baik perkara permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama Banggai, Pemerintah Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai, pada tahun 2020, telah mengalokasikan anggaran



sejumlah Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah terealisasi sejumlah Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2020 telah menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 6 (enam) perkara yang kesemuanya dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Banggai.

Anggaran DIPA (Rp)	Revisi DIPA (Rp)	Serapan Dana (Rp)	Target	Jumlah Perkara
1.785.000,00	-	1.781.000	5	6



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan

Data kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama Banggai sampai tanggal 30 Desember 2020 berjumlah 11 orang pegawai terdiri dari 4 orang Hakim dan 7 Pegawai. Adapun tenaga honorer berjumlah 6 orang dengan 2 (dua) orang diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 3 (tiga) orang dibagian administrasi kesekretariatan dan 1 (satu) orang sebagai petugas di meja informasi. Melihat kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin tahun meningkat, hal ini sangat tidak sesuai dengan skala ideal kekuatan pegawai bagi pengadilan kelas II.

Berikut adalah rincian jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai hingga akhir tahun 2020 :

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan Pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No	Nama	Jabatan		Pendidikan
		Gol/Ruang	TMT	
1.	Moh. Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.	IV/a	01-10-2020	S2
2.	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.	III/d	30-01-2016	S1
3.	Syamsul Ilmi, S.H.I	III/a	13-04-2020	S1
4.	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I	III/a	01-03-2020	S1
5.	Muhammad Musyaffa, S.HI	III/d	14-10-2020	S1
6.	Dra. Aisyah	III/d	01-08-2006	S1
7.	Muhammad Saleh, S.H.I.	III/c	27-06-2020	S1
8.	Maswati Masruni, S.H.	III/d	27-06-2020	S1
9.	Rudi Hartono, S.H.I., M.H.	III/c	27-06-2020	S2



10.	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	III/c	18-07-2017	S1
11.	Pahlawanto, S.IP	III/a	01-04-2020	S1

Pengadilan Agama Banggai masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk mengisi kekosongan jabatan yang masih kosong, yaitu *Panitera Pengganti, Kasubag Kepegawian dan Ortala dan Kasubag Perencanaan, Tenaga Informasi dan Pelaporan* untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari.

Secara detail Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Agama Banggai terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Hakim

Berdasarkan Administrasi Kepegawaian Peradilan tentang pola formasi Pengadilan Tingkat Pertama pada kelas II jumlah Hakim maksimum 13 orang, namun di Pengadilan Agama Banggai Kelas II jumlah Hakim Pada Tahun 2020 hanya 4 orang Hakim termasuk Ketua, yaitu :

Komposisi Hakim Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Ket.
1.	Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.	IV/a	Ketua	
2.	Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I	III/d	Wakil Ketua	
3.	Syamsul Ilmi, S.H.I	III/a	Hakim	
4.	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I	III/a	Hakim	



b. Kepaniteraan

Panitera/Panitera Muda di Lingkungan Pengadilan Agama Banggai Kelas II Pada Tahun 2020 berjumlah 4 orang terdiri dari :

Komposisi Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Ket.
1.	Dra. Aisyah	III/d	Panitera	
2.	Maswati Masruni, S.H.	III/d	Panmud Gugatan	
3.	Muhammad Saleh, S.H.I.	III/c	Panmud Hukum	
4.	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H	III/c	Panmud Permohonan	

c. Kejurusitaan

Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Pengadilan Agama Banggai berjumlah 2 (dua) orang yaitu :

Komposisi Kejurusitaan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Ket.
1.	Pahlawanto, S.IP	III/a	Jurusita Pengganti	
2.	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	III/c	Jurusita Pengganti	

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

SDM Pegawai Pengadilan Agama Banggai Kelas II Non Teknis Yudisial sebanyak 2 orang terdiri dari :

Komposisi SDM Bidang Non Teknis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No.	Nama	Gol. Ruang	Jabatan	Ket.
1.	Muhammad Musyaffa,	III/d	Sekretaris	



	S.H.I.			
2.	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	III/c	Kasubag Umum dan Keuangan	

- Mutasi

1) *Alih Tugas / Pindah*

Dalam tahun 2020 ini terdapat 4 (empat) pegawai yang pindah dari Pengadilan Agama Banggai, yaitu:

- a. Drs. Masngaril Kirom, S.H,M.H.E.S

Ketua Pengadilan Agama Banggai dimutasi ke Pengadilan Agama Jombang sebagai Wakil Ketua sejak Agustus 2020.

- b. Drs. Rusdin

Panitera Pengadilan Agama Banggai dimutasi ke Pengadilan Agama Luwuk sejak bulan Oktober 2020.

- c. Mohammad Fadhil, S.H

Jurusita Pengadilan Agama Banggai dimutasi ke Pengadilan Agama Bau-Bau sejak bulan Oktober 2020.

Sedangkan mutasi masuk pada tahun 2020 ini terdapat 1 (satu) pegawai ke Pengadilan Agama Banggai, yaitu :

- a) Syamsul Ilmi, S.H.I

Cakim Pengadilan Agama Ampana dimutasi ke Pengadilan Agama Banggai sebagai Hakim sejak bulan April 2020.

2) *Mutasi Kenaikan Pangkat*

Di lingkungan Pengadilan Agama Banggai terdapat mutasi kepangkatan sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H. NIP. 19790209
200604 1 003

Mutasi Kenaikan Pangkat dari Penata, III/d ke Pembina, IV/a



3) Mutasi Jabatan

Dilingkungan Pengadilan Agama Banggai terdapat mutasi jabatan sebanyak 3 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a). Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai dimutasi Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Banggai TMT 27 Agustus 2020.

- b). Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I

Hakim Pengadilan Agama Banggai dimutasi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai TMT 30 Juli 2020.

- c). Dra. Aisyah

Wakil Panitera Pengadilan Agama Banggai dimutasi jabatan sebagai Panitera TMT 27 Oktober 2020

Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Mutasi	
			Lama	Baru
1.	Drs. Masngaril Kirom, S.H,M.H.E.S	Ketua	PA. Banggai	PA. Jombang
2.	Syamsul Ilmi, S.H.I	Hakim	PA. Ampana	PA. Banggai
3.	Drs. Rusdin	Panitera	PA. Banggai	PA. Luwuk
4.	Mohammad Fadhil, S.H	Jurusita	PA. Banggai	PA. Bau-Bau

- Promosi

Pada tahun 2020 terdapat pegawai yang diusulkan dalam pengangkatan dan pemindahan untuk menduduki jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera dengan rincian sebagai berikut :

- a). Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai dimutasi Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Banggai TMT 27 Agustus 2020.



- b). Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I
Hakim Pengadilan Agama Banggai dimutasi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai TMT 30 Juli 2020.
- c). Dra. Aisyah
Wakil Panitera Pengadilan Agama Banggai dimutasi jabatan sebagai Panitera TMT 27 Oktober 2020.

Promosi Pegawai Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	
		Lama	Baru
1.	Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua PA Banggai	Ketua PA Banggai
2.	Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I.	Hakim PA Banggai	Wakil Ketua PA Banggai
3.	Dra. Aisyah	Wakil Panitera PA Banggai	Panitera PA Banggai

- Pensiun

Pada tahun 2020 ini tidak ada pegawai Pengadilan Agama Banggai yang memasuki usia pensiun.

Pegawai Pensiun Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

No	Nama	Gol Terakhir	Jabatan	TMT Pensiun	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Tidak ada				

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

Dalam tahun 2020 ini ada pegawai yang mengikuti diklat Teknis/Non Teknis yaitu :

- a). Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H.



Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Agama Seluruh Indonesia di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.

b). Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi How To Become A Mentor Bagi Pelatihan Kepimimpinan Pengawas di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.

c). Muhammad Musyaffa, S.H.I

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2020 di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.

Pegawai Pengadilan Agama Banggai Yg Mengikuti Diklat Tahun 2020

No	Nama	Satker	Jenis Diklat Yang Diikuti
1	2	3	4
1.	Mohammad Mahin Ridho Afifi, S.H.I., M.H	PA. Banggai	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Agama Seluruh Indonesia di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.
2.	Muhamad Yahya Tajdudin, S.H.I.	PA. Banggai	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi How To Become A Mentor Bagi Pelatihan Kepimimpinan Pengawas di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.
3.	Muhammad Musyaffa, S.H.I	PA. Banggai	Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2020 di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor DIPA-005.01.2.652123/2020 tanggal 12 November 2019 dengan Pagu DIPA Awal sebesar Rp. 5.290.297.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan di revisi menjadi Rp. 2.867.859.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Adapun DIPA Nomor 005-04.2.652124/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 51.785.000,- (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang merupakan DIPA Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04), serta penjabarannya tertuang dalam Kertas Kerja Rencana Keluaran Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai pada tahap pelaporan.



Penggunaan alokasi anggaran dari masing-masing pagu program sebagai sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.734.233.000,-
- Biaya operasional (biaya pemeliharaan gedung, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa) sebesar Rp. 680.307.000,-
- Biaya non operasional (biaya perjalanan dinas bendahara ke KPPN Luwuk) sebesar Rp. 103.319.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Pengadaan 2 (dua) unit PC merek Lenovo senilai Rp. 12.500.000,-
- Pengadaan 1 (satu) unit Genset merek Hartech senilai Rp. 198.000.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, digunakan untuk kegiatan :

- Biaya pembebasan perkara prodeo sebesar Rp. 1.785.000,-
- Biaya penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar gedung (sidang keliling/terpadu) sebesar Rp. 49.740.000,-

Berdasarkan DIPA Nomor 005.01.2.652123/2020 tanggal 12 November 2020 Pengadilan Agama Banggai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.867.859.000,-. Selama Tahun Anggaran 2020 DIPA 01 BUA tersebut telah mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali yang disebabkan oleh revisi perubahan rencana penarikan dana pada halaman



III DIPA maupun revisi DJA yang dilakukan oleh Eselon 1 BUA berupa penambahan anggaran BA.BUN, sehingga alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.867.859.000,-.

Adapun pada DIPA Nomor Nomor 005.04.2.652124/2020 tanggal 15 November 2020 yang merupakan DIPA Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 51.785.000,-. DIPA 04 Badan Peradilan Agama tersebut juga telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali yang disebabkan oleh perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan berupa pergeseran anggaran.

1. Belanja Pegawai

a. Pagu Anggaran

No.	Uraian	Jumlah
1.	PA Banggai	1.734.233.000,-

b. Realisasi Anggaran

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa
1	Gaji Pokok PNS	636.843.000	629.881.700	6.961.300
2	Pembulatan Gaji	11.000	10.382	618
3	Tunjangan Suami/Isteri	38.605.000	38.620.700	(15.700)
4	Tunjangan Anak	11.537.000	11.542.984	(5.984)
5	Tunjangan Jabatan Struktural	14.420.000	14.420.000	0
6	Tunjangan Jabatan Fungsional	718.150.000	717.410.000	740.000
7	Tunjangan PPH	85.734.000	83.587.349	2.146.651
8	Tunjangan Beras	28.751.000	28.605.900	145.100
9	Uang Makan PNS	112.132.000	89.451.000	22.681.000
10	Tunjangan Umum	28.650.000	2.220.000	26.615.000



	PNS			
11	Tunjangan Kemahalan	59.400.000	59.400.000	0
	Jumlah	1.734.233.000	1.674.965.015	59.267.985

2. Belanja Barang

a. Pagu Anggaran

No.	Uraian	Jumlah
1.	PA Banggai	783.626.000,-

b. Realisasi Anggaran

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa
1.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.500.000	1.352.500	147.500
2.	Belanja Barang Operasional Lainnya	659.000	658.500	500
3.	Belanja Perjalanan Biasa	103.319.000	96.064.242	7.254.758
4.	Belanja Keperluan Perkantoran	345.309.000	314.970.933	30.338.067
5.	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	23.000.000	22.999.500	500
6.	Beban Honor Operasional	64.200.000	64.200.000	0
7.	Belanja Jasa	22.448.000	22.368.010	79.990
8.	Belanja Pemeliharaan	174.231.000	169.534.109	4.696.891
9.	Belanja Sewa	48.960.000	48.960.000	0
	Jumlah	783.626.000	741.107.794	42.518.206



c. Sisa Anggaran Belanja

No.	Satker	Jumlah Belanja Barang	Jumlah Realisasi Belanja Barang	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	783.626.000	741.107.794	42.518.206
	Jumlah	783.626.000	741.107.794	42.518.206

3. Belanja Modal

a. Pagu Anggaran

No.	Uraian	Jumlah
1.	PA Banggai	350.000.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	225.000.000	225.000.000	0
2.	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	125.000.000	125.000.000	0
	Jumlah	350.000.000	350.000.000	0

c. Sisa Anggaran Belanja Modal

No.	Satker	Jumlah Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Modal	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	350.000.000	350.000.000	0
	Jumlah	350.000.000	350.000.000	0



4. Sumber Dana

a. Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Uraian	Dana Keseluruhan	Realisasi Belanja	Sisa Dana
Rupiah murni	2.867.859.000	2.766.072.809	101.786.191
Pinjaman luar negeri	0	0	0
Hibah	0	0	0
Rupiah pendampingan	0	0	0
PNBP	3.014.000	3.014.228	0

b. Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Uraian	Dana Keseluruhan	Realisasi Belanja	Sisa Dana
Rupiah murni	51.765.000	51.521.000	264.000
Pinjaman luar negeri	0	0	0
Hibah	0	0	0
Rupiah pendampingan	0	0	0
PNBP	25.735.000	24.849.200	74.000

5. Jenis Belanja

a. Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Jenis Belanja	Dana Keseluruhan	Realisasi Belanja	Sisa Belanja	Ket
Belanja Pegawai	1.734.233.000	1.674.965.015	59.267.985	
Belanja Barang	783.626.000	741.107.794	42.518.206	
Belanja Modal	350.000.000	350.000.000	0	
Jumlah	2.867.859.000	2.766.072.809	101.786.191	

b. Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Jenis Belanja	Dana Keseluruhan	Realisasi Belanja	Sisa Belanja	Ket
Belanja Pegawai	0	0	0	
Belanja Barang	51.765.000	51.521.000	264.000	
Belanja Modal	0	0	0	
Jumlah	51.765.000	51.521.000	264.000	



6. Pengembalian Belanja

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Dikembalikan	Ket
1.	Belanja Pegawai	0	59.289.669	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS Pengembalian Pembulatan Gaji PNS Pengembalian Tunjangan Fungsional PNS Pengembalian Tunjangan PPH PNS Pengembalian Tunjangan Beras PNS Pengembalian Uang Makan PNS Pengembalian Tunjangan Umum PNS
Jumlah		0	59.289.669	

Rincian Pengembalian UP Setoran ke Kas Negara

Satker	Pengembalian UP/TUP Setoran ke Kas Negara DIPA 01	Pengembalian UP/TUP Setoran ke Kas Negara DIPA 01
PA Banggai	3.377.319	264.000
Jumlah	3.377.319	264.000



7. Rincian Belanja

- a. Rincian belanja per-satuan kerja untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Satker	Jenis Belanja	Pagu Belanja	Realisasi	Sisa
PA Banggai	Belanja Pegawai	1.734.233.000	1.674.965.015	59.267.985
	Belanja Barang	783.626.000	741.107.794	42.518.206
	Belanja Modal	350.000.000	350.000.000	0
Jumlah		2.867.859.000	2.766.072.809	101.786.191

- b. Rincian belanja per-satuan kerja untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Satker	Jenis Belanja	Pagu Belanja	Realisasi	Sisa
PA Banggai	Belanja Pegawai	0	0	0
	Belanja Barang	51.765.000	51.521.000	264.000
	Belanja Modal	0	0	0
Jumlah		51.765.000	51.521.000	264.000

8. Realisasi Pajak

- a. Realisasi pajak sebesar untuk pelaksanaan anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Penyetoran	Sisa
1.	PPN	6.387.289	6.387.289	0
2.	PPh Pasal 21	1.432.400	1.432.400	0
3.	PPh Pasal 22	904.797	904.797	0
4.	PPh Pasal 23	984.214	984.214	0
5.	PPh Final Pasal 4	1.770.000	850.000	0
Jumlah		11.408.700	11.408.700	0

- b. Realisasi pajak sebesar untuk pelaksanaan anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Penyetoran	Sisa
1.	PPN	0	0	0
2.	PPh Pasal 21	0	0	0
3.	PPh Pasal 22	0	0	0
4.	PPh Pasal 23	0	0	0
5.	PPh Final Pasal 4	0	0	0
Jumlah		0	0	0



9. Realisasi PNBP

- a. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin			
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,-	0,-	0
	Jumlah	0,-	0,-	0

- b. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan			
2.	Pendapatan Ongkos Perkara			
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya			
	Jumlah			

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan, proses pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan terhadap kekayaan Negara. Dengan administrasi yang lebih tertib dan akuntabel dalam rangka melaksanakan PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara



dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen. Pengelolaan tanah dan bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Banggai meliputi:

1). Tanah

Pengadilan Agama Banggai memiliki asset tanah seluas 625 M² dengan nilai Rp. 120.000.000,-. Asset tanah tersebut telah mengalami perubahan nilai setelah revaluasi BMN pada Tahun 2018 sehingga nilai asset tanah saat ini menjadi Rp. 379.284.415.-

2). Gedung dan Bangunan

Saldo awal Tahun Anggaran 2020 asset gedung dan bangunan Pengadilan Agama Banggai terdapat 3 gedung, yaitu bangunan gedung kantor permanen ada 1 (satu) seluas 625 M² dengan nilai Rp. 1.588.430.000,- dan gedung rumah negara golongan II tipe C ada 1 (satu) seluas 70 M² dengan nilai Rp. 208.460.000,- dan bangunan tempat sidang (balai sidang) seluas 100 M² dengan nilai Rp. 203.380.000,- sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 tidak ada penambahan nilai maupun kuantitas.

3). Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Banggai tidak mendapat dana untuk pengadaan Bangunan.

4). Pemeliharaan

Untuk mendukung dalam pelayanan perkantoran yang lebih baik bagi pegawai dan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam pemeliharaan gedung kantor pada



Tahun Anggaran 2020 mendapatkan anggaran pemeliharaan gedung kantor dan halaman bangunan sejumlah Rp. 63.137.000,- dengan rincian :

***Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tahun 2020***

No	Jenis Pemeliharaan/Perbaikan	Ruangan/ Tempat/ Lokasi	Keterangan
1.	Perawatan Gedung Kantor	Gedung Kantor / 425 m ²	Pengecatan, Perbaikan Plafon, perbaikan meja pelayanan, Penggantian Kunci pintu dan kusen.
2.	Halaman Gedung Kantor	Halaman Kantor / 200 m ²	Perbaikan pagar dan pafin blok

***Pemeliharaan Meubelair dan Peralatan dan Mesin
Tahun 2020***

No	Jenis Pemeliharaan/Perbaikan	Ruangan/ Tempat/ Lokasi	Keterangan
1.	Pembelian Oli Mesin, Filter Oli Mobil Dinas	PT.Hadji Kalla	
2.	Pembelian Baut, Isi Karburator, Busi dan Pasang Motor DN 6319 H	Bengkel Krisna Motor	
3.	Instal Windows dan anti virus Laptop Acer	@gex.com	
4.	Tambal ban Mobil Dinas DN 5 Q	Bengkel Krisna Motor	

2. Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Banggai diklasifikasikan menjadi beberapa bagian.
 - a. Kendaraan Dinas di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banggai Jenis Kendaraan Roda 4 dan Roda 2



No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus	2008	1	-	-	-
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Scorpio	2007	1	-	-	-
2	Jupiter MX	2008	1	-	-	-
3	Jupiter MX	2008	1	-	-	-
4	Jupiter MX	2008	1	-	-	-

b. Rumah Dinas dan Balai Sidang

No.	Unit kerja	Jumlah	Tipe
1.	Rumah Dinas Ketua	1 Unit	II/c
2.	Balai Sidang	1 Unit	-
Jumlah		2 Unit	

c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1. Gedung Kantor

No.	Satker	Keterangan
1.	Gedung Kantor	Belum Prototype

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Ketua	1	Rusak Ringan
2	Ruang Wakil Ketua	1	Rusak Ringan
3	Ruang Hakim	1	Rusak Ringan
4	Ruang Panitera	1	Rusak Ringan
5	Ruang Sekretaris	1	Rusak Ringan
6	Ruang Sidang Umum	1	Rusak Ringan
7	Ruang PTSP	1	Rusak Ringan



8	Ruang Umum dan Keu	1	Rusak Ringan
9	Ruang Kepegawaian	1	Rusak Ringan
10	Ruang PTIP	1	Rusak Ringan
11	Musholla	1	Rusak Ringan
12	Perpustakaan	1	Rusak Ringan
13	Ruang Kepaniteraan	1	Rusak Ringan
14	Ruang Laktasi	1	Rusak Ringan
15	Ruang Bermain Anak	1	Rusak Ringan
16	Ruang Arsip Perkara	2	Rusak Ringan
17	Gudang	1	Rusak Ringan
18	Toilet	7	Rusak Ringan
19	Ruang Terbuka	1	Baik

Meubelair, Peralatan dan Mesin

No.	Fasilitas	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Ringan	Berat
1	Laptop	15	9	0	6
2	Infokus	1	0	0	1
3	PABX	1	1	0	0
4	Mesin Ketik Manual	0	0	0	0
5	Mesin Ketik Elektronik	1	0	0	1
6	Mesin Fotocopy	0	0	0	0
7	Rak Server	1	1	0	0
8	Router Mikrotik	1	1	0	0
9	Hub	2	2	0	0
10	Server	3	2	0	1
11	Scanner	4	3	0	1
12	Printer	18	13	0	5
13	TV Media	1	1	0	0
14	PC Unit	18	16	0	2
15	Kiosk	1	1	0	0



16	Kursi Dorong	1	1	0	0
17	Genset	2	1	0	1
18	PABX	1	1	0	0
19	UPS	6	5	1	0
20	Televisi	3	2	0	1
21	AC	11	11	0	0
22	Lemari Besi	15	15	0	0
23	Lemari Kayu	15	14	0	1
24	CCTV	1	1	0	0
25	Mesin Absen	1	1	0	0
26	Meja Kerja	37	35	0	2
27	Kursi Besi	85	76	0	9
28	Sofa/Sice	5	5	0	0

Meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup peralatan kantor, sarana gedung dan kendaraan dinas. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

a) Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Banggai mendapat anggaran pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, yaitu:

- Pengadaan 2 (dua) unit PC merek Lenovo senilai Rp. 12.500.000,-
- Pengadaan 1 (satu) unit Genset merek Hartech senilai Rp. 198.000.000,-

b) Pemeliharaan



Pengadilan Agama Banggai pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan dana pemeliharaan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

c) Penghapusan

Selama tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Banggai belum melaksanakan penghapusan.

2. Administrasi Umum

Sistem administrasi umum di Pengadilan Agama Banggai berpedoman kepada aturan administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan administrasi keprotokolan, kehumasan, dan keamanan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu sistem administrasi umum yang berlaku.

Pengelolaan administrasi umum di Pengadilan Agama Banggai berada di bawah koordinasi Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan dibantu oleh para staf.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan para staf pada tahun 2020 telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi:

a) Tata Persuratan

Pengelolaan tata persuratan telah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan adanya pembukuan surat masuk dan surat keluar, dan buku ekspediter. Sistem penyimpanan baik surat masuk maupun surat keluar sudah menggunakan sistim arsip dinamis dan statis, surat-surat tersebut telah dikelompokkan berdasarkan kelompok surat menurut jenisnya. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel data di bawah ini:



Rincian Surat Keluar Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

Bulan	Kode Surat										Jumlah
	HK	KU	KP	OT	KS	HM	PP	PS	PL	PB	
Januari	29	34	76	22	18	6	-	-	6	1	
Februari	21	29	20	2	-	1	-	-	-	-	
Maret	15	20	7	3	-	-	2	-	1	-	
April	13	23	11	-	-	-	-	-	-	-	
Mei	6	12	6	2	-	1	-	-	-	-	
Juni	8	17	11	2	-	1	-	-	7	-	
Juli	13	24	24	2	-	-	-	-	-	-	
Agustus	14	36	22	1	1	-	-	-	-	-	
September	7	25	14	6	11	2	-	-	-	-	
Oktober	24	17	8	1	1	-	-	-	4	-	
Nopember	14	10	16	2	3	-	-	-	-	-	
Desember	2	7	2	-	-	-	-	-	-	-	

Rincian Surat Masuk Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020

Bulan	Kode Surat										Jumlah
	HK	KU	KP	OT	KS	HM	PP	PS	PL	PB	
Januari	14	2	2	1	-	-	1	-	-	-	
Februari	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Maret	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	5	-	8	-	1	3	-	-	-	-	
Juli	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Agustus	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
September	5	-	2	-	-	1	1	-	3	-	
Oktober	2	-	4	1	-	1	2	-	1	-	
Nopember	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
Desember	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

b) Pengelolaan Perpustakaan

Berkenaan dengan pengelolaan perpustakaan, pada periode Januari sampai Desember 2020, Pengadilan Agama Banggai telah menerima buku-buku sebanyak 2 (eks) buah dengan judul:

- Yurisprudensi sebanyak - 0 Buku



- Informasi Peraturan dan Perundang-undangan dan Kebijakan Mahkamah Agung RI sebanyak - 5 buah
- Majalah Komisi Yudisial sebanyak - 4 Buah
- Majalah Mahkamah Agung sebanyak - 5 buah
- Majalah Badan Peradilan Agama sebanyak 2 (eks)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi Pengadilan Agama Banggai senantiasa selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama. Sejak tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menggaungkan sebuah pembaruan, yang dikenal dengan sebutan Era Baru Peradilan Modern Berbasis eknologi Informasi. Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Hal inilah yang juga menjadi motivasi dan semangat Pengadilan Agama Banggai dalam mengelola penggunaan teknologi informasi-nya. Diawali dari penerapan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), kemudian penerapan E-Court (E-Filling, E-Payment dan E-Summon), kemudian penerapan persidangan esecara elektronik (E-Litigasi).

- Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka melaksanakan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, Mahkamah Agung mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.



Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung membuat terobosan yang luar biasa dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi e-Court yang bisa diakses melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Didalam aplikasi e-Court terdapat 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- pendaftaran gugatan online (e-filing);
- panggilan persidangan secara elektronik (e-Summons);
- pembayaran biaya perkara secara elektronik (e Payment).

Aplikasi e-Court secara resmi diterapkan pada empat lingkungan peradilan setelah diluncurkan secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada saat acara Pembinaan yang berlangsung di Balikpapan tanggal 13 Juli 2018.

Pada tahun 2019 telah akan dikembangkan lagi dengan menambahkan satu fungsi litigasi secara elektronik (e Litigation).

Sejak diimplementasikan aplikasi e-Court, Pengadilan Agama Banggai langsung bergerak melakukan sosialisasi penggunaan e-Court kepada para pegawai dan stakeholder khususnya advokat.

Per 30 Desember 2020 Pengadilan Agama Banggai menerima pendaftaran online sebanyak 17 Perkara menggunakan e-Court. Pendaftaran e-court dapat dirinci sebagai berikut :

No	Satker	Diterima	Dicabut	Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
				Diputus secara elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1.	PA Banggai	17	-	1	15	16	1
	Jumlah	1	-	-	1	1	-



- Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Banggai

Sudah lima tahun SIPP digunakan di Pengadilan Agama Banggai, hingga tahun 2020 ini seluruh pengguna dari berbagai stakeholder telah terbiasa menggunakan SIPP. Kinerja penyelesaian perkara pun semakin membaik dari tahun ke tahun dengan menggunakan SIPP.

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Banggai menerapkan beberapa aplikasi pendukung SIPP seperti Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP, Aplikasi Delegasi Online, Aplikasi Buku Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Pengembalian Sisa Perkara yang telah digunakan sejak tahun 2017 juga masih terus digunakan untuk meningkatkan kinerja penanganan perkara dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Selain itu, berdasarkan instruksi dari Ditjen Peradilan Agama untuk menerapkan 11 (sebelas) Aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Teknologi Infomasi Ditjen Badilag, Pengadilan Agama Banggai juga turut aktif melaksanakan perintah tersebut.

Untuk dukungan hardware, saat ini untuk kebutuhan SIPP dan E- Court, Pengadilan Agama Banggai telah menggunakan server tersendiri, yang mana server tersebut diperoleh dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada akhir tahun 2018 dan mulai digunakan pada tahun 2019. Sehingga para pengguna dapat mengakses aplikasi SIPP tanpa kendala. Aplikasi SIPP juga dapat diakses melalui jaringan WIFI, sehingga para hakim, panitera pengganti dapat dengan mudah mengakses SIPP langsung di Ruang Sidang dengan laptop/notebooknya.



Akhirnya, kunci dari keberhasilan penerapan SIPP ada di tangan para pengguna SIPP. Mengingat banyaknya aplikasi pendukung SIPP yang mengambil data dari basis data Aplikasi SIPP, maka kelengkapan dan keakuratan data yang harus diinput oleh para pengguna mulai dari petugas pendaftaran, para hakim, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, hingga petugas minutasasi menjadi sangat penting. Dengan kata lain, kedisiplinan para pengguna dalam melakukan penginputan data adalah faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan SIPP di Pengadilan. Saat ini para pengguna di Pengadilan Agama Banggai telah mahir dan terbiasa menggunakan SIPP untuk mengerjakan tugas pokok mereka sehari-hari.

Per 30 Desember 2020 Pengadilan Agama Banggai menerima pendaftaran dengan menggunakan SIPP dapat dirinci sebagai berikut :

No	Satker	Beban Perkara	Putus	Persentase Putus	Beban Minutasasi	Minutasasi	Persentase Minutasasi	Upload Direktori Putusan	Persentase Dirput	Nilai
1.	PA. Banggai	312	311	99,69%	311	311	100%	311	100%	100 %



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Pengadilan Agama Banggai sendiri telah dua kali melaksanakan Asessment Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag tepatnya pada tanggal 19 s/d 20 Oktober 2020. Adapun Tim Asesor APM Badilag yang melaksanakan Asessment Eksternal di Pengadilan Agama Banggai yaitu Bapak Sutarno, S.H., M.H., selaku Asesor Eksternal di dampingi oleh Bapak Bahrul Ulum, S.H., dan Ahmad Syahril. Hasil yang diperoleh dari Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag tersebut pada Pengadilan Agama Banggai kembali berhasil mencapai nilai dengan A Excellent untuk yang kedua kalinya yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 3951/DjA/HM-00/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hasil Assessment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020.

Dengan adanya program APM ini dapat merubah pada pola pikir dan budaya kerja apratur Pengadilan Agama Banggai dan memberi jaminan pada pelanggan bahwa pelayanan yang dberikan



oleh Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan harapan. Review pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Banggai merupakan komitmen Pengadilan Agama Banggai dalam rangka melanjutkan peningkatan kualitas peradilan agama terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, selain itu untuk melakukan pemeliharaan, pemantauan, menjaga konsistensi dan mengevaluasi penerapan sistem APM dengan melakukan penyempurnaan dan review pedoman APM. Sehingga di tahun 2021 kedepan nanti Pengadilan Agama Banggai masih tetap mempertahankan predikat A- Excellent.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Banggai

No.	Uraian	Nilai APM	Tahun	Ket.
1.	PA. Banggai	A excellent	2019	APM Tahap I
2	PA. Banggai	A excellent	2020	APM Tahap II

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian



panjang biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Sebelumnya, Pengadilan Agama Banggai masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan model bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Banggai yang tidak sesuai standar prototype bangunan pengadilan modern. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Agama Banggai, akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada akhir tahun 2018. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun back office saling



mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian	Sarana dan Prasarana		Ket.
		Ada	Tidak ada	
1.	TV media center	Ada	-	
2.	CCTV	Ada	-	
3.	Papan Waktu Istirahat	Ada	-	
4.	Papan nama petugas PTSP	Ada	-	
5.	Mesin antrian	-	Tidak	
6.	Kursi	Ada	-	
7.	Meja panjang	Ada	-	
8.	Komputer/laptop	Ada	-	
9.	Printer	Ada	-	
10.	Telepon	Ada	-	
11.	Alat tulis	Ada	-	
12.	Brosur	Ada	-	
13.	Layanan informasi	Ada	-	
14.	Layanan pendaftaran perkara	Ada	-	
15.	Layanan pembayaran biaya	Ada	-	
16.	Layanan pengambilan produk pengadilan	Ada	-	
17.	Layanan pengaduan	Ada	-	
18.	Layanan Bank	-	Tidak Ada	
19.	Layanan PT Pos	-	Tidak Ada	



- **Inovasi Pelayanan Publik**

Sejak tahun 2015 Mahkamah Agung telah gencar melakukan inovasi pelayanan publik kepada pengadilan seluruh Indonesia. Pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun MA yang ke-70 Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan. Kompetisi ini diikuti seluruh pengadilan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan terkait praktik pengembangan layanan publik di bidang peradilan. Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa kompetisi ini salah satu upaya mendorong inovasi peradilan guna terciptanya kualitas pelayanan peradilan yang lebih baik. Inovasi pelayanan publik ini wujud implementasi Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait fungsi dan peran pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya, pengadilan diberi tanggung jawab dan peran aktif untuk memastikan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa tercapai.

Selain itu untuk mengukur sejauhmana implementasi UU Pelayanan Publik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di setiap pengadilan guna mendorong terciptanya budaya berinovasi dalam melayani masyarakat. Parameter lain yang dijadikan instrumen penilaian akan dilihat sejauhmana pelaksanaan SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Disisi lain inovasi pelayanan publik ini tentunya bermanfaat bagi peningkatan layanan peradilan. Pada akhirnya dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama para pencari keadilan. Namun sampai saat ini Pengadilan Agama Banggai belum mampu



menciptakan inovasi pelayanan publik, hal ini disebabkan antara lain tidak adanya sumber daya manusia yang memadai dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi untuk menciptakan aplikasi berupa inovasi pelayanan publik.

Walaupun demikian, Pengadilan Agama Banggai telah mengadopsi dan menerapkan 11 aplikasi inovasi Badilag dalam pelayanan publik yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI diantaranya adalah antrian sidang, notifikasi perkara, e-register, simtalak, e-keuangan, validasi akta cerai, gugatan mandiri dan masih banyak yang lainnya.

Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Banggai

No.	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	Penjelasan Inovasi	Data Dukung atas Inovasi Pelayanan Publik (Nomor SK)
1.	Belum ada	-	-



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : *Pengawasan Melekat* dan *Pengawasan Fungsional*. Pengawasan ini bertujuan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Pengawasan melekat inilah yang dilaksanakan oleh tiap satuan kerja pengadilan, sedangkan pengawasan fungsional hanya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun landasan atau dasar pelaksanaan pengawasan internal adalah sebagai berikut :

- KMA : Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/98/KP.04.6/I/2020, tertanggal 9 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

1) Latar Belakang Pengawasan

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.



Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

2) Dasar Pelaksanaan Pengawasan

- a. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988, tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/80/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- g. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai, Nomor W19-A8/098/KP.04.6/I/2020, tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Banggai tahun 2020.

3) Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan Yustisial dan Non Yustisial meliputi :

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan;



4. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5. Pelayanan Publik, Meja PTSP
6. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Meja Informasi dan Pengaduan.

4) Tujuan Pengawasan

Bahwa tujuan Pengawasan ini akan diuraikan sebagai berikut :

- a) Untuk menciptakan aparatur Pengadilan Agama Banggai yang bersih dan berwibawa;
- b) Mengurangi bahkan menghilangkan penyimpangan dan penyelewengan;
- c) Mendorong terciptanya aparat Pengadilan Agama Banggai yang taat terhadap peraturan;
- d) Mendorong terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien;
- e) Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara telah sesuai dengan ketentuan administrasi perkara pola BINDALMIN;
- f) Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan manajemen peradilan dan pelayanan Publik telah dilaksanakan sesuai buku IV Pengawasan dan peraturan lainnya;
- g) Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan DIPA sesuai dengan prinsip penggunaan keuangan Negara;
- h) Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang bersih berbasis kinerja, transparan dan akuntabel;
- i) Membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (*unified legal opinion and unified legal framework*) sehingga tercipta pola standar (*legal standar*) pada Pengadilan Agama Banggai;

5) Metodologi Pengawasan

Bahwa Pengawasan di Pengadilan Agama Banggai dilakukan dengan cara :

- a. Memeriksa seluruh buku, register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II edisi 2010;



- b. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register, minutasasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan DIPA dengan memeriksa Buku Kas Umum, bukti dan dokumen pendukung pengelolaan keuangan DIPA, laporan keuangan dan SABMN;
- d. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Pengawasan langsung dengan memeriksa dan meneliti semua lingkup Obyek Pemeriksaan dan melakukan uji petik;

6) Waktu Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Waktu Pengawasan untuk peridode triwulan I dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020, dengan susunan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :
 1. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Pelayanan Publik dan Meja PTSP, oleh Moh. Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
 2. Bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan, Pengawas Bidang Pelayanan Publik, Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Meja Informasi dan Pengaduan oleh Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.
- 2) Waktu Pengawasan untuk peridode triwulan II dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dilaksanakan pada tanggal 04 s/d 06 Mei 2020, dengan susunan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :
 1. Bidang administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelayanan publik oleh Moh. Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
 2. Bidang meja PTSP, manajemen peradilan, administrasi perkara, dan administrasi persidangan oleh Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.



3. Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, meja informasi dan pengaduan oleh Syamsul Ilmi, S.H.I.
- 3) Waktu Pengawasan untuk periode triwulan III dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Oktober 2020, dengan susunan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :
1. Bidang administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelayanan publik oleh Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.
 2. Bidang meja PTSP, manajemen peradilan, administrasi perkara, dan administrasi persidangan oleh Syamsul Ilmi, S.H.I.
 3. Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, meja informasi dan pengaduan oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.
- 4) Waktu Pengawasan untuk periode triwulan IV dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Desember 2020, dengan susunan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :
1. Bidang administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pelayanan publik oleh Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.
 2. Bidang meja PTSP, manajemen peradilan, administrasi perkara, dan administrasi persidangan oleh Syamsul Ilmi, S.H.I.
 3. Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, meja informasi dan pengaduan, dan meja e-court oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

B. EVALUASI

Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan tugasnya sesuai rencana dan jadwal waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan Pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun dengan rincian setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun hasil pengawasan dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :



1. PENGAWASAN INTERNAL TRIWULAN I

A. Manajemen Peradilan

1) **Kondisi** : Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2020, sejak bulan sebelumnya s/d Juni 2020 telah melaksanakan rapat-rapat bulanan dan telah dilaksanakan rapat pembinaan pada setiap bulan tetapi dalam notulen rapat tidak ada rapat tindak lanjut APM 2019 setelah pengumuman APM PA Banggai A excellent.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009. Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama, Standar dan Poin Penilaian Penyusunan Jadwal Rencana Program.

Sebab : Tidak ada sosialisasi APM dari PTA Palu dan Pusat terkait evaluasi (surveillance) APM pada tahun 2020.

Akibat : Penyusunan tindak lanjut evaluasi APM setelah penerimaan penghargaan A excellent tidak dapat diketahui oleh seluruh pegawai, sehingga terkesan PA Banggai tidak siap melakukan surveillance APM tahun 2020.

Rekomendasi : Seharusnya di antara materi rapat bulanan dan pembinaan yang secara periodik dilakukan setiap bulan harus sudah bisa mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi setelah penyerahan APM PA Banggai agar tidak tergesa-gesa dalam mempersiapkan dokumen APM seperti perbaikan LKE dan eviden lainnya.

2) **Kondisi** : Pimpinan dan Pejabat Pengadilan Agama Banggai belum pernah melakukan diskusi dengan para Hakim atau pejabat kepaniteraan walaupun secara insidental maupun secara periodik.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009 hal 55 s/d 58 tentang Pengawasan dan Pembinaan. "Apakah Pimpinan Pengadilan baik atas permintaan Hakim maupun atas inisiatifnya sendiri telah memberikan bimbingan yang bersifat nasihat atau petunjuk umum kepada Hakim".



Sebab: Terlenu oleh rutinitas pekerjaan sehari-hari dan diskusi hanya dilakukan tergantung keadaan dan keperluannya, bahkan sosialisasi Perma atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak maksimal.

Akibat: Berpotensi terjadinya ketidaktahuan akan hukum dan peraturan yang baru bahkan bisa salah dalam penerapan putusan hakim, seperti contoh 11 aplikasi unggulan dari Badilag tentang e-court dan e-litigasi cara persidangan, ketidaktahuan akan undang-undang perkawinan terbaru tentang dispensasi nikah anak umur 19 tahun yang dahulunya anak perempuan 16 tahun anak laki-laki 18 tahun berubah keduanya menjadi 19 tahun untuk semua anak.

Rekomendasi: Seharusnya Ketua Pengadilan Agama melakukan sosialisai, menyelenggarakan diskusi dengan para Hakim ataupun pejabat kepaniteraan secara periodik dan memberikan bimbingan yang bersifat nasehat dan petunjuk umum kepada Hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat atau sukar,serta yang terbaru.

3)Kondisi : Ada Jabatan yang kosong yakni Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan sejak tahun 2018.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan mutasi ke satker lain dan belum ada penggantinya.

Akibat : Tugas pejabat tersebut diselesaikan oleh pejabat atau staf lain/rangkap jabatan.

Rekomendasi : Seharusnya segera diisi jabatan yang kosong tersebut. Dengan mengusulkan ke PTA Palu secara periodik.

4) Kondisi : Papan struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai yang baru belum dibuat.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Sebab : Ada Hakim baru yang dilantik untuk melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Banggai

Akibat : Tidak tersosialisasi struktur pimpinan dan pejabat serta staf Pengadilan Agama Banggai.

Rekomendasi : Seharusnya segera dibuat papan struktur organisasi tersebut sesegera mungkin.

B. Administrasi Perkara Dan Administrasi Persidangan

Administrasi Perkara

1) **Kondisi** : Dalam register Induk perkara tahun 2020 ditemukan banyak kolom yang masih kosong apalagi kolom Akta Cerai belum diisi Nomor dan tanggal akta cerai atas akta cerai yang telah dibuat. padahal dalam register akta cerai telah dicatat.

Kriteria : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) halaman 49 huruf c angka 9.

Sebab : Tidak teliti petugas register yang sering kali terjadi

Akibat : Tidak sama informasi yang terdapat dalam Register Akta Cerai dengan yang terdapat dalam Buku Induk Perkara Gugatan.

Rekomendasi : Dalam kegiatan pengisian register induk perkara harus diisi secara tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan dan keadaan perkara.

2) **Kondisi** : Ada beberapa perkara E-Court yang akan didaftarkan.

Kriteria : Kebijakan pimpinan di akhir tahun dengan adanya sinkronisasi pelaporan khususnya Laporan Tahunan.

Sebab : Petugas tidak mengambil sikap dan harus menerima perkara karena alasannya bahwa tidak boleh menolak perkara.

Akibat : Berpotensi perkara tersebut menjasi sisa perkara di tahun depan. Dan juga perkara tersebut diputus tidak sesuai dengan hukum acara (sekali sidang putus).

Rekomendasi : Agar melakukan tindakan yang dapat mencegah penumpukan sisa perkara di tahun depan.



Administrasi Persidangan

1) **Kondisi** : Penulisan Nomor perkara ada beberapa perkara tidak konsisten, ada yang masih menggunakan titik dua (:) sebagaimana yang terdapat pada surat gugatan, map dan sampul putusan serta pada cap yang dibubuhkan oleh Kasir pada surat gugatan dan permohonan dan penulisan nomor putusan yang masih menggunakan empat digit nomor perkara.

Kriteria : Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama (Buku II revisi tahun 2013), halaman 30 s/d 31. Setelah kata Nomor tidak memakai titik dua (:), penulisan nomor dengan menyesuaikan angka 1 sd 100, bukan lagi dengan 4 digit.

Sebab : Karena kurang teliti dalam pencetakan dan penulisan. Berpengaruh pada SIPP.

Akibat : Terdapat perbedaan dalam pemberian nomor. Menjadi berpengaruh pada upload putusan di directory putusan dan di SIPP.

Rekomendasi : Seharusnya pada setiap Nomor produk pengadilan tidak mencantumkan titik dua (:) sebagaimana Nomor pada SKUM, PMH, PHS, Relaas, BAS, Putusan/Penetapan dan pada setiap sampul atau map perkara serta pada cap yang dibubuhkan pada surat gugatan dan permohonan. Dan juga proses upload putusan bisa berhasil dengan menggunakan metode penulisan angka sesuai nomornya dari 1 sd 100.

2) **Kondisi** : Penetapan hari sidang dalam perkara Isbat Nikah amarnya tidak memuat perintah kepada Jurusita untuk mengumumkan adanya permohonan tersebut, sedangkan Jurusita telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan mendasarkan pada Penetapan Hari Sidang tersebut.

Kriteria : Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama (Buku II) halaman 143 s/d 145. dan Pedoman standarisasi formulir administrasi kepaniteraan peradilan agama tahun 2012, (8. A-



2.c.) halaman 8 (Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012).

Sebab : Jurusita Pengganti kurang teliti dan Majelis Hakim / Ketua Majelis kurang koreksi atas pengumuman Jurusita Pengganti.

Akibat : Jurusita melaksanakan pekerjaan tanpa perintah yang jelas dari Majelis Hakim.

Rekomendasi : Seharusnya Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan penetapan yang jelas dan nyata dan Majelis Hakim meneliti semua dokumen berkas perkara secara cermat dan teliti.

3) **Kondisi** : Masih terdapat pencantuman biaya perkara pada kaki putusan dalam penyebutan “biaya proses”.

Kriteria : Kesepakatan KPTA se Indonesia di Palembang.

Sebab : Informasi kepada unsur kepaniteraan belum sependapat dengan penyebutan ATK perkara.

Akibat : Tidak seragam penyebutan hal tersebut pada kaki putusan.

Rekomendasi : Seharusnya tidak lagi ditulis biaya proses namun diganti dengan pencantuman ATK perkara dan hendaknya menyesuaikan juga dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.

4) **Kondisi** : Dalam pemeriksaan saksi masih terdapat keterangan saksi yang merupakan pendapat atau kesimpulan saksi atas suatu keadaan atau opini dan masih sederhananya keterangan saksi serta kurang digali pengetahuan saksi atas suatu keadaan.

Kriteria : Pasal 308 R.Bg. / 171 HIR.

(1) Tiap tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.

(2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Sebab : Kurang telitinya Hakim dalam memeriksa keterangan saksi.

Akibat : Kesimpulan atas suatu keadaan atau opini disamakan dengan fakta.



Rekomendasi : Seharusnya keterangan saksi berupa keterangan atas suatu fakta sesuai kejadiannya dan menerangkan sebab pengetahuannya sebagaimana prinsip 4 W, 1H.

C. Administrasi Umum Dan Keuangan

1) **Kondisi** : Masih terdapat tumpukan sampah di tempat sampah pada pagi hari yang belum dibuang.

Kriteria : sampah harus dibuang setiap hari.

Sebab : kurangnya perhatian dari atasan untuk mengingatkan petugas.

Akibat : sampah menumpuk, yang merusak pemandangan serta keindahan kantor

Rekomendasi : Sampah dibuang setiap hari, sehingga diwaktu pagi hari tempat sampah dalam kondisi kosong

2) **Kondisi** : Masih ada pegawai yang memarkir kendaraanya di depan pintu masuk.

Kriteria : kendaraan parkir di tempat parkir.

Sebab : tidak ada akibat hukum yang membuat jera bagi pegawai yang parkir kendaraan di depan pintu

Akibat : lantai menjadi kotor.

Rekomendasi : ada ketegasan hukum bagi palangkar larangan parkir kendaraan di depan pintu masuk kantor.

3) **Kondisi** : Listrik di kantor Pengadilan Agama Banggai sangat terbatas, sementara barang elektronik seperti AC tidak terpakai dalam ruangan-ruangan prioritas, sering listrik tidak kuat menahan beban AC padahal yang dipakai hanya 1 unit. Disatu sisi dalam DIPA PA Banggai telah terdapat anggaran untuk tambah daya dan rehab jaringan listrik

Kriteria : Listrik kantor harusnya memadai untuk mengoperasikan seluruh barang elektronik, dan sejak bulan januari seharusnya sudah dapat dilaksanakan penambahan jaringan

Sebab : Kurangnya daya listrik di kantor Pengadilan Agama Banggai.



Akibat : Pekerjaan tidak terselesaikan karena tidak nyaman bekerja dalam ruangan yang panas dan gerah, serta mengakibatkan rusaknya sebagian barang elektronik yang ada.

Rekomendasi : Harus mempercepat penyerapan anggaran yang sudah ada untuk kelancaran serta mengoptimalkan semua pekerjaan di kantor.

4) Kondisi : Kondisi kantor bagian depan sudah sangat memprihatinkan, Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat untuk mempercantik pagar, depan gedung kantor, plafond kantor belum diganti karena rusak serta bagian belakang gedung belum dicat karena pudar warna.

Kriteria : Dengan Pagu belanja pemeliharaan kantor yang ada seharusnya sudah bergerak untuk pemeliharaan kantor.

Sebab : Belum ada percepatan pemeliharaan kantor.

Akibat : Gedung kantor terlihat kusam dan terlihat tidak terpelihara secara optimal dan maksimal.

Rekomendasi : Seharusnya sejak januari sudah dapat dilakukan penyerapan untuk mempercantik kantor

D. Administrasi Kepegawaian Dan Ortala

1) Kondisi : Kartu Pegawai Elektronik (KPE) belum dimiliki oleh Pegawai Pengadilan Agama Banggai hampir seluruh pegawai memilikinya.

Kriteria : Pegawai Negeri Sipil harusnya memiliki KPE tersebut.

Sebab : Telah diusulkan ke PTA dan diteruskan ke Mahkamah Agung, namun oleh pegawai di Mahkamah Agung menyampikan bahwa penerbitan kartu KPE oleh BKN sudah tidak dilayani lagi.

Akibat : Banyak yang belum dan tidak memiliki KPE tersebut dan masih memakai kartu pegawai yang lama (KARPEG).

Rekomendasi : Dalam rangka penerbitan kartu KPE berkoordinasi dengan PTA dan meminta kejelasan katru tersebut apakah harus dibuat atau tidak mengapa memakai kartu yang lama atau mengusulkan ke BKN RI secara kolektif malalui preosedur yang sah.



2) **Kondisi** : Masih ada Pegawai di Pengadilan Agama Banggai yang sudah mentok/tidak dapat naik pangkat lagi.

Kriteria : Seharusnya pegawai tersebut dapat diusulkan ke pengadilan yang lebih tinggi kelasnya.

Sebab : Seharusnya pegawai tersebut dapat diusulkan ketingkat banding agar dapat dimutasikan ke struktur eselonisasi yang lebih tinggi.

Akibat : Proses kenaikan pangkat tertunda.

Rekomendasi : Mengusulkan kepada Pengambil kebijakan di tingkat banding untuk melakukan proses pengusulan mutasi dari tingkat pertama ke tingkat banding atau mutasi ke Pengadilan Agama kelas 1B di wilayah PTA Palu.

3) **Kondisi** : Kurangnya jumlah pegawai di PA Banggai, sehingga kekurangan pegawai untuk pejabat jabatan yang kosong hanya dijalankan oleh pejabat Pelaksana Tugas.

Kriteria : Seharusnya ada pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Sebab : Kekurangan pegawai.

Akibat : Pekerjaan Kasubbag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, serta Kasubag Kepegawaian ortala dipegang oleh Pelaksana Tugas.

Rekomendasi : Bermohon untuk penambahan penempatan pegawai.

Menerima permohonan ASN Pemda setempat yang berkeinginan pindah menjadi pegawai PA Banggai

E. Pelayanan Publik

1) **Kondisi** : Ruang tunggu sidang sangat sempit, dan tempat minum untuk para pihak tidak terletak dalam ruang tunggu sidang.

Kriteria : Seharusnya ruang tunggu di ruang sidang lebih luas lagi, dan untuk kenyamanan para pihak disediakan tempat minum.

Akibat : Para pencari keadilan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.



Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dengan menyediakan ruang sidang yang lebih luas dan nyaman bagi pencari keadilan

2) **Kondisi :** Bangunan kantor yang belum sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Bangunan kantor yang sesuai sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai dapat memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Seharusnya : Pengadilan Agama Banggai harusnya mengusahakan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat diberikan anggaran pembangunan/rehab gedung yang sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.

Sebab : Pengadilan Agama Banggai belum memiliki tanah yang menjadi syarat pengusulan pembangunan gedung baru atau rehab gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung RI.

Akibat : Gedung kantor yang sudah masuk ketahap rehab atau gedung baru bila tidak diupayakan dalam waktu yang cepat (atau tertunda-tunda pembangunan kantor baru/rehab) dapat berdampak terhadap pelayan terhadap pencari keadilan tidak maksimal dan terganggu.

Rekomendasi : Mengusahakan pengadaan gedung prototype yang luasnya sesuai dan telah menjadi syarat untuk gedung prototype Mahkamah Agung RI. Segera mengurus hibah tanah dari PEMDA.

3) **Kondisi :** Fasilitas penyandang difabel belum ada di kantor Pengadilan Agama Banggai baik jalur atau jalan tersendiri untuk difabel dan toilet untuk difabel.

Kriteria : Seharusnya terdapat fasilitas difabel baik itu jalurnya dan toiletnya.

Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai belum sesuai dengan prototype bahkan gedung PA Banggai belum memadai untuk dibuatkan jalur dan toilet khusus untuk difabel.



Akibat : Penyandang difabel akan kesulitan bila berperkara di PA Banggai karena jalur khusus untuk difabel belum tersedia.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dan jalur khusus untuk penyandang difabel.

4) **Kondisi** : Alat pemadam kebakaran di PA Banggai belum sesuai standar

Kriteria : Sebaiknya dapat diadakan alat pemadam api yang sesuai standar.

Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai bila terjadi kebakaran maka alat pemadam yang ada saat ini belum mampu untuk memadamkan api ringan.

Akibat : Dapat mengakibatkan penanganan awal bila terjadi kebakaran tidak maksimal.

Rekomendasi : Mempersiapkan alat pemadam yang sesuai standar.

F. Perencanaan Tehnologi Informasi Dan Pelaporan

1) **Kondisi** : Server SIPP lama dalam kondisi rusak dan yang baru belum bisa aktif.

Kriteria : Untuk kelancaran pekerjaan seharusnya server SIPP aktif.

Sebab : Server lama dalam keadaan rusak, karena sering pemadaman listrik, serta daya listrik kantor PA Banggai sangat jauh dari cukup, sehingga server SIPP baru juga belum diaktifkan karena dikhawatirkan akan rusak kecuali telah daya listrik ditambah dan adanya mesin genset baru.

Akibat : Pekerjaan berkaitan SIPP terhambat.

Rekomendasi : Segera tambah daya listrik dan realisasikan pengadaan mesin genset.

G. Meja PTSP

1) **Kondisi** : Ruang tunggu PTSP sangat sempit, panas dan bocor bila hujan.

Kriteria : Seharusnya ruang tunggu PTSP lebih luas, bersih ber AC dan tidak bocor.



Sebab : Kondisi kantor masih bangunan lama, dan belum memiliki gedung baru, sehingga ruang tunggu PTSP sempit.

Akibat : Para pencari keadilan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.

Rekomendasi : Memperbaiki sebisa mungkin dengan dana pemeliharaan gedung, selain Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dengan menyediakan ruang PTSP yang lebih luas dan nyaman bagi pencari keadilan

2) **Kondisi** : Monitor E-Court belum berfungsi maksimal

Kriteria : Seharusnya untuk mempermudah para pencari keadilan mendaftar e-court layar e-court selalu diaktifkan

Sebab : Daya listrik di kantor Pengadilan Agama Bangai tidak mampu untuk mengkatifkan layar e-court.

Akibat : Para pihak pencari keadilan terhambat untuk mendaftar perkara e-court.

Rekomendasi : Setelah ada penambahan daya listrik, agar layar e-court harus selalu aktif untuk mempermudah para pihak mendaftar e-court.

H. Meja Informasi Dan Pengaduan

1) **Kondisi** : Tidak tersedianya blangko untuk para pihak yang hendak mengajukan permohonan mendapatkan informasi.

Kriteria : Lampiran Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Noomor 1-144/KMA/SK/2011.

Sebab : Belum dipelajari SK KMA

Akibat : Tidak tersedia balngko.

Rekomendasi : Segera disediakan bangko sesuai Lampiran Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Noomor 1-144/KMA/SK/2011.



2. PENGAWASAN INTERNAL TRIWULAN II

A. Manajemen Peradilan

1) **Kondisi** : Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2020, sejak bulan April s/d Juni 2020 telah melaksanakan rapat-rapat bulanan dan telah dilaksanakan rapat pembinaan pada setiap bulan tetapi dalam notulen rapat tidak ada rapat tindaklanjut APM 2019 setelah pengumuman APM PA Banggai A excellent.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009. Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama, Standar dan Poin Penilaian Penyusunan Jadwal Rencana Program.

Sebab : Tidak ada sosialisasi APM dari PTA Palu dan Pusat terkait evaluasi (surveillance) APM pada tahun 2020.

Akibat : Penyusunan tindak lanjut evaluasi APM setelah penerimaan penghargaan A excellent tidak dapat diketahui oleh seluruh pegawai, sehingga terkesan PA Banggai tidak siap melakukan surveillance APM tahun 2020.

Rekomendasi : Seharusnya di antara materi rapat bulanan dan pembinaan yang secara periodik dilakukan setiap bulan harus sudah bisa mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi setelah penyerahan APM PA Banggai agar tidak tergesa-gesa dalam mempersiapkan dokumen APM seperti perbaikan LKE dan eviden lainnya.

2) **Kondisi** : Pimpinan dan Pejabat Pengadilan Agama Banggai belum pernah melakukan diskusi dengan para Hakim atau pejabat kepaniteraan walaupun secara insidental maupun secara periodik.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009 hal 55 s/d 58 tentang Pengawasan dan Pembinaan. "Apakah Pimpinan Pengadilan baik atas permintaan Hakim maupun atas inisiatifnya sendiri telah memberikan bimbingan yang bersifat nasihat atau petunjuk umum kepada Hakim".



Sebab: Terlenu oleh rutinitas pekerjaan sehari-hari dan diskusi hanya dilakukan tergantung keadaan dan keperluannya, bahkan sosialisasi Perma atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak maksimal.

Akibat: Berpotensi terjadinya ketidaktahuan akan hukum dan peraturan yang baru bahkan bisa salah dalam penerapan putusan hakim, seperti contoh 11 aplikasi unggulan dari Badilag tentang e-court dan e-litigasi cara persidangan, ketidaktahuan akan undang-undang perkawinan terbaru tentang dispensasi nikah anak umur 19 tahun yang dahulunya anak perempuan 16 tahun anak laki-laki 18 tahun berubah keduanya menjadi 19 tahun untuk semua anak.

Rekomendasi: Seharusnya Ketua Pengadilan Agama melakukan sosialisai, menyelenggarakan diskusi dengan para Hakim ataupun pejabat kepaniteraan secara periodik dan memberikan bimbingan yang bersifat nasehat dan petunjuk umum kepada Hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat atau sukar,serta yang terbaru.

- 3) **Kondisi :** Ada Jabatan yang kosong yakni Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan sejak tahun 2018.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan mutasi ke satker lain dan belum ada penggantinya.

Akibat : Tugas pejabat tersebut diselesaikan oleh pejabat atau staf lain/rangkap jabatan.

Rekomendasi : Seharusnya segera diisi jabatan yang kosong tersebut. Dengan mengusulkan ke PTA Palu secara periodik.

- 4) **Kondisi :** Papan struktur organisasi Pengadilan Agama Banggai yang baru belum dibuat.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Sebab : Ada Hakim baru yang dilantik untuk melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Banggai

Akibat : Tidak tersosialisasi struktur pimpinan dan pejabat serta staf Pengadilan Agama Banggai.

Rekomendasi : Seharusnya segera dibuat papan struktur organisasi tersebut sesegera mungkin.

B. Administrasi Perkara Dan Administrasi Persidangan

Administrasi Perkara

1) **Kondisi** : Dalam register Induk perkara tahun 2020 ditemukan banyak kolom yang masih kosong apalagi kolom Akta Cerai belum diisi Nomor dan tanggal akta cerai atas akta cerai yang telah dibuat. padahal dalam register akta cerai telah dicatat.

Kriteria : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) halaman 49 huruf c angka 9.

Sebab : Tidak teliti petugas register yang sering kali terjadi

Akibat : Tidak sama informasi yang terdapat dalam Register Akta Cerai dengan yang terdapat dalam Buku Induk Perkara Gugatan.

Rekomendasi : Dalam kegiatan pengisian register induk perkara harus diisi secara tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan dan keadaan perkara.



2) **Kondisi** : Pendaftaran perkara masih membutuhkan waktu yang lama.

Kriteria : SOP Pendaftaran Perkara

Sebab : Tidak adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Banggai.

Akibat : Berpotensi memperlama pelayanan kepada para pencari keadilan.

Rekomendasi : Membuat ceklist jenis perkara dan sebab serta peristiwa yang melatar belakangi terjadinya perkara.

B. Administrasi Persidangan

1) **Kondisi** : Penulisan Nomor perkara ada beberapa perkara tidak konsisten, ada yang masih menggunakan titik dua (:) sebagaimana yang terdapat pada surat gugatan, map dan sampul putusan serta pada cap yang dibubuhkan oleh Kasir pada surat gugatan dan permohonan dan penulisan nomor putusan yang masih menggunakan empat digit nomor perkara.

Kriteria : Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama (Buku II revisi tahun 2013), halaman 30 s/d 31. Setelah kata Nomor tidak memakai titik dua (:), penulisan nomor dengan menyesuaikan angka 1 sd 100, bukan lagi dengan 4 digit.

Sebab : Karena kurang teliti dalam pencetakan dan penulisan. Berpengaruh pada SIPP.

Akibat : Terdapat perbedaan dalam pemberian nomor. Menjadi berpengaruh pada upload putusan di directory putusan dan di SIPP.

Rekomendasi : Seharusnya pada setiap Nomor produk pengadilan tidak mencantumkan titik dua (:) sebagaimana



Nomor pada SKUM, PMH, PHS, Relas, BAS, Putusan/Penetapan dan pada setiap sampul atau map perkara serta pada cap yang dibubuhkan pada surat gugatan dan permohonan. Di samping itu, proses upload putusan bisa berhasil dengan menggunakan metode penulisan angka sesuai nomornya dari 1 sd 100.

- 2) **Kondisi** : Penetapan hari sidang dalam perkara Isbat Nikah amarnya tidak memuat perintah kepada Jusrita untuk mengumumkan adanya permohonan tersebut, sedangkan Jusrita telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan mendasarkan pada Penetapan Hari Sidang tersebut.

Kriteria : Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan Agama (Buku II) halaman 143 s/d 145. dan Pedoman standarisasi formulir administrasi kepaniteraan peradilan agama tahun 2012, (8. A-2.c.) halaman 8 (Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012).

Sebab : Jusrita Pengganti kurang teliti dan Majelis Hakim / Ketua Majelis kurang koreksi atas pengumuman Jusrita Pengganti.

Akibat : Jusrita melaksanakan pekerjaan tanpa perintah yang jelas dari Majelis Hakim.

Rekomendasi : Seharusnya Jusrita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan penetapan yang jelas dan nyata dan Majelis Hakim meneliti semua dokumen berkas perkara secara cermat dan teliti.

3) **Kondisi** : Masih terdapat pencantuman biaya perkara pada kaki putusan dalam penyebutan “biaya proses”.

Kriteria : Kesepakatan KPTA se Indonesia di Palembang.

Sebab : Informasi kepada unsur kepaniteraan belum sependapat dengan penyebutan ATK perkara.

Akibat : Tidak seragam penyebutan hal tersebut pada kaki putusan.

Rekomendasi : Seharusnya tidak lagi ditulis biaya proses namun diganti dengan pencantuman ATK perkara dan hendaknya menyesuaikan juga dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.

4) **Kondisi** : Dalam pemeriksaan saksi masih terdapat keterangan saksi yang merupakan pendapat atau kesimpulan saksi atas suatu keadaan atau opini dan masih sederhananya keterangan saksi serta kurang digali pengetahuan saksi atas suatu keadaan.

Kriteria : Pasal 308 R.Bg. / 171 HIR.

(1) Tiap tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.

(2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Sebab : Kurang telitinya Hakim dalam memeriksa keterangan saksi.

Akibat : Kesimpulan atas suatu keadaan atau opini disamakan dengan fakta.

Rekomendasi : Seharusnya keterangan saksi berupa keterangan atas suatu fakta sesuai kejadiannya dan menerangkan sebab pengetahuannya sebagaimana prinsip 4 W, 1H.



C. Administrasi Umum Dan Keuangan

- 1) **Kondisi** : Masih terdapat tumpukan sampah di tempat sampah pada pagi hari yang belum dibuang.

Kriteria : sampah harus dibuang setiap hari.

Sebab : kurangnya perhatian dari atasan untuk mengingatkan petugas.

Akibat : sampah menumpuk, yang merusak pemandangan serta keindahan kantor

Rekomendasi : sampah dibuang setiap hari, sehingga diwaktu pagi hari tempat sampah dalam kondisi kosong

- 2) **Kondisi** : Listrik di kantor Pengadilan Agama Banggai sangat terbatas, sementara barang elektronik seperti AC tidak terpakai dalam ruangan-ruangan prioritas, sering listrik tidak kuat menahan beban AC padahal yang dipakai hanya 1 unit. Disatu sisi dalam DIPA PA Banggai telah terdapat anggaran untuk tambah daya dan rehab jaringan listrik.

Kriteria : Listrik kantor harusnya memadai untuk mengopersikan seluruh barang elektronik, dan sejak bulan januari seharusnya sudah dapat dilaksanakan penambahan jaringan

Sebab : Kurangnya daya listrik di kantor Pengadilan Agama Banggai.

Akibat : Pekerjaan tidak terselesaikan karena tidak nyaman bekerja dalam ruangan yang panas dan gerah, serta mengakibatkan rusaknya sebagian barang elektronik yang ada.



Rekomendasi : Mempercepat penyerapan anggaran yang sudah ada untuk kelancaran serta mengoptimalkan semua pekerjaan di kantor.

- 3) **Kondisi** : Kondisi kantor bagian depan sudah sangat memprihatinkan, Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat untuk mempercantik pagar, depan gedung kantor, plafond kantor belum diganti karena rusak serta bagian belakang gedung belum dicat karena pudar warnanya.

Kriteria : Dengan Pagu belanja pemeliharaan kantor yang ada seharusnya sudah bergerak untuk pemeliharaan kantor.

Sebab : Belum ada percepatan pemeliharaan kantor.

Akibat : Gedung kantor terlihat kusam dan terlihat tidak terpelihara secara optimal dan maksimal.

Rekomendasi : Segera melakukan perbaikan untuk mempercantik gedung.

D. Administrasi Kepegawaian Dan Ortala

- 1) **Kondisi** : Kartu Pegawai Elektronik (KPE) belum dimiliki oleh Pegawai Pengadilan Agama Banggai hampir seluruh pegawai memilikinya.

Kriteria : Pegawai Negeri Sipil harusnya memiliki KPE tersebut.

Sebab : Telah diusulkan ke PTA dan diteruskan ke Mahkamah Agung, namun oleh pegawai di Mahkamah Agung menyampaikan bahwa penerbitan kartu KPE oleh BKN sudah tidak dilayani lagi.



Akibat : Banyak yang belum dan tidak memiliki KPE tersebut dan masih memakai kartu pegawai yang lama (KARPEG).

Rekomendasi : Dalam rangka penerbitan kartu KPE berkoordinasi dengan PTA dan meminta kejelasan kartu tersebut apakah harus dibuat atau tidak mengapa memakai kartu yang lama atau mengusulkan ke BKN RI secara kolektif melalui prosedur yang sah.

- 2) **Kondisi** : Masih ada Pegawai di Pengadilan Agama Banggai yang sudah mentok/tidak dapat naik pangkat lagi.

Kriteria : Seharusnya pegawai tersebut dapat diusulkan ke pengadilan yang lebih tinggi kelasnya.

Sebab : Seharusnya pegawai tersebut dapat diusulkan ke tingkat banding agar dapat dimutasikan ke struktur eselonisasi yang lebih tinggi.

Akibat : Proses kenaikan pangkat tertunda.

Rekomendasi : Mengusulkan kepada Pengambil kebijakan di tingkat banding untuk melakukan proses pengusulan mutasi dari tingkat pertama ke tingkat banding atau mutasi ke Pengadilan Agama kelas 1B di wilayah PTA Palu.

- 3) **Kondisi** : Kurangnya jumlah pegawai di PA Banggai, sehingga kekurangan pegawai untuk pejabat jabatan yang kosong hanya dijalankan oleh pejabat Pelaksana Tugas.

Kriteria : Seharusnya ada pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Sebab : Kekurangan pegawai.



Akibat : Pekerjaan Kasubbag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, serta Kasubag Kepegawaian ortala dipegang oleh Pelaksana Tugas.

Rekomendasi : Bermohon untuk penambahan penempatan pegawai. Menerima permohonan ASN Pemda setempat yang berkeinginan pindah menjadi pegawai PA Banggai.

E. Pelayanan Publik

- 1) **Kondisi** : Ruang tunggu sidang sempit, dan tempat minum untuk para pihak tidak terletak dalam ruang tunggu sidang.

Kriteria : Seharusnya ruang tunggu di ruang sidang lebih luas lagi, dan untuk kenyamanan para pihak disediakan tempat minum.

Akibat : Para pencari keadilan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dengan menyediakan ruang sidang yang lebih luas dan nyaman bagi pencari keadilan.

- 2) **Kondisi** : Bangunan kantor yang belum sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Bangunan kantor yang sesuai sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai dapat memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Sebab : Pengadilan Agama Banggai belum memiliki tanah yang menjadi syarat pengusulan pembangunan gedung baru atau rehab gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung RI.



Akibat : Gedung kantor yang sudah masuk ketahap rehab atau gedung baru bila tidak diupayakan dalam waktu yang cepat (atau tertunda-tunda pembangunan kantor baru/rehab) dapat berdampak terhadap pelayan terhadap pencari keadilan tidak maksimal dan terganggu.

Rekomendasi : Mengusahakan pengadaan gedung prototype yang luasnya sesuai dan telah menjadi syarat untuk gedung prototype Mahkamah Agung RI. Segera mengurus hibah tanah dari PEMDA

- 3) **Kondisi** : Fasilitas toilet penyandang difabel belum ada di kantor Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Seharusnya terdapat fasilitas difabel baik itu jalurnya dan toiletnya.

Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai belum susai dengan prototype bahkan gedung PA Banggai belum memadai untuk dibuatkan jalur dan toilet khusus untuk difabel.

Akibat : Penyandang difabel akan kesulitan bila berperkara di PA Banggai karena jalur khusus untuk difabel belum tersedia.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dan jalur khusus untuk penyandang difabel.

- 4) **Kondisi** : Alat pemadam kebakaran di PA Banggai belum sesuai standar

Kriteria : Sebaiknya dapat diadakan alat pemadam api yang sesuai standar.



Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai bila terjadi kebakaran maka alat pemadam yang ada saat ini belum mampu untuk memadamkan api ringan.

Akibat : Dapat mengakibatkan penanganan awal bila terjadi kebakaran tidak maksimal.

Rekomendasi : Mempersiapkan alat pemadam yang sesuai standard.

F. Perencanaan Tehnologi Informasi Dan Pelaporan

1). **Kondisi :** Program kerja belum dimiliki oleh setiap sub bagian.

Kriteria : Program kerja untuk Rencana Strategi (Renstra).

Sebab : Masih belum memahami tentang kewajiban penyusunan proker di setiap sub bagian. Oleh karena rangkap jabatan dan kekosongan pejabat pada bidang ini.

Akibat : Tidak ada program kerja dimasing-masing sub bagian.

Rekomendasi : Masing-masing sub bagian menyusun program kerja yang sesuai dengan Renstra satuan kerja.

2). **Kondisi :** Informasi Website Pengadilan belum terupdate setiap hari dan terkadang isi website tidak dapat diakses.

Kriteria : SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab : Website mengalami *hacking* (peretasan)

Akibat : Tampilan website berubah dan isi website masih ada yang tidak dapat ditampilkan.

Rekomendasi : Menugaskan penanggungjawab website untuk memperbaharui berita setiap hari dan melakukan pengamanan (back up) terhadap informasi yang ada dalam website.



3). **Kondisi** : Masih minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kriteria : Program Ditjen Badilag terkait Peradilan Agama berbasis Teknologi Informasi

Sebab : SDM Profesional terkait programmer tidak ada

Akibat : Nilai Kinerja Satker dalam hal inovasi peradilan kurang

Rekomendasi : Mengidentifikasi jenis inovasi yang dapat diciptakan dalam pengembangan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

G. Meja PTSP

1) **Kondisi** : Belum ada aplikasi antrian para pencari keadilan untuk berperkara di PA Banggai dan meja PTSP belum satu deretan dengan meja informasi dan pengaduan tetapi masih terpisah.

Kriteria : Harus sesuai dengan pedoman PTSP dan Informasi dan Pengaduan.

Sebab : Gedung pengadilan belum prototype sesuai standar.

Akibat : Dapat terjadi salah pengertian antara petugas-petugas PTSP (error communication) sesuai tugas dan tanggung jawab para petugas PTSP.

Rekomendasi : Dalam kegiatan PTSP harus ada komunikasi yang baik (satu arah) pengisian register induk perkara harus diisi secara tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan dan keadaan perkara dan ruangan yang kurang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia serta memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan para pencari keadilan. Membuat penghalang antara para pencari keadilan dengan



Petugas PTSP sehingga penerapan *physical distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dapat diterapkan.

- 2) **Kondisi** : Meja PTSP masih kurang dengan layanan bank dan pos

Kriteria : Spesifikasi PTSP sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/ OT.01.3/I/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Akibat : Menjadi temuan dalam pembinaan dan pengawasan HATIMWASDA

Rekomendasi : Melakukan audiensi dan MoU dengan mitra terkait dalam hal pengadaan layanan bank dan pos.

- 3) **Kondisi** : Belum ada pembatas antara para pencari keadilan dan petugas PTSP dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Kriteria : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.

Akibat : Petugas PTSP dapat terpapar virus COVID-19.

Rekomendasi : Membuat penghalang antara para pencari keadilan dengan Petugas PTSP sehingga penerapan *physical distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dapat diterapkan.

H. Meja Informasi Dan Pengaduan

- 1) **Kondisi** : Formulir Permohonan Informasi dan Pengaduan belum tersedia setiap saat.



Kriteria : SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab : Keterbatasan sumber daya manusia.

Akibat : Informasi diberikan secara terpisah dan petugas pelayanan informasi dan pengaduan dirangkap oleh Petugas Satpam.

Rekomendasi : Menempatkan formulir permohonan informasi dan pengaduan sesuai SK KMA tersebut dengan tetap memperhatikan panduan penanganan COVID-19 dan diusahakan untuk penambahan pegawai di Pengadilan Agama Banggai.

2) **Kondisi :** Belum ada pembatas antara masyarakat dan petugas Informasi

Kriteria : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tata Normal Baru.

Sebab : Belum dilakukan perbaikan meja informasi dan pengaduan

Akibat : Petugas PTSP dapat terpapar virus COVID-19.

Rekomendasi : Membuat penghalang antara para pencari keadilan dengan Petugas Informasi sehingga penerapan *physical distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dapat diterapkan.

3) **Kondisi :** Petugas Meja Informasi dan Pengaduan belum ditentukan.

Kriteria : SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).



Akibat : Meja informasi dan pengaduan sering dalam keadaan kosong ketika ada masyarakat datang ke kantor.

Rekomendasi : Membuat SK Petugas Informasi dan Pengaduan.

3. PENGAWASAN INTERNAL TRIWULAN III

A. Manajemen Peradilan

1) **Kondisi** : Ada Jabatan yang kosong yakni Kasubag Kepegawaian, dan Ortala serta Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan sejak tahun 2018.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI.

Sebab : Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan mutasi ke satker lain dan belum ada penggantinya.

Akibat : Tugas pejabat tersebut diselesaikan oleh pejabat atau staf lain/rangkap jabatan.

Rekomendasi : Melaporkan dan mengusulkan kepada PTA terkait kekosongan jabatan secara periodik.

2) **Kondisi** : Hanya ada satu Jusurita di PA Banggai yaitu Jusurita Pengganti saja.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Jusurita mutasi ke satker lain dan belum ada penggantinya.



Akibat : Tupoksi jurusita/jurusita pengganti dibebankan kepada 1 (satu) orang dengan beban perkara yang banyak.

Rekomendasi : Melaporkan dan mengusulkan kepada PTA terkait kekurangan jurusita/jurusita pengganti secara periodik.

3) Kondisi : Ruang Tunggu para pihak sempit;

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Ruang Tunggu belum diperluas.

Akibat : Para pihak harus berdiri atau duduk di lantai untuk menunggu persidangan.

Rekomendasi : Menambah ruang tunggu para pihak.

B. Administrasi Perkara Dan Administrasi Persidangan

- Administrasi Perkara

1) Kondisi : Pendaftaran perkara masih membutuhkan waktu yang lama.

Kriteria : SOP Pendaftaran Perkara

Sebab : Tidak adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Banggai.

Akibat : Berpotensi memperlama pelayanan kepada para pencari keadilan.

Rekomendasi : Membuat formulir pendaftaran perkara berupa ceklis, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat dengan mudah memilih jenis perkara dan sebab serta peristiwa yang melatar belakangi adanya permohonan atau gugatan yang akan diajukan.

- Administrasi Persidangan

1) Kondisi : Tidak adanya instrumen Pengembalian Sisa Panjar (PSP) setelah perkara diputus.



Kriteria : Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Sebab : Instrumen belum dibuat dan dicetak.

Akibat : Majelis Hakim harus menjelaskan setiap perkara telah diputus.

Rekomendasi : Membuat dan mencetak instrument PSP tersebut.

2) **Kondisi :** Masih terdapat pencantuman biaya perkara pada kaki putusan dalam penyebutan “biaya proses”.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Sebab : Informasi kepada unsur kepaniteraan belum sependapat dengan penyebutan ATK perkara.

Akibat : Tidak seragam penyebutan hal tersebut pada kaki putusan.

Rekomendasi : Seharusnya tidak lagi ditulis biaya proses namun diganti dengan pencantuman ATK perkara dan hendaknya menyesuaikan juga dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.

3) **Kondisi :** Tidak ada mesin antrian sidang.

Kriteria : Pemanfaatan Teknologi dalam Menunjang Persidangan.

Sebab : Mesin antrian sidang belum tersedia.

Akibat : Mengganggu jalannya persidangan.

Rekomendasi : Menyediakan mesin antrian sidang tahun anggaran selanjutnya.



C. Administrasi Umum Dan Keuangan

1) **Kondisi** : Beberapa aplikasi terkait umum dan keuangan dirangkap oleh jurusita pengganti dan honorer.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Kekurangan Sumber Daya Manusia (Bendahara Pengeluaran)

Akibat : Adanya rangkap jabatan serta tupoksi;

Rekomendasi : Mengusulkan penambahan aparatur ke PTA Palu secara periodik.

2) **Kondisi** : Kondisi kantor bagian depan sudah sangat memprihatinkan, Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat untuk mempercantik pagar, depan gedung kantor, plafond kantor belum diganti karena rusak serta bagian belakang gedung belum dicat karena pudar warnanya.

Kriteria : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Pengadilan Agama Banggai.

Sebab : Pagu anggaran yang diberikan belum cukup untuk pemeliharaan gedung secara menyeluruh.

Akibat : Gedung kantor terlihat kusam dan terlihat tidak terpelihara secara optimal dan maksimal.

Rekomendasi : Melakukan pembenahan gedung kantor pada DIPA 01 tahun selanjutnya.

D. Administrasi Kepegawaian Dan Ortala

1) **Kondisi** : Kasubbag Kepegawaian dirangkap oleh Jurusita Pengganti sekaligus sebagai Bendahara Pengeluaran.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI.

Sebab : Kekurangan pegawai.

Akibat : Pekerjaan Kasubbag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, serta Kasubag Kepegawaian ortala dipegang oleh Pelaksana Tugas.

Rekomendasi : Bermohon untuk penambahan penempatan pegawai.

Menerima permohonan ASN Pemda setempat yang berkeinginan pindah menjadi pegawai PA Banggai.

2) **Kondisi** : Kartu Pegawai Elektronik (KPE) belum dimiliki oleh Pegawai Pengadilan Agama Banggai hampir seluruh pegawai memilikinya.

Kriteria : Pegawai Negeri Sipil harusnya memiliki KPE tersebut.

Sebab : Telah diusulkan ke PTA dan diteruskan ke Mahkamah Agung, namun oleh pegawai di Mahkamah Agung menyampikan bahwa penerbitan kartu KPE oleh BKN sudah tidak dilayani lagi.

Akibat : Banyak yang belum dan tidak memiliki KPE tersebut dan masih memakai kartu pegawai yang lama (KARPEG).

Rekomendasi : Dalam rangka penerbitan kartu KPE berkoordinasi dengan PTA dan meminta kejelasan katru tersebut apakah harus dibuat atau tidak mengapa memakai kartu yang lama atau mengusulkan ke BKN RI secara kolektif malalui preosedur yang sah.

3) **Kondisi** : Papan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ *Bezetting* belum ter-*update*.



Kriteria : Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Sebab : Proses mutasi pegawai masih berlangsung pada tahun 2020.

Akibat : Papan DUK/*Bezetting* masih terdapat nama-nama pegawai yang telah mutasi.

Rekomendasi : Memperbaharui papa DUK/ *Bezetting*.

E. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

1. **Kondisi** : Program kerja belum dimiliki oleh setiap sub bagian.

Kriteria : Program kerja untuk Rencana Strategi (Renstra).

Sebab : Masih belum memahami tentang kewajiban penyusunan proker di setiap sub bagian. Oleh karena rangkap jabatan dan kekosongan pejabat pada bidang ini.

Akibat : Tidak ada program kerja dimasing-masing sub bagian.

Rekomendasi : Masing-masing sub bagian menyusun program kerja yang sesuai dengan Renstra satuan kerja.

2. **Kondisi** : Informasi Website Pengadilan belum terupdate setiap hari dan terkadang isi website tidak dapat diakses.

Kriteria : SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebab : Website mengalami *hacking* (peretasan)

Akibat : Tampilan website berubah dan isi website masih ada yang tidak dapat ditampilkan.

Rekomendasi : Menugaskan penanggungjawab website untuk memperbaharui berita setiap hari dan melakukan



pengamanan (back up) terhadap informasi yang ada dalam website.

3. **Kondisi** : Masih minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kriteria : Program Ditjen Badilag terkait Peradilan Agama berbasis Teknologi Informasi

Sebab : SDM Profesional terkait programmer tidak ada

Akibat : Nilai Kinerja Satker dalam hal inovasi peradilan kurang

Rekomendasi : Mengidentifikasi jenis inovasi yang dapat diciptakan dalam pengembangan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

F. Layanan PTSP

- 1) **Kondisi** : Belum ada aplikasi antrian para pencari keadilan untuk berperkara di PA Banggai dan meja PTSP belum satu deretan dengan meja informasi dan pengaduan tetapi masih terpisah.

Kriteria : Harus sesuai dengan pedoman PTSP dan Informasi dan Pengaduan.

Sebab : Gedung pengadilan belum prototype sesuai standar.

Akibat : Dapat terjadi salah pengertian antara petugas-petugas PTSP (error communication) sesuai tugas dan tanggung jawab para petugas PTSP.

Rekomendasi : Dalam kegiatan PTSP harus ada komunikasi yang baik (satu arah) pengisian register induk perkara harus diisi secara tertib dan cermat sesuai dengan perkembangan dan keadaan perkara dan ruangan yang kurang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia serta memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan para pencari keadilan.



Membuat penghalang antara para pencari keadilan dengan Petugas PTSP sehingga penerapan *physical distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dapat diterapkan.

2) Kondisi : Meja PTSP masih kurang dengan layanan bank dan pos

Kriteria : Spesifikasi PTSP sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/ OT.01.3/I/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Akibat : Menjadi temuan dalam pembinaan dan pengawasan HATIMWASDA

Rekomendasi : Melakukan audiensi dan MoU dengan mitra terkait dalam hal pengadaan layanan bank dan pos.

G. Meja E-Court

1) Kondisi : Pendaftaran perkara secara *E-Court* minim.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Akibat : Perkara *E-Court* yang terdaftar masih sedikit.

Rekomendasi : Memaksimalkan sosialisasi PERMA *E-Court*.

H. Pelayanan Publik

1) Kondisi : Ruang tunggu sidang sempit, dan tempat minum untuk para pihak tidak terletak dalam ruang tunggu sidang.

Kriteria : Seharusnya ruang tunggu di ruang sidang lebih luas lagi, dan untuk kenyamanan para pihak disediakan tempat minum.

Akibat : Para pencari keadilan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.



Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dengan menyediakan ruang sidang yang lebih luas dan nyaman bagi pencari keadilan.

2) Kondisi : Bangunan kantor yang belum sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Bangunan kantor yang sesuai sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai dapat memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Sebab : Pengadilan Agama Banggai belum memiliki tanah yang menjadi syarat pengusulan pembangunan gedung baru atau rehab gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung RI.

Akibat : Gedung kantor yang sudah masuk ketahap rehab atau gedung baru bila tidak diupayakan dalam waktu yang cepat (atau tertunda-tunda pembangunan kantor baru/rehab) dapat berdampak terhadap pelayan terhadap pencari keadilan tidak maksimal dan terganggu.

Rekomendasi : Mengusahakan pengadaan gedung prototype yang luasnya sesuai dan telah menjadi syarat untuk gedung prototype Mahkamah Agung RI.

Segera mengurus hibah tanah dari PEMDA

3) Kondisi : Fasilitas toilet penyandang difabel belum ada di kantor Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Seharusnya terdapat fasilitas difabel baik itu jalurnya dan toiletnya.

Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai belum susai dengan prototype bahkan gedung PA Banggai belum



memadai untuk dibuatkan jalur dan toilet khusus untuk difabel.

Akibat : Penyandang difabel akan kesulitan bila berperkara di PA Banggai karena jalur khusus untuk difabel belum tersedia.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dan jalur khusus untuk penyandang difabel.

4. PENGAWASAN INTERNAL TRIWULAN IV

A. Manajemen Peradilan

1) **Kondisi :** Ada Jabatan yang kosong yakni Kasubag Kepegawaian, dan Ortala serta Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan sejak tahun 2018.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI.

Sebab : Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan mutasi ke satker lain dan belum ada penggantinya.

Akibat : Tugas pejabat tersebut diselesaikan oleh pejabat atau staf lain/rangkap jabatan.

Rekomendasi : Melaporkan dan mengusulkan kepada PTA terkait kekosongan jabatan secara periodik.

2) **Kondisi :** Ruang Tunggu para pihak sempit;

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Ruang Tunggu belum diperluas.



Akibat : Para pihak harus berdiri atau duduk di lantai untuk menunggu persidangan.

Rekomendasi : Menambah ruang tunggu para pihak.

B. Administrasi Perkara Dan Administrasi Persidangan

- 1) **Kondisi** : Tidak adanya instrumen Pengembalian Sisa Panjar (PSP) setelah perkara diputus.

Kriteria : Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Sebab : Instrumen belum dibuat dan dicetak.

Akibat : Majelis Hakim harus menjelaskan setiap perkara telah diputus.

Rekomendasi : Membuat dan mencetak instrument PSP tersebut.

- 2) **Kondisi** : Masih terdapat pencantuman biaya perkara pada kaki putusan dalam penyebutan “biaya proses”.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Sebab : Informasi kepada unsur kepaniteraan belum sependapat dengan penyebutan ATK perkara.

Akibat : Tidak seragam penyebutan hal tersebut pada kaki putusan.

Rekomendasi : Seharusnya tidak lagi ditulis biaya proses namun diganti dengan pencantuman ATK perkara dan hendaknya menyesuaikan juga dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.

- 3) **Kondisi** : Tidak ada mesin antrian sidang.



Kriteria : Pemanfaatan Teknologi dalam Menunjang Persidangan.

Sebab : Mesin antrian sidang belum tersedia.

Akibat : Mengganggu jalannya persidangan.

Rekomendasi : Menyediakan mesin antrian sidang tahun anggaran selanjutnya.

C. Administrasi Umum Dan Keuangan

1) **Kondisi** : Beberapa aplikasi terkait umum dan keuangan dirangkap oleh jurusita pengganti dan honorer.

Kriteria : Buku IV, Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi tahun 2009.

Sebab : Kekurangan Sumber Daya Manusia (Bendahara Pengeluaran)

Akibat : Adanya rangkap jabatan serta tupoksi;

Rekomendasi : Melakukan *follow-up* pengusulan penambahan pegawai.

2) **Kondisi** : Kondisi kantor bagian depan sudah sangat memprihatinkan, Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat untuk mempercantik pagar, depan gedung kantor, plafond kantor belum diganti karena rusak serta bagian belakang gedung belum dicat karena pudar warnanya.

Kriteria : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Pengadilan Agama Banggai.

Sebab : Pagu anggaran yang diberikan belum cukup untuk pemeliharaan gedung secara menyeluruh.

Akibat : Gedung kantor terlihat kusam dan terlihat tidak terpelihara secara optimal dan maksimal.



Rekomendasi : Melakukan pembenahan gedung kantor pada DIPA 01 tahun selanjutnya.

D. Administrasi Kepegawaian Dan Ortala

- 1) **Kondisi** : Kasubbag Kepegawaian dirangkap oleh Jurusita Pengganti sekaligus sebagai Bendahara Pengeluaran.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan MA RI.

Sebab : Kekurangan pegawai.

Akibat : Pekerjaan Kasubbag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, serta Kasubag Kepegawaian ortala dipegang oleh Pelaksana Tugas.

Rekomendasi : Melakukan *follow-up* permohonan penambahan pegawai.

- 2) **Kondisi** : Papan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ *Bezetting* belum ter-*update*.

Kriteria : Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Sebab : Proses mutasi pegawai masih berlangsung pada tahun 2020.

Akibat : Papan DUK/*Bezetting* masih terdapat nama-nama pegawai yang telah mutasi.

Rekomendasi : Memperbaharui papa DUK/ *Bezetting*.

E. Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

1. **Kondisi** : Masih minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.



Kriteria : Program Ditjen Badilag terkait Peradilan Agama berbasis Teknologi Informasi

Sebab : SDM Profesional terkait programmer tidak ada

Akibat : Nilai Kinerja Satker dalam hal inovasi peradilan kurang

Rekomendasi : Mengidentifikasi jenis inovasi yang dapat diciptakan dalam pengembangan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

F. Layanan PTSP

1) **Kondisi :** Meja PTSP masih kurang dengan layanan bank dan pos

Kriteria : Spesifikasi PTSP sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/ OT.01.3/I/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Akibat : Menjadi temuan dalam pembinaan dan pengawasan HATIMWASDA

Rekomendasi : Melakukan audiensi dan MoU dengan mitra terkait dalam hal pengadaan layanan bank dan pos.

G. Meja E-Court

1) **Kondisi :** Pendaftaran perkara secara *E-Court* minim.

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Akibat : Perkara *E-Court* yang terdaftar masih sedikit.

Rekomendasi : Memaksimalkan sosialisasi PERMA *E-Court*.

H. Pelayanan Publik

1) **Kondisi :** Ruang tunggu sidang sempit, dan tempat minum untuk para pihak tidak terletak dalam ruang tunggu sidang.



Kriteria : Seharusnya ruang tungga di ruang sidang lebih luas lagi, dan untuk kenyamanan para pihak disediakan tempat minum.

Akibat : Para pencari keadilan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dengan menyediakan ruang sidang yang lebih luas dan nyaman bagi pencari keadilan.

2) **Kondisi** : Bangunan kantor yang belum sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Bangunan kantor yang sesuai sesuai prototype Mahkamah Agung RI untuk gedung Pengadilan Agama Banggai dapat memaksimalkan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Sebab : Pengadilan Agama Banggai belum memiliki tanah yang menjadi syarat pengusulan pembangunan gedung baru atau rehab gedung kantor yang sesuai prototype Mahlamah Agung RI.

Akibat : Gedung kantor yang sudah masuk ketahap rehab atau gedung baru bila tidak diupayakan dalam waktu yang cepat (atau tertunda-tunda pembangunan kantor baru/rehab) dapat berdampak terhadap pelayan terhadap pencari keadailan tidak maksimal dan terganggu.

Rekomendasi : Mengusahakan pengadaan gedung prototype yang luasnya sesuai dan telah menjadi syarat untuk gedung prototype Mahkamah Agung RI.

Segera mengurus hibah tanah dari PEMDA.



3) **Kondisi** : Fasilitas toilet penyandang difabel belum ada di kantor Pengadilan Agama Banggai.

Kriteria : Seharusnya terdapat fasilitas difabel baik itu jalurnya dan toiletnya.

Sebab : Gedung Kantor Pengadilan Agama Banggai belum sesuai dengan prototype bahkan gedung PA Banggai belum memadai untuk dibuatkan jalur dan toilet khusus untuk difabel.

Akibat : Penyandang difabel akan kesulitan bila berperkara di PA Banggai karena jalur khusus untuk difabel belum tersedia.

Rekomendasi : Mempersiapkan gedung kantor yang sesuai prototype dan jalur khusus untuk penyandang difabel.



BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja terhadap rencana strategis tahun 2019 Pengadilan Agama Banggai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, rencana strategis yang diuraikan dalam kegiatan Pengadilan Agama Banggai selama tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik. Dari keseluruhan kegiatan yang dibagi dalam 2 bidang, yakni kepaniteraaran dan kesekretariatan, secara umum mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Keadaan perkara mengalami penurunan jumlah perkara, dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima berjumlah 309 perkara di tambah sisa perkara sebelumnya sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2020 adalah 312 perkara. Sementara perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 311 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 berjumlah 1 perkara. Capaian perkara yang dapat diselesaikan tahun 2020 (99,68%). Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat perkara banding sebanyak 3 perkara, 1 perkara telah diselesaikan dan 2 perkara menjadi sisa di tahun 2020.
3. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar 98,26%, sedangkan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 99,49%.
4. Penyelesaian dan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai secara umum telah dapat dilaksanakan walaupun sarana dan prasarananya cukup terbatas. Olehnya itu dalam pelaksanaannya



masih menemui sedikit hambatan dan kendala sebagaimana telah dijelaskan. Sebagai akibatnya, pencapaian kinerja yang telah ditetapkan menjadi tidak maksimal.

5. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan karena masih adanya tugas rangkap yang dilaksanakan dalam pelayanan.
6. Upaya pembinaan dan pengawasan, kedepan akan lebih diintensifkan lagi, karena dari segi pembinaan akan dapat memberikan nilai positif sebagai bentuk evaluasi berjalan atas pelaksanaan tugas keseharian, sedangkan dari segi pengawasan sebagai bentuk preventif memperkecil segala kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam kurun waktu itu.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas, perlu diperhatikan saran-saran berikut :

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik.
2. Pembinaan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal.
3. Sebagai bagian yang pertama berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan, layanan meja informasi dan pengaduan hendaknya menjadi perhatian lebih, perlu tenaga yang memiliki kompetensi, karenanya diperlukan kegiatan



diklat/bimtek, dll baik melalui DIPA maupun dilakukan secara swadaya satker-satker yang ada di wilayah PTA Palu guna penguatan layanan tersebut.

4. Penatausahaan bagian umum dan keuangan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan jumlah anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja maka diharapkan kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural serta pelaksana/staf di lingkungan Pengadilan Agama Banggai disarankan lebih meningkatkan kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Banggai.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridlo Allah SWT. Amin.



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Banggai
2. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai
3. Struktur Organisasi PA. Banggai
4. Susunan Pegawai Struktural, Fungsional dan Honorer PA. Banggai
5. Grafik Keadaan Perkara Pengadilan Agama Banggai
6. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Banggai
7. Pelayanan Meja Pengaduan dan Meja Pelayanan
8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Capaian SKP
9. BEZETTING
10. DUK
11. DUS



1.
**SK Tim Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2020**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : W19-A8/795/KP.04.6/11/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban kerja dalam pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim yang melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020.
2. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut pada point 1 diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
4. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi,Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan TataUsaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para Pejabat Esalon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 17 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/024/KP.04.6/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 12 November 2020 tentang Penujukan Tim Penyusun/Pembuat Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020.
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim adalah :
1. Menyiapkan data dan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020.
2. Menyusun dan membuat laporan tertulis dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkandi : Banggai
Pada Tanggal : 13 November 2020
Ketua,

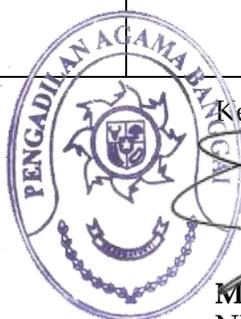
Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H
NIP. 19790209 200604 1 003

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 Nomor : W19-A8/795/KP.04.6/11/2020
 Tanggal : 13 November 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Mohammad Mahin Ridlo Afifi., S.H.I., M.H NIP. 19790209 200604 1 003	Pembina,IV/a	Ketua	Pembina
2.	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. NIP. 19790808 200704 1 001	Penata Tk.I, III/d	Wakil Ketua	Pengawas / Koordinator
3.	Syamsul Ilmi, S.H.I. NIP. 19890913 201712 1 001	Penata Muda, III/a	Hakim	Ketua
4.	Muhammad Saleh, S.H.I. NIP. 19811215 200904 1 007	Penata, III/c	Panmud Hukum	Sekretaris
5.	Dra. Aisyah NIP. 19621115 199203 2 002	Penata Tk.I, III/d	Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
6.	Muhammad Musyaffa, S.H.I NIP. 19770310 200704 1 002	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris	Penanggung jawab Kesekretariatan
7.	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I NIP. 19950409 201712 2 003	Penata Muda, III/a	Hakim	Penanggung jawab Laporan
8.	Maswati Masruni, S.H. NIP. 19800528 200312 2 004	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan	Anggota
9.	Rudi Hartono, S.H.I., M.H NIP. 19820508 200912 1 001	Penata,III/c	Panmud Permohonan	Anggota
10.	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H. NIP. 19860731 200904 2 004	Penata,III/c	Kasubag Umum Dan Keuangan	Anggota
11.	Pahlawanto, S.IP. NIP. 19821115 201504 1 001	Penata Muda, III/a	Jurusita Pengganti	Anggota
12.	Hardianto H. Samina, S.H.	-	Tenaga Kontrak Staf IT	Anggota
13.	Yudistira Mohammad, S.Kom	-	Tenaga Kontrak Petugas Meja	Anggota
14.	Andi Muh. Shiddiq, S.H.I.	-	Informasi	Anggota
15.	Lianto, S.H.	-	Tenaga Kontrak Petugas Meja I	Anggota
16.	Suplan, S.H	-	Tenaga Kontrak Staf Keuangan	Anggota
			Tenaga Kontrak Staf Kepegawaian	Anggota



Ketua,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H
 NIP. 19790209 200604 1 003



2. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai

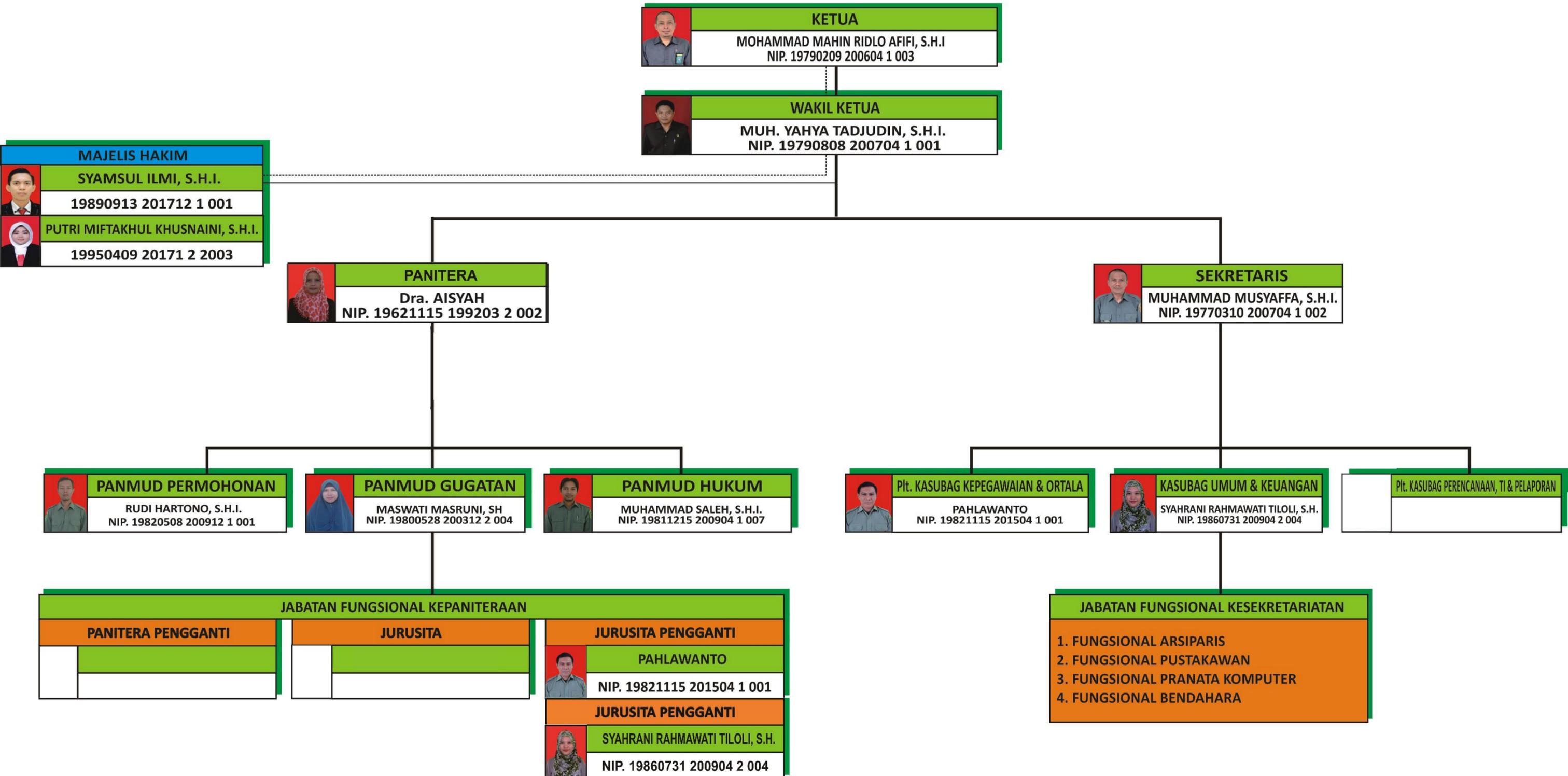




3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banggai



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II TAHUN 2020



KETERANGAN :

———— = GARIS TANGGUNG JAWAB

- - - - - = GARIS KOORDINASI



4.

Susunan Hakim, Pegawai dan Tenaga Kontrak Pengadilan Agama Banggai

HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGGAI



MOH. MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



MUHAMAD YAHYA TADJUDIN, S.H.I
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



SYAMSUL ILMI, S.H.I.
HAKIM



PUTRI MIFTAHUL KHUSNAENI, S.H.I.
HAKIM

KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI



**Drs. RUSDIN
PANITERA**



**Dra. AISYAH
WAKIL PANITERA**



**MASWATI MASRUNI, S.H
PANITERA MUDA GUGATAN**



**RUDI HARTONO, S.H.I.
PANITERA MUDA PERMOHONAN**



**MUHAMMAD SALEH, S.H.I.
PANITERA MUDA HUKUM**



**PAHLAWANTO
JURUSITA PENGGANTI**

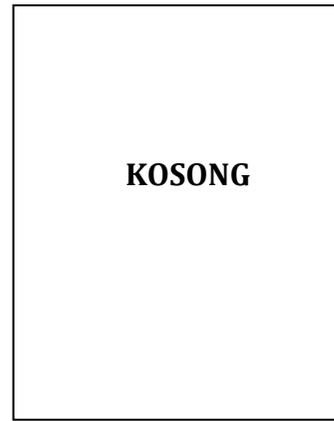
KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI



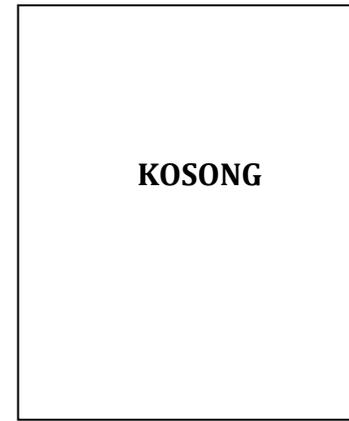
MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.
SEKRETARIS



**SYAHRANI RAHMAWATI
TIOLI, S.H.**
**KASUBAG UMUM DAN
KEUANGAN**



**KASUBAG PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN**



**KASUBAG KEPEGAWAIAN
DAN ORGANISASI TATA
LAKSANA**

PPNPN (TENAGA KONTRAK) PENGADILAN AGAMA BANGGAI



YUDISTIRA MOHAMAD, S. Kom



LIANTO, S.H.



SUPLAN, S.H.



**HARDIANTO H. SAMINA, S.H.
PRAMUBHAKTI**



**SARAH, S.H.
PRAMUBHAKTI**



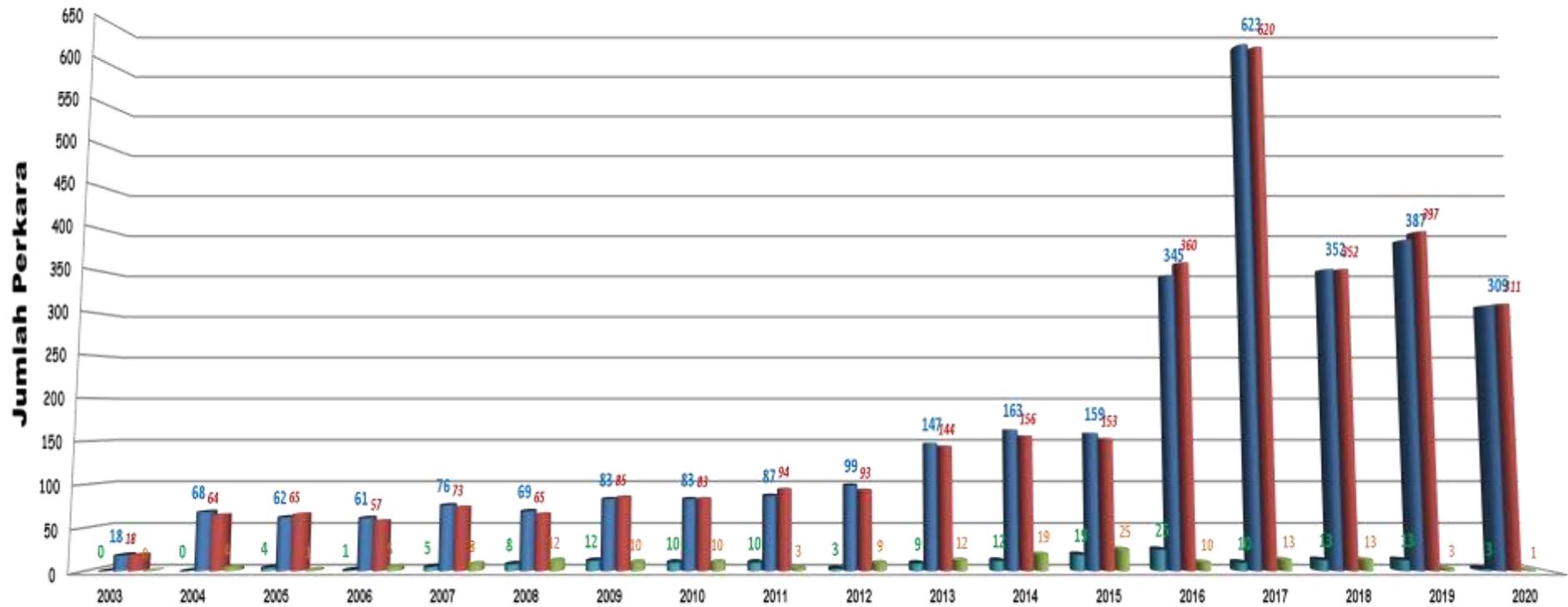
**ANDI MUHAMMAD SHIDDIQ, S.H.I.
PRAMUBHAKTI**



5. Grafik Perkara Pengadilan Agama Banggai

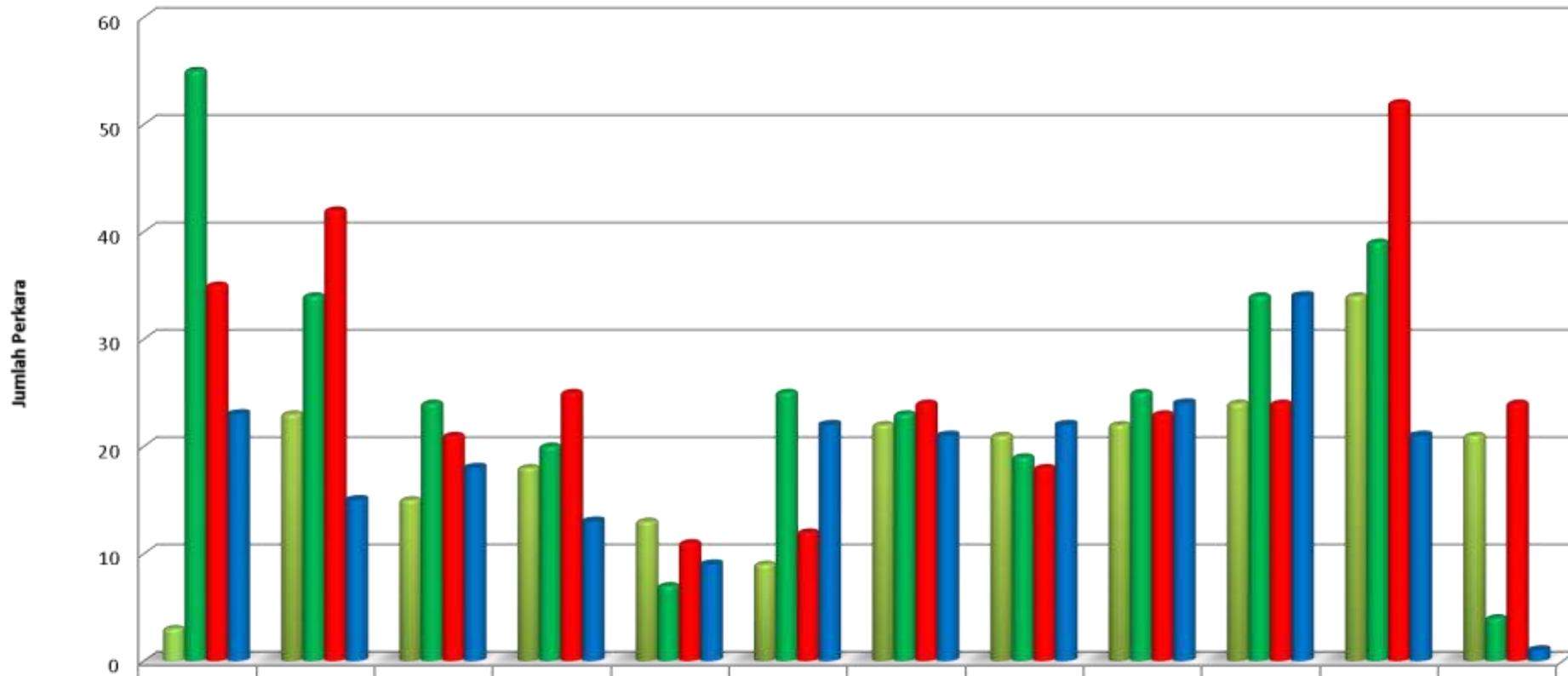


Grafik Jumlah Perkara Diterima dan Diputus
Pengadilan Agama Banggai
Tahun 2003-2020



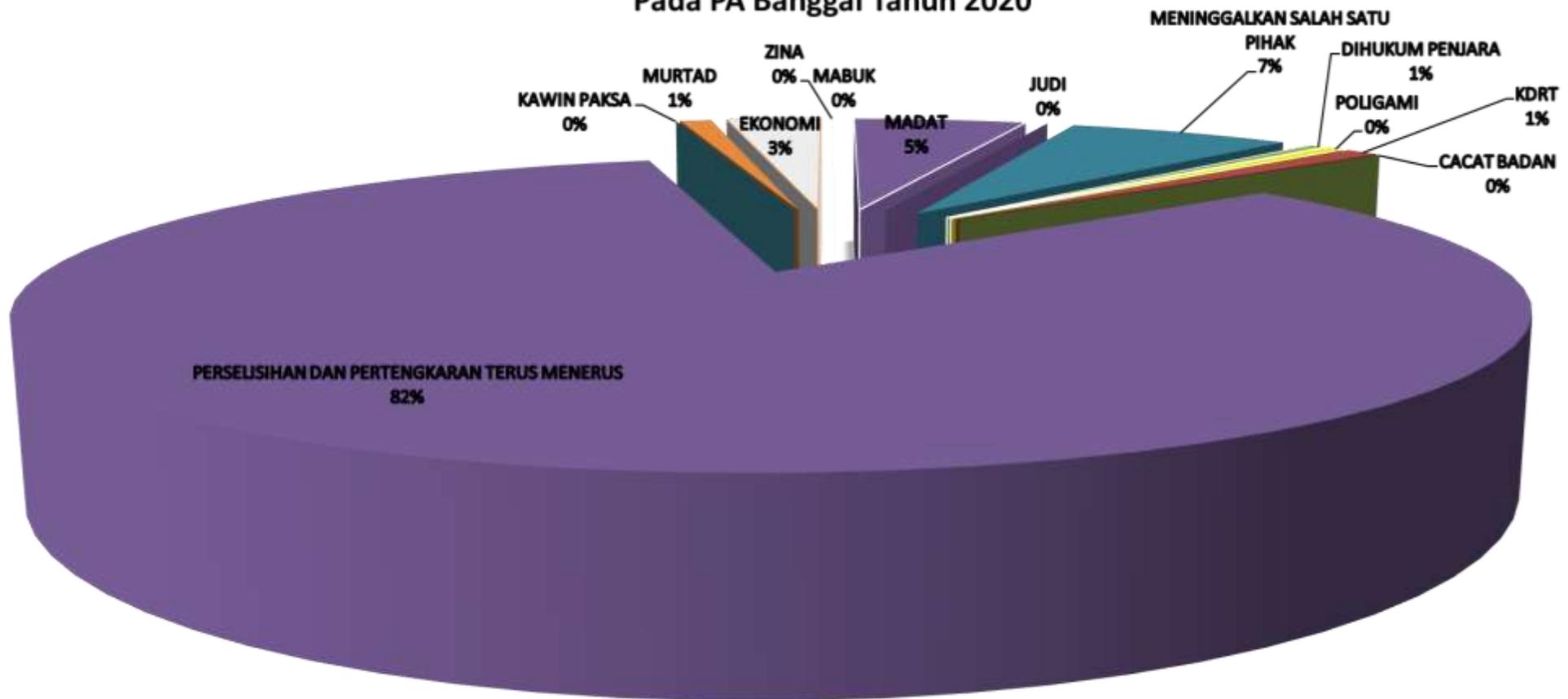
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Awal	0	0	4	1	5	8	12	10	10	3	9	12	19	25	10	13	13	3
Diterima	18	68	62	61	76	69	83	83	87	99	147	163	159	345	623	352	387	309
Diputus	18	64	65	57	73	65	85	83	94	93	144	156	153	360	620	352	397	311
Sisa Akhir	0	4	1	5	8	12	10	10	3	9	12	19	25	10	13	13	3	1

STATISTIK PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2020

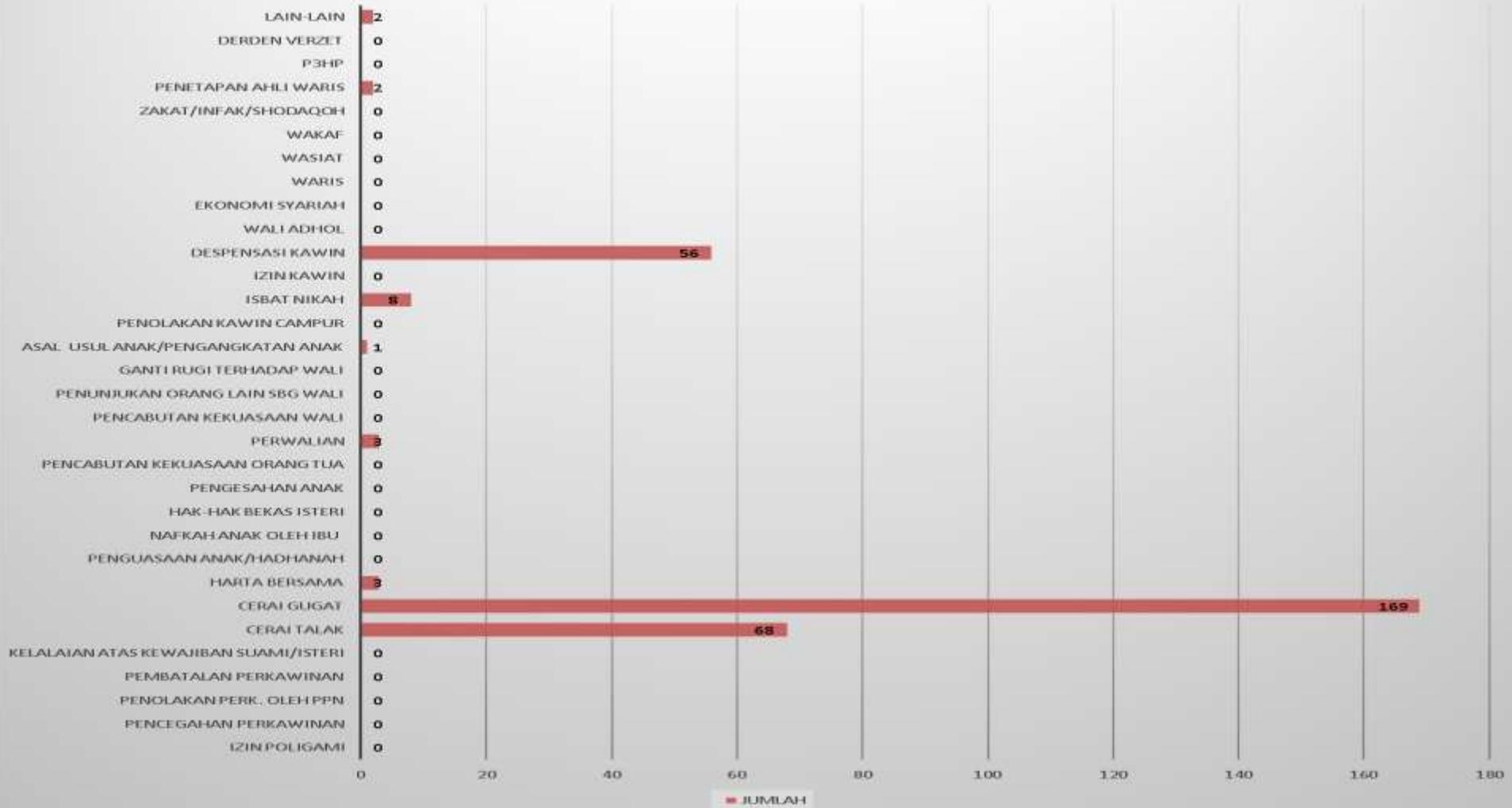


	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
SISA AWAL	3	23	15	18	13	9	22	21	22	24	34	21
DITERIMA	55	34	24	20	7	25	23	19	25	34	39	4
DIPUTUS	35	42	21	25	11	12	24	18	23	24	52	24
SISA AKHIR	23	15	18	13	9	22	21	22	24	34	21	1

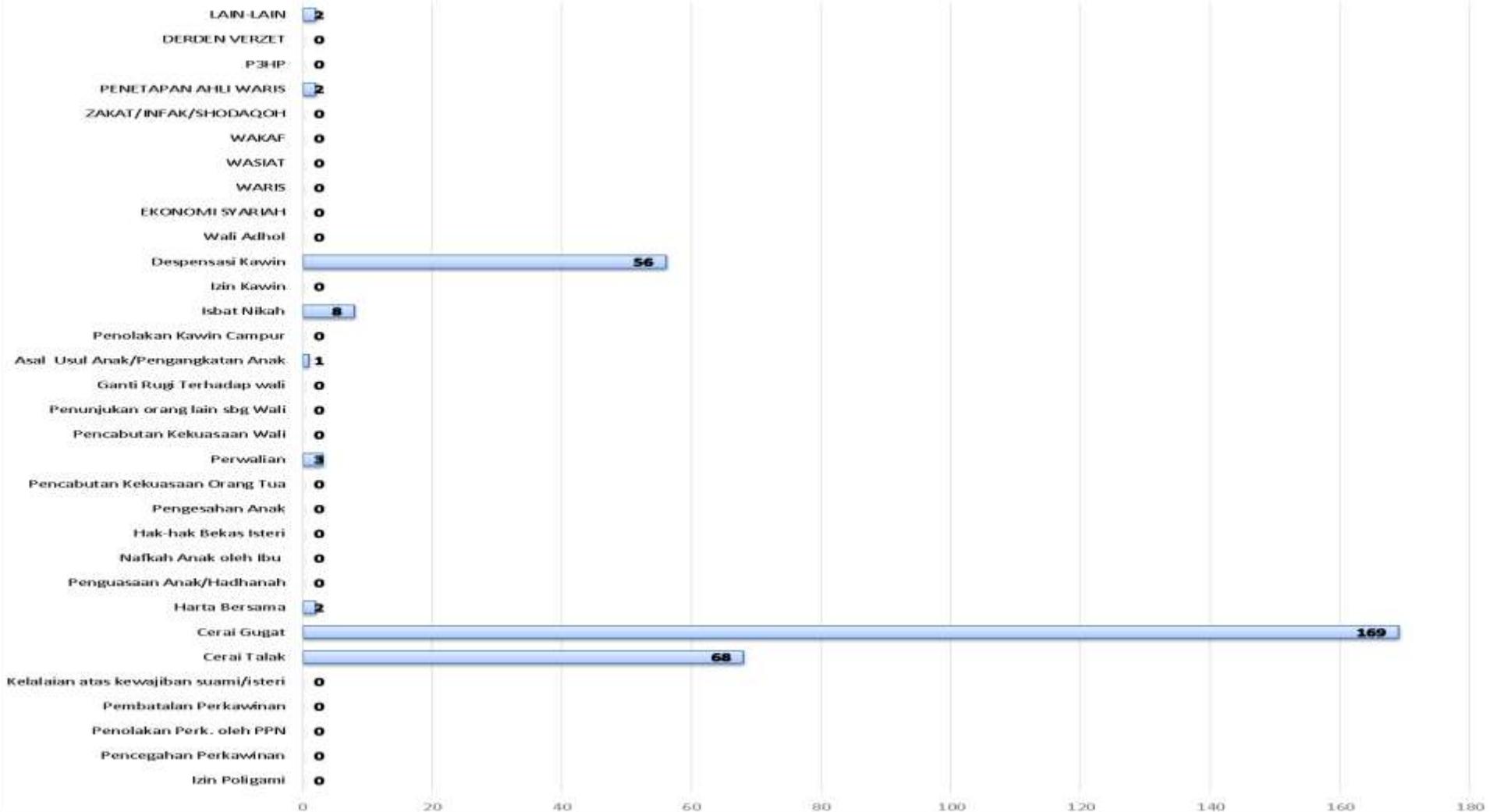
Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada PA Banggai Tahun 2020



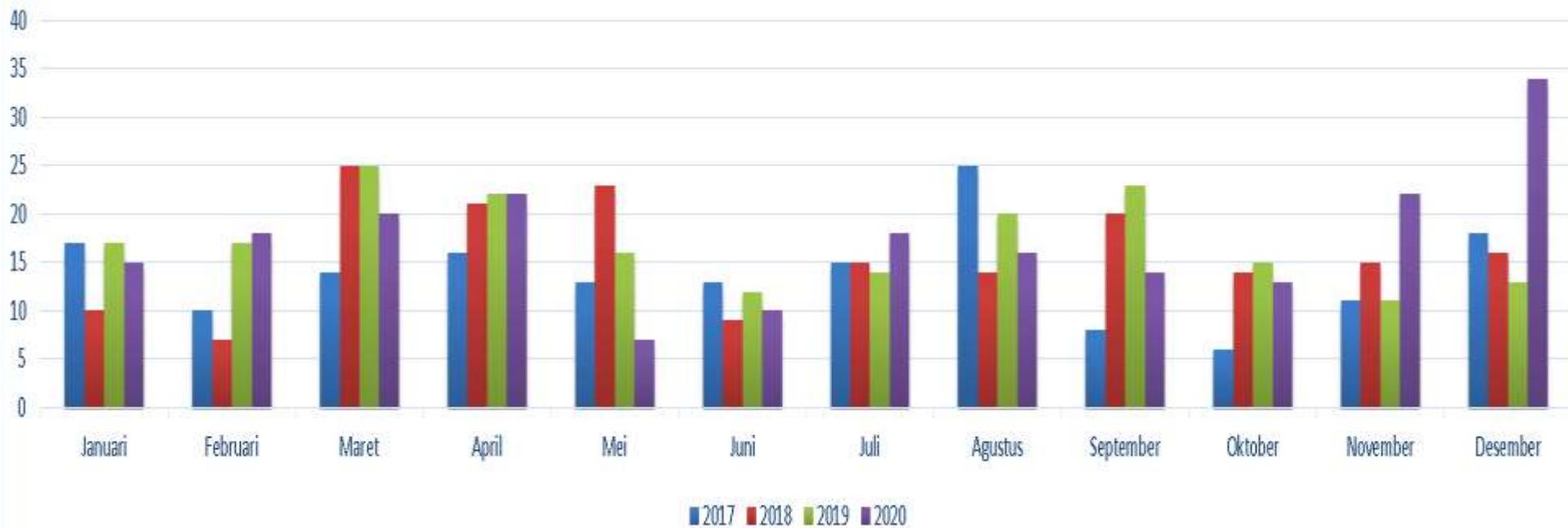
Jumlah Jenis Perkara Diterima Pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020



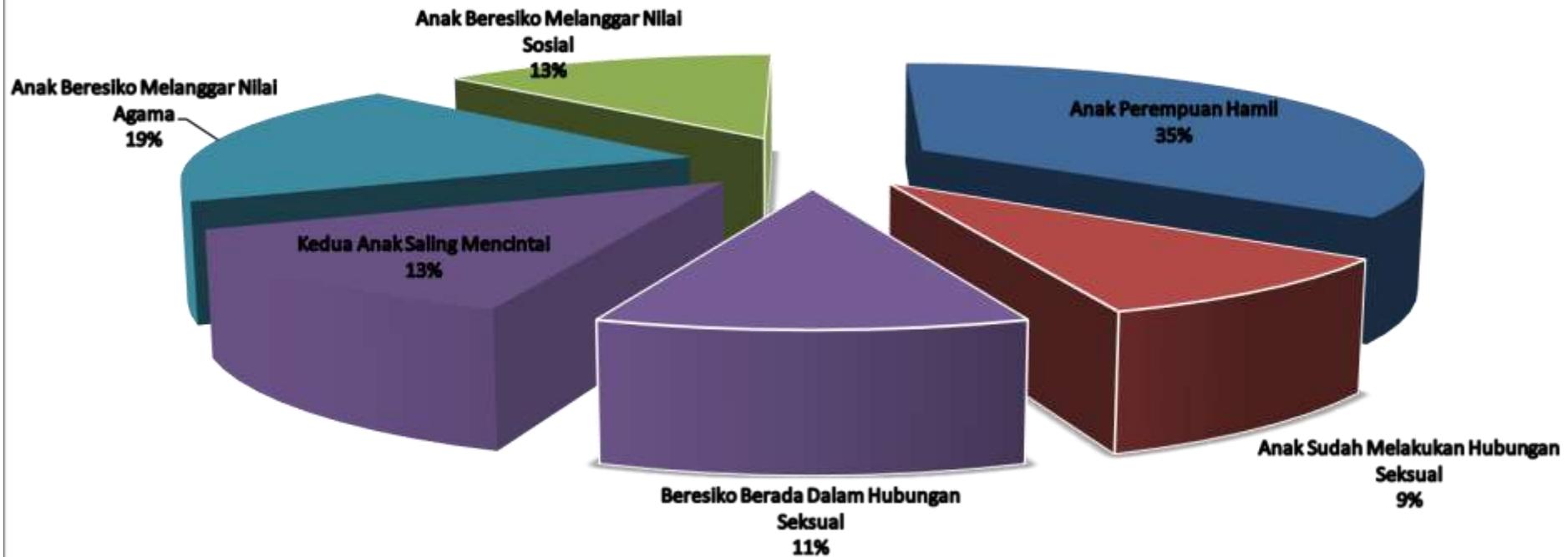
**Jumlah Jenis Perkara Diputus
Pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020**



Grafik Perbandingan Jumlah Perceraian
di Yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai
(Kab. Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut)
Tahun 2017 s.d. 2020



Grafik Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2020





6. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Banggai



**PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																										B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
1	BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Despensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan Anak																						
1	Januari	0	0	0	0	0	11	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	-
2	Februari	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	-
3	Maret	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	-
4	April	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	-	
5	Mei	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	-	
6	Juni	0	0	0	0	0	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-	
7	Juli	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	-	
8	Agustus	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-
9	September	0	0	0	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-
10	Oktober	0	0	0	0	0	7	18	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	-
11	Nopember	0	0	0	0	0	11	20	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	-
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-	
Jumlah		0	0	0	0	0	67	169	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	8	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	309			

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																																																
		Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan Anak	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN (Tidak diterima)	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan *)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
1	Januari	3	55	58	4	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	35	23	35	-
2	Februari	23	34	57	4	-	-	-	-	-	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	15	42	-		
3	Maret	15	24	39	2	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	18	21	-					
4	April	18	20	38	6	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	13	25	-					
5	Mei	13	7	20	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	9	11	-		
6	Juni	9	25	34	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	22	12	-				
7	Juli	22	23	45	-	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24	21	24	-			
8	Agustus	21	19	40	-	-	-	-	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22	18	-			
9	September	22	25	47	4	-	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	24	23	-			
10	Oktober	24	34	58	-	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	34	24	-				
11	Nopember	34	39	73	2	-	-	-	-	-	12	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	21	52	-					
12	Desember	21	4	25	2	-	-	-	-	-	7	9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	24	-					
Jumlah			309		26	0	0	0	0	0	57	153	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	8	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0	311	311	

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA BANDING YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																									B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1	2	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Penghasilan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Despensasi Kawin	Wali Adhol												
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil		
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
3	Maret	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil			
12	Desember	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
Jumlah		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-				

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA BANDING YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																																										
		Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pervallian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Despensasi kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	Ditolak	Gugur	Dicoret dari Register	JUMLAH DIPUTUS	SISA AKHIR BULAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
	Jumlah	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2020**

NO.	NOMOR PERKARA	NAMA MAJELIS HAKIM	TANGGAL			KETERANGAN
			PUTUSAN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7
1	21/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I	18/03/2020	26/03/2020	17/04/2020	-
2	166/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H. Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. Syamsul Ilmi, S.H.I.	25/11/2020	08/12/2020	-	-
3	205/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H. Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. Syamsul Ilmi, S.H.I.	25/11/2020	08/12/2020	-	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

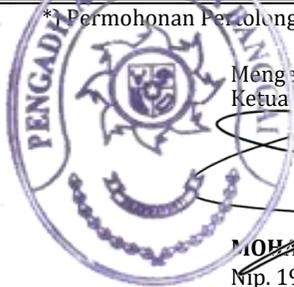
Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA KASASI YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA BULAN	A. PERKAWINAN																									KETERANGAN							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil	
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

*) Permohonan Perolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA KASASI YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA		A. PERKAWINAN																																											
	BULAN	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Despensasi Kawin	Wali Adhol	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	Ditolak	Gugur	Dicoret dari Register	JUMLAH DIPUTUS	SISA AKHIR BULAN	KETERANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil			
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil		
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil	
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil
	Jumlah	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

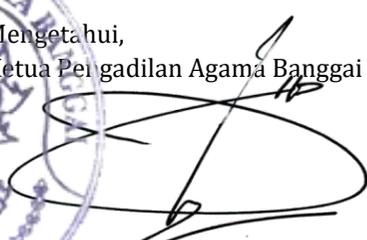
Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI
 PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 TAHUN 2020**

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL					KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PTA	PUTUSAN PA/PTA	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	NIHIL
2	-	-	-	-	-	-	NIHIL
3	-	-	-	-	-	-	NIHIL
4	-	-	-	-	-	-	NIHIL
5	-	-	-	-	-	-	NIHIL



Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Agama Banggai



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 Panitera

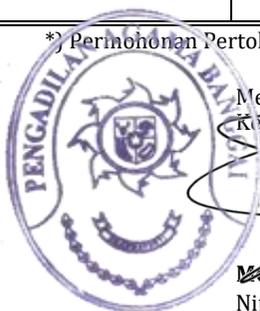


Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA BULAN	A. PERKAWINAN																							B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Nihil
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NOMOR	JENIS PERKARA	A. PERKAWINAN																																	B. EKONOMI SYARIAH	C. KEWARISAN	D. WASIAT	E. HIBAH	F. WAKAF	G. SHADAQAH	H. P3HP *)	I. LAIN-LAIN	Ditolak	Gugur	Dicoret dari Register	JUMLAH DIPUTUS	SISA AKHIR BULAN	KETERANGAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																				
1	BULAN	Sisa Bulan Lalu	Perkara yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengeshan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal Usul Anak	Penolakan kawin campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Despensasi Kawin	Wali Adhol																				
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil										
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Nihil											
	Jumlah	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-											

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

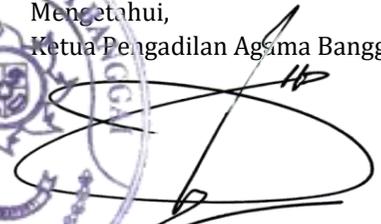
Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL					KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PTA	PUTUSAN PA/PTA/MA	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PA/PTA/MA	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	NIHIL
2	-	-	-	-	-	-	NIHIL
3	-	-	-	-	-	-	NIHIL
4	-	-	-	-	-	-	NIHIL
5	-	-	-	-	-	-	NIHIL

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003



Banggai, 30 Desember 2020
Panitera



Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL					ALASAN
		PERMOHONAN EKSEKUSI	PENETAPAN TEGURAN	SELESAI EKSEKUSI	PENETAPAN NON EKSEKUTABEL	BERGANTUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	Nihil
2		-	-	-	-	-	Nihil
3		-	-	-	-	-	Nihil
4		-	-	-	-	-	Nihil
5		-	-	-	-	-	Nihil



Mengetahui,
 Ketua Pengadilan Agama Banggai

MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 Panitera

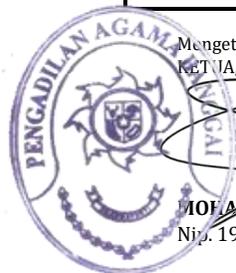


Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2020

PASAL 19 PP 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 KHI

NOMOR	Bulan	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													JUMLAH
		ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	0	0	1	0	2	0	0	1	0	10	0	1	0	15
2	Februari	0	0	3	0	2	0	1	1	0	11	0	0	0	18
3	Maret	0	0	2	0	2	1	0	0	0	13	0	0	2	20
4	April	0	0	2	0	3	0	0	0	0	17	0	0	0	22
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
6	Juni	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	10
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
8	Agustus	0	0	1	0	1	0	0	0	0	14	0	0	0	16
9	September	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14
10	Oktober	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0	1	1	13
11	Nopember	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	0	1	22
12	Desember	0	0	0	0	2	0	0	0	0	30	0	0	2	34
JUMLAH		0	0	11	0	14	1	1	2	0	171	0	2	6	208



Mengetahui :
KETUA,

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
PANITERA,

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo. PP No. 45 TAHUN 1990
 PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020

Nomor	Bulan	JENIS PERKARA						Jumlah	DIPUTUS			Jumlah	SISA			Jumlah	PERKARA YANG DIPUTUS				Keterangan	
		Izin Poligami		Cerai Talak		Cerai Gugat			Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		PENGGUGAT/ PEMOHON		TERGUGAT/ TERMOHON			
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Terima										Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Keterangan Pejabat	Tidak Ada Keterangan Pejabat		
		3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14		15	16	17	18		19
1	Januari	0	0	0	4	0	4	8	0	1	3	4	0	3	1	4	3	0	0	2	-	
2	Februari	0	0	3	2	1	1	7	0	5	2	7	0	0	0	0	5	0	0	3	-	
3	Maret	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	-	
4	April	0	0	1	1	1	3	6	0	1	2	3	0	1	2	3	2	0	0	2	-	
5	Mei	0	0	1	0	2	0	3	0	0	1	1	0	1	1	2	1	0	0	1	-	
6	Juni	0	0	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	-	
7	Juli	0	0	3	0	1	1	5	0	3	1	4	0	0	1	1	4	0	1	0	-	
8	Agustus	0	0	0	1	1	4	6	0	0	2	2	0	1	3	4	1	0	0	2	-	
9	September	0	0	1	0	3	4	8	0	0	3	3	0	1	4	5	1	0	0	3	-	
10	Oktober	0	0	1	3	4	1	9	0	0	4	4	0	4	1	5	4	0	0	3	-	
11	Nopember	0	0	4	2	1	1	8	0	4	1	5	0	2	1	3	5	0	0	1	-	
12	Desember	0	0	2	0	1	0	3	0	2	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	-	
JUMLAH												36										



Mengetahui :
 KETUA,

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 PANITERA,

Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	BULAN	KEADAAN PERKARA				KETERANGAN
		MASUK	PUTUS	BANDING	KASASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	55	35	-	-	Sisa Perkara tahun 2019 3
2	Februari	34	42	-	-	Perkara Masuk Tahun 2020 309
3	Maret	24	21	1	-	Jumlah 312
4	April	20	25	-	-	Perkara Putus Tahun 2020 311
5	Mei	7	11	-	-	Sisa Perkara Tahun 2020 1
6	Juni	25	12	-	-	
7	Juli	23	24	-	-	
8	Agustus	19	18	-	-	
9	September	25	23	-	-	
10	Oktober	34	24	-	-	
11	Nopember	39	52	-	-	
12	Desember	4	24	2	-	
Jumlah		309	311	3	-	



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	SATKER	PERKARA						JUMLAH HAKIM	KETERANGAN
		PIDANA			PERDATA				
		MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sisa Bulan Lalu	-	-	-	-	-	13	4	-
1	Januari	-	-	-	55	35	23	4	-
2	Februari	-	-	-	34	42	15	4	-
3	Maret	-	-	-	24	21	18	4	-
4	April	-	-	-	20	25	13	4	-
5	Mei	-	-	-	7	11	9	4	-
6	Juni	-	-	-	25	12	22	4	-
7	Juli	-	-	-	23	24	21	4	-
8	Agustus	-	-	-	19	18	22	4	-
9	September	-	-	-	25	23	24	4	-
10	Oktober	-	-	-	34	24	34	4	-
11	Nopember	-	-	-	39	52	21	4	-
12	Desember	-	-	-	4	24	1	4	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	SATKER	PERKARA						JUMLAH PANITERA	KETERANGAN
		PIDANA			PERDATA				
		MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadilan Agama Banggai	-	-	-	311	311	0	4	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA YANG DITANGANI HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

No	Nama Hakim	Jan		Peb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt		Nop		Des		Jumlah		Total	
		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P				
1	Drs. H. Masngaril Krom, S.H., M.H.E.S.	20	5	8	3	14	4	7	2	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	15	70
2	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.	3	2	8	8	1	0	7	2	3	1	17	2	22	4	14	0	8	0	22	4	35	1	0	0	140	24	164	
3	Muhammad Yahya Tadjudin, S.H.I.	30	2	7	6	11	0	11	2	1	1	29	1	28	2	24	5	32	2	28	3	43	2	0	0	244	26	270	
4	Syamsul Ilmi, S.H.I.	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	19	1	29	2	21	4	33	2	38	4	51	7	0	4	196	25	221	
5	Purni Miftakhul Khusnaini, S.H.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	10	1	32	0	26	3	24	1	0	0	110	5	115	



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

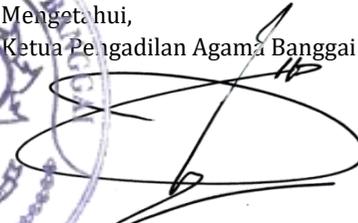
Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN EVALUASI PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	BULAN	PERKARA PERDATA						KETERANGAN
		JUMLAH		PUTUS		BELUM PUTUS		
		PERKARA	PUTUS	< 5	> 5	< 5	> 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	55	35	35	-	-	-	-
2	Februari	34	42	42	-	-	-	-
3	Maret	24	21	21	-	-	-	-
4	April	20	25	25	-	-	-	-
5	Mei	7	11	11	-	-	-	-
6	Juni	25	12	12	-	-	-	-
7	Juli	23	24	24	-	-	-	-
8	Agustus	19	18	18	-	-	-	-
9	September	25	23	23	-	-	-	-
10	Oktober	34	24	24	-	-	-	-
11	November	39	52	52	-	-	-	-
12	Desember	4	24	24	-	1	-	-
Jumlah			311	311	0	1	0	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera



Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN PERKARA PRODEO
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	NAMA PARA PIHAK		NOMOR PERKARA	MAJELIS HAKIM/ HAKIM TUNGGAL	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN/ PENETAPAN	NOMOR AKTA CERAI	KET.
	PEMOHON I / PENGGUGAT	PEMOHON II / TERGUGAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lilis Suriani binti Muslimin Muis	Said Hudrin bin Hudrin Salomo	17/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.	Drs. Rusdin	13/01/2020	14/AC/2020/PA.Bgi	-
2	Asrina Uweng binti Uweng	Judin P. Sugiono bin Palar Sugiono	18/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I	Dra. Aisyah	22/01/2020	-	Cabut
3	Hartini binti Rudin B. Atagaf	Ali Lazilu bin Lazilu	35/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I	Dra. Aisyah	12/02/2020	-	Cabut
4	Putry binti Naspin Abidu tuding	Moh. Aldi bin Niko Laus Ute	55/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.	Dra. Aisyah	11/02/2020	31/AC/2020/PA.Bgi	-
5	Wirda A. Adjmain alias Wirda Adjmain binti Ahona	Haeruddin bin Lahasadi	63/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.	Dra. Aisyah	01/04/2020	-	Cabut
6	Villani Habibu binti Nagasari	Moh. Chiko Apriawan bin Kisman	106/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.	Muhammad Saleh, S.H.I.	19/05/2020	85/AC/2020/PA.Bgi	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera


Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

**LAPORAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN UANG IWADL
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

NO	BULAN	PENERIMAAN			PENGELUARAN			KETERANGAN
		TANGGAL	NOMOR PUTUSAN	JUMLAH	TANGGAL	DIBERIKAN KEPADA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	29-01-2020	28/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	31-01-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
		29-01-2020	29/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	31-01-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	17-03-2020	60/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	31-03-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
4	April	09-04-2020	81/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	30-04-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	15-07-2020	73/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	30-07-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	07-10-2020	123/Pdt.G/2020/PA.Bgi	Rp 10.000	27-10-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	02-12-2020	230/Pdt.G/2020/PA Bgi	Rp 10.000	30-12-2020	BKM Pusat	Rp 10.000	-
JUMLAH				Rp 70.000			Rp 70.000	



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
Nip. 18790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera

Dra. AISYAH
Nip. 19621115.199203.2.002

LAPORAN PELAYANAN TERPADU
 PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020

NO	BULAN	WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN	PERKARA ITSBAT NIKAH YANG DISIDANGKAN			PENGUNAAN ANGGARAN	PENGUNAAN ANGGARAN			NAMA		PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
			KABUL	TIDAK TERIMA	CABUT		PENETAPAN (PA)	BUKU NIKAH (KUA)	AKTA KELAHIRAN (DUKCAPIL)	HAKIM	PANITERA/PP	
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MENGETAHUI :
 KETUA,

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 PANITERA,

Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002

**REKAPITULASI PENERIMAAN HAK-HAK KEPANITERAAN (HHK)
 PADA WILAYAH PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020**

RK 11a

NO	BULAN	HAK-HAK KEPANITERAAN		
		PENDAFTARAN TINGKAT PERTAMA	PENDAFTARAN TINGKAT BANDING	PENDAFTARAN TINGKAT KASASI
1	2	3	4	5
1	JANUARI	Rp. 1.650.000,-	Rp -	Rp -
2	FEBRUARI	Rp. 1.020.000,-	Rp -	Rp -
3	MARET	Rp. 720.000,-	Rp. 50.000,-	Rp -
4	APRIL	Rp. 600.000,-	Rp -	Rp -
5	MEI	Rp. 210.000,-	Rp -	Rp -
6	JUNI	Rp. 750.000,-	Rp -	Rp -
7	JULI	Rp. 690.000,-	Rp -	Rp -
8	AGUSTUS	Rp. 570.000,-	Rp -	Rp -
9	SEPTEMBER	Rp. 750.000,-	Rp -	Rp -
10	OKTOBER	Rp. 1.020.000,-	Rp -	Rp -
11	NOPEMBER	Rp. 1.170.000,-	Rp -	Rp -
12	DESEMBER	Rp. 120.000,-	Rp. 100.000,-	Rp -
JUMLAH		Rp. 9.270.000,-	Rp. 150.000,-	Rp -

MENGETAHUI
 KETUA



M. MUHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 Panitera



Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002

REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL)
 PADA WILAYAH PENGADILAN AGAMA BANGGAI
 BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020

NO	Bulan	HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL)																		
		Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	Hak Bedaksi	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenal surat-surat yang tersimpan kepaniteraan	Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Pembuatan Akta dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita turunan	Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Penyimpanan dan Penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon	Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon	Relaas Pemberitahuan Kepada Tergugat/Termohon	Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Cerai	Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Biaya Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	Pengesahan Surat dibawah tangan	Uang Leges	Pengembalian Sisa Panjar	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Januari	Rp. 138.000,-	Rp. 330.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 500.000,-	Rp. 490.000,-	Rp. -	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 500.000,-	Rp. -	Rp. 2.458.000,-
2	Februari	Rp. 111.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 380.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. -	Rp. 210.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. 320.000,-	Rp. -	Rp. 1.821.000,-
3	Maret	Rp. -	Rp. 210.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 260.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. -	Rp. 120.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. 1.030.000,-
4	April	Rp. -	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 210.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. -	Rp. 190.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 200.000,-	Rp. -	Rp. 1.010.000,-
5	Mei	Rp. 174.500,-	Rp. 100.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 70.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -	Rp. 80.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp. -	Rp. 1.084.500,-
6	Juni	Rp. -	Rp. 120.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 110.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. -	Rp. 50.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 100.000,-	Rp. -	Rp. 600.000,-
7	Juli	Rp. -	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 260.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. -	Rp. 170.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. 1.110.000,-
8	Agustus	Rp. 159.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 230.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. -	Rp. 110.000,-	Rp. 590.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 190.000,-	Rp. -	Rp. 1.579.000,-
9	September	Rp. -	Rp. 230.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 260.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. -	Rp. 80.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 250.000,-	Rp. -	Rp. 1.050.000,-
10	Oktober	Rp. 500,-	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 380.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. -	Rp. 160.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. 1.080.500,-
11	November	Rp. 393.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. -	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 390.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. -	Rp. 330.000,-	Rp. 970.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. 390.000,-	Rp. -	Rp. 3.363.000,-
12	Desember	Rp. 206.500,-	Rp. 240.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. 130.000,-	Rp. 410.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp. -	Rp. 1.116.500,-
Jumlah		Rp. 1.182.500,-	Rp. 3.060.000,-	Rp. -	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 3.110.000,-	Rp. 2.420.000,-	Rp. -	Rp. 1.830.000,-	Rp. 3.050.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. -	Rp. 2.560.000,-	Rp. -	Rp. 17.302.500,-

Mengetahui :
 KETUA

 MOH. AHMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H.
 Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
 PANITERA,

 Dra. AISYAH
 Nip. 19621115.199203.2.002



7.

Laporan Meja Informasi dan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Banggai



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kec. Banggai Tengah, Telp. (0462) 21544
BANGGAI LAUT - 94791

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN MEJA INFORMASI

Periode : Januari – Desember Tahun 2020

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN MEJA INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

- a. Gedung Pengadilan Agama Banggai, luas tanah 40 X 50 M, luas bangunan 625 M2.
- b. Meja Informasi dengan 1 buah komputer di Meja Informasi yang terhubung dengan SIPP dan Internet, SK Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/690/HM.02.3/11/2020 dan SK Dirjen Badilag MARI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

2. Sumber Daya Manusia

Tim Pengelola Meja Informasi yang terdiri dari :

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	MOH. MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dra. AISYAH	Panitera
Petugas Informasi	Rudi Hartono, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Permohonan
Penanggungjawab Informasi	1. Maswati Masruni, S.H.	Panitera Muda Gugatan
	2. Muhammad Saleh, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
	3. Syharani Rahmawati Tiloli, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan

3. Anggaran

Nihil

B. DATA PELAYANAN MEJA INFORMASI

JENIS INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	KETERANGAN
Perkara dan Putusan	3	3	0	-
Pengawasan dan Hukuman	0	0	0	-
Anggaran dan Aset	1	1	0	-
Lainnya	1	1	0	-
Total	5	5	0	-



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

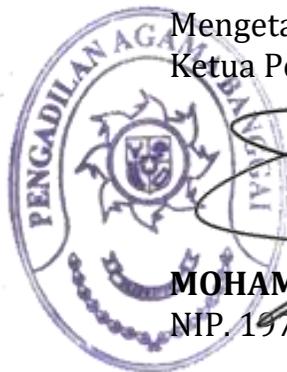
MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
NIP. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera Pengadilan Agama Banggai

Dra. AISYAH
NIP. 19621115.199203.2.002

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN PENGADUAN
TAHUN 2020

NO.	REKAPITULASI	JUMLAH
1.	Jumlah Pengaduan yang diterima	Nihil
2.	Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding	Nihil
3.	Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawasan MA RI	Nihil
4.	Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani	Nihil
5.	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Pengadilan Tk. Banding	Nihil
6.	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada Badan Pengawasan MA-RI	Nihil



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I., M.H
NIP. 19790209.200604.1.003

Banggai, 30 Desember 2020
Panitera Pengadilan Agama Banggai

Dra. AISYAH
NIP. 19621115.199203.2.002



8. SKP Pegawai Pengadilan Agama Banggai



DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
b. NIP	: 19591231.198603.1.051
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama, IV/e
d. Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
e. Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Agama Palu
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H
b. NIP.	: 19630313.198902.1.021
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama, IV/e
d. Jabatan	: Dirjen Badan Peradilan Agama
e. Unit Kerja	: Badan Peradilan Agama



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
27 Agustus s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H**
NIP : 19790209.200604.1.003
Pangkat Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua / Hakim Madya Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
1	Nama	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.	1	Nama	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H				
2	NIP	19670202.199203.1.006	2	NIP	19790209.200604.1.003				
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk. I, III/d				
4	Jabatan	Ketua / Hakim Madya Pratama	4	Jabatan	Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET					
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
TUGAS POKOK									
1	Memeriksa dan Mengawasi Pembuatan RKT		0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Memeriksa dan Mengawasi Pembuatan SOP		0	20	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Memeriksa dan Mengawasi Pembuatan LAKIP		0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Memeriksa dan Mengawasi Pembuatan LAPTAH		0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Menunjuk Hakim Mediator		0	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Membuat PHS		0	18	Dokumen	100	12	Bulan	-
7	Menyidangkan Perkara		0	84	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Mengoreksi Berita Acara Persidangan		0	84	Berkas	100	12	Bulan	-
9	Menandatangani Berita Acara Persidangan		0	84	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara		0	84	Dokumen	100	12	Bulan	-
11	Membuat Konsep Putusan		0	84	Dokumen	100	12	Bulan	-
12	Menandatangani Putusan		0	84	Laporan	100	12	Bulan	-
13	Meminutasi Berkas Perkara		0	84	Dokumen	100	12	Bulan	-
14	Melakukan Evaluasi dan Melaporkan Hasil Pengawasan		0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-
15	Melakukan Rapat BAPERJAKAT		0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-
16	Membuat Laporan Kegiatan Hakim		0	4	Dokumen	100	12	Bulan	-
17	Mengontrol Data Perkara pada Aplikasi SIPP		0	6	Kegiatan	100	12	Bulan	-
18	Menganonim Putusan		0	42	Dokumen	100	12	Bulan	-
19	Membantu Ketua Pengadilan Agama dan Pimpinan Rapat		0	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-
20	Menandatangani, Mengoreksi, Memeriksa Absen Pegawai dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Serta Penerapan Disiplin Pegawai		0	6	Dokumen	100	12	Bulan	-



Pejabat Penilai,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.
Nip. 19670202.199203.1.006

Banggai, 02 Januari 2020

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
Nip. 19790209.200604.1.003

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H	1	Nama	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
2	NIP	19591231.198603.1.051	2	NIP	19790209.200604.1.003			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama, IV/e	3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a			
4	Jabatan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu	4	Jabatan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
5	Unit Kerja	Pengadilan Tinggi Agama Palu	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT		KUAL/M	WAKTU		BIAYA
TUGAS POKOK								
1	Menunjuk Hakim Mediator	0	2	Dokumen	100	4	Bulan	-
2	Membuat Menentukan PMH	0	30	Dokumen	100	4	Bulan	
3	Mempelajari berkas perkara	0	300	Dokumen	100	4	Bulan	-
4	Membuat PHS	0	300	Dokumen	100	4	Bulan	-
5	Menyidangkan perkara	0	100	Dokumen	100	4	Bulan	-
6	Melaksanakan Sidang Keliling	0	300	Kegiatan	100	4	Bulan	-
7	Mengoreksi berita acara sidang	0	30	Dokumen	100	4	Bulan	-
8	Menandatangani Berita Acara Sidang	0	300	Dokumen	100	4	Bulan	-
9	Membuat dan Mengoreksi Putusan	0	300	Dokumen	100	4	Bulan	-
10	Menandatangani Putusan	0	100	Dokumen	100	4	Bulan	-
11	Meminutasi Berkas Perkara	0	100	Dokumen	100	4	Bulan	-
12	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pengawasan Hakim	0	100	Dokumen	100	4	Bulan	-
13	Menindaklanjuti Laporan atas Hasil Pengawasan Hakim	0	4	Kegiatan	100	4	Bulan	-
14	Membuat Surat Izin Kuasa Insidentif	0	4	Surat	100	4	Bulan	-
15	Memeriksa dan Menutup secara Insidentil BIKP	0	5	Dokumen	100	4	Bulan	-
16	Memeriksa dan menandatangani laporan perkara	0	12	Dokumen	100	4	Bulan	-
17	Mengevaluasi pelaksanaan SOP	0	12	Dokumen	100	4	Bulan	-
18	Melakukan Rapat	0	12	Kegiatan	100	4	Bulan	-
19	Menandatangani RENSTRA , RKT, (renja) dan Program kerja	0	12	Dokumen	100	4	Bulan	-
20	Menandatangani SK yang berhubungan dengan naskah kepegawaian	0	12	Dokumen	100	4	Bulan	-
21	Mendisposisi Surat Masuk	0	24	Surat	100	4	Bulan	-

22	Mengoreksi surat keluar	0	73	Surat	100	4	Bulan	-
23	Menandatangani surat-surat	0	1	Surat	100	4	Bulan	-
24	Menandatangani Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	0	60	Dokumen	100	4	Bulan	-
25	Menandatangani Dokumen SAKIP	0	70	Dokumen	100	4	Bulan	
26	Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai	0	10	Dokumen	100	4	Bulan	
Tugas Tambahan								
1	Konsultasi Kantor Bupati Banggai Laut Untuk Pengadaan Tanah Perkantoran	0	1	Kegiatan	100	4	Bulan	

Banggai, 28 Agustus 2020

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
NIP. 19591231.198603.1.051


Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H
NIP. 19790209.200604.1.003

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
27 Agustus s/d 31 Desember 2020

Nama : Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
NIP : 19790209.200604.1.003

NO.	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP		
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Menunjuk Hakim Mediator	0	$\frac{1}{27}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	27	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
2	Membuat Menentukan PMH	0	$\frac{20}{131}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	131	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
3	Mempelajari berkas perkara	0	$\frac{1}{113}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
4	Membuat PHS	0	$\frac{1}{113}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
5	Menyidangkan perkara	0	$\frac{10}{113}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
6	Melaksanakan Sidang Keliling	0	$\frac{18}{8}$ Kegiatan	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	8	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
7	Mengoreksi berita acara sidang	0	$\frac{84}{300}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	300	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
8	Menandatangani Berita Acara Sidang	0	$\frac{84}{300}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	300	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
9	Membuat dan Mengoreksi Putusan	0	$\frac{84}{113}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
10	Menandatangani Putusan	0	$\frac{84}{113}$ Surat	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Surat	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
11	Meminutasi Berkas Perkara	0	$\frac{84}{113}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	113	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
12	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Pengawasan Hakim	0	$\frac{84}{4}$ Kegiatan	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	4	Kegiatan	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
13	Menindaklanjuti Laporan atas Hasil Pengawasan Hakim	0	$\frac{84}{4}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	4	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
14	Membuat Surat Izin Kuasa Insidentif	0	$\frac{4}{1}$ Surat	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	1	Surat	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
15	Memeriksa dan Menutup secara Insidentil BIKP	0	$\frac{2}{12}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	12	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
16	Memeriksa dan menandatangani laporan perkara	0	$\frac{4}{12}$ Dokumen	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	12	Dokumen	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
17	Mengevaluasi pelaksanaan SOP	0	$\frac{6}{24}$ Kegiatan	100	$\frac{12}{4}$ Bulan	Rp -	0	24	Kegiatan	98	4	Bulan	-	274,00	91,33

18	Melakukan Rapat	0	42 12	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	12	Kegiatan	99	4	Bulan	-	270,24	90,08
19	Menandatangani RENSTRA , RKT, (renja) dan Program kerja	0	10 1	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
20	Menandatangani SK yang berhubungan dengan naskah kepegawaian	0	6 60	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	60	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
21	Mendisposisi Surat Masuk	0	24	Surat	100	4	Bulan	Rp -	0	24	Surat	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
22	Mengoreksi surat keluar	0	73	Surat	100	4	Bulan	Rp -	0	73	Surat	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
23	Menandatangani surat-surat	0	1	Surat	100	4	Bulan	Rp -	0	1	Surat	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
24	Menandatangani Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (L	0	60	Dokumen	100	4	Bulan	Rp -	0	60	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
25	Menandatangani Dokumen SAKIP	0	70	Dokumen	100	4	Bulan	Rp -	0	70	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
26	Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai	0	10	Dokumen	100	4	Bulan	Rp -	0	11	Dokumen	99	4	Bulan	-	285,00	95,00
1	Konsultasi Kantor Bupati Banggai Laut Untuk Pengadaan Tanah Perkantoran	0	1	Kegiatan	100	4	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	98	4	Bulan	-	274,00	91,33
Nilai Capaian SKP																	91,57
																	(Sangat Baik)

Banggai, 30 Desember 2020
Pejabat Penilai,

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
NIP. 19591231.198603.1.051

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H

NIP : 19790209.200604.1.003

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Penilai	Pejabat																																	
1	2	3	4																																		
1	27 Agustus s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = $83,67+91,57/2$ 87,62 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Orientasi Pelayanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">85,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(Baik)</td> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle; padding-left: 10px;"> <p>Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu</p> <p><u>Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H</u> Nip. 19591231.198603.1.051</p> </td> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">86,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Komitmen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">85,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Disiplin</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">87,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">86,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kepemimpinan</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">87,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">516,00</td> <td style="text-align: center;">(Sangat Baik)</td> </tr> <tr> <td>Nilai Rata-rata</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">86,00</td> <td style="text-align: center;">(Baik)</td> </tr> </table>	Orientasi Pelayanan	=	85,00	(Baik)	<p>Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu</p> <p><u>Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H</u> Nip. 19591231.198603.1.051</p>	Integritas	=	86,00	(Baik)	Komitmen	=	85,00	(Baik)	Disiplin	=	87,00	(Baik)	Kerjasama	=	86,00	(Baik)	Kepemimpinan	=	87,00	(Baik)	Jumlah	=	516,00	(Sangat Baik)	Nilai Rata-rata	=	86,00	(Baik)		
Orientasi Pelayanan	=	85,00	(Baik)	<p>Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu</p> <p><u>Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H</u> Nip. 19591231.198603.1.051</p>																																	
Integritas	=	86,00	(Baik)																																		
Komitmen	=	85,00	(Baik)																																		
Disiplin	=	87,00	(Baik)																																		
Kerjasama	=	86,00	(Baik)																																		
Kepemimpinan	=	87,00	(Baik)																																		
Jumlah	=	516,00	(Sangat Baik)																																		
Nilai Rata-rata	=	86,00	(Baik)																																		



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

JANGKA WAKTU PENILAIAN
27 Agustus s/d 31 Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H			
	b. NIP	19591231.198603.1.051			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama, IV/e			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Tinggi Agama Palu			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H			
	b. NIP	19630313.198902.1.021			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama, IV/e			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Dirjen Badan Peradilan Agama			
	e. Unit Organisasi	Badan Peradilan Agama			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 87,62 X 60%			52,57	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	85,00	(Baik)	
		2. Integritas	86,00	(Baik)	
		3. Komitmen	85,00	(Baik)	
		4 Disiplin	87,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	86,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	87,00	(Baik)	
		Jumlah	516,00	(Baik)	
		Nilai Rata-rata	86,00	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja 86,00 X 40%			34,40		
Nilai Prestasi Kerja			86,97 (Baik)		

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN

Tanggal

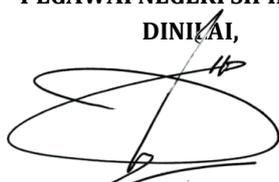
8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

Nip. 19591231.198603.1.051

10. DITERIMA TANGGAL, 06 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI,



Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H

Nip. 19790209.200604.1.003

11. DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H

Nip. 19630313.198902.1.021

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I
b. NIP	: 19790808.200704.1.001
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk. I, III/d
d. Jabatan	: Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
b. NIP	: 19591231.198603.1.051
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama, IV/e
d. Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
e. Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Agama Palu



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
03 Agustus s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I**
NIP : 19790808.200704.1.001
Pangkat Golongan Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.	1	Nama	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I			
2	NIP	19670202.199203.1.006	2	NIP	19790808.200704.1.001			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk.I, III/d			
4	Jabatan	Ketua / Hakim Madya Pratama	4	Jabatan	Hakim Pratama Utama			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
TUGAS POKOK								
1	Membuat Gugatan/Permohonan untuk buta huruf	0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Mempelajari Berkas Perkara	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara	0	360	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Mengoreksi Berita Acara Sidang	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Melakukan Musyawarah Majelis	0	180	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Membuat Konsep Putusan/Penetapan	0	180	Naskah	100	12	Bulan	-
7	Menandatangani Putusan/Penetapan	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Memeriksa berkas Perkara yang akan Diminutasi	0	180	Berkas	100	12	Bulan	-
9	Menganonim Putusan	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Melakukan Tugas sebagai Mediator	0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
11	Membuat Laporan Hasil Mediasi	0	10	Dokumen	100	12	Bulan	-
12	Mencatat Laporan Kegiatan Hakim (Buku Agenda Sidang Hakim)	0	40	Laporan	100	12	Bulan	-
13	Melakukan Pengawasan (HAWASBID)	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-
14	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Triwulan	0	4	Dokumen	100	12	Bulan	-
15	Membuat Instrumen dalam Persidangan	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
16	Menandatangani PHS	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	-
17	Melakukan sidang di luar Gedung	0	14	Kegiatan	100	12	Bulan	-
18	Melaksanakan isbath terpadu	0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-



Pejabat Penilai,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.

Nip. 19670202.199203.1.006

Banggai, 02 Januari 2020
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I

Nip. 19790808.200704.1.001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31 Juli 2020

Nama : Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I
NIP : 19790808.200704.1.001

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Membuat Gugatan/Permohonan untuk buta huruf	0	1	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	0	Dokumen	95	8	Bulan	-	204,33	68,11
2	Mempelajari Berkas Perkara	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Dokumen	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
3	Menyidangkan Perkara	0	360	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	300	Kegiatan	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
4	Mengoreksi Berita Acara Sidang	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Dokumen	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
5	Melakukan Musyawarah Majelis	0	180	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Kegiatan	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
6	Membuat Konsep Putusan/Penetapan	0	180	Naskah	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Naskah	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
7	Menandatangani Putusan/Penetapan	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Dokumen	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
8	Memeriksa berkas Perkara yang akan Diminutasi	0	180	Berkas	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Berkas	95	8	Bulan	-	287,67	95,89
9	Menganonim Putusan	0	50	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	40	Dokumen	96	8	Bulan	-	285,33	95,11
10	Melakukan Tugas sebagai Mediator	0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	8	Kegiatan	96	8	Bulan	-	245,33	81,78
11	Membuat Laporan Hasil Mediasi	0	10	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	4	Dokumen	96	8	Bulan	-	245,33	81,78

12	Mencatat Laporan Kegiatan Hakim (Buku Agenda Sidang Hakim)	0	40	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Kegiatan	80	8	Bulan	-	564,33	188,11
13	Melakukan Pengawasan (HAWASBID)	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	4	Kegiatan	80	8	Bulan	-	289,33	96,44
14	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Triwulan	0	4	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	4	Dokumen	80	8	Bulan	-	289,33	96,44
15	Membuat Instrumen dalam Persidangan	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Dokumen	94	8	Bulan	-	286,67	95,56
16	Menandatangani PHS	0	180	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	150	Dokumen	94	8	Bulan	-	286,67	95,56
17	Melakukan sidang di luar Gedung	0	14	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	12	Kegiatan	94	8	Bulan	-	289,05	96,35
18	Melaksanakan isbath terpadu	0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	0	Kegiatan	97	8	Bulan	-	206,33	68,78
Nilai Capaian SKP																	96,40
																	(Sangat Baik)



Banggai, 31 Juli 2020
Pejabat Penilai,

Drs. H. M. Sngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.
Np. 19670202.199203.1.006

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H		1	Nama	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I			
2	NIP	19790209.200604.1.003		2	NIP	19790808.200704.1.001			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a		3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk. I, III/d			
4	Jabatan	Ketua / Hakim Madya Pratama		4	Jabatan	Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai		5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
NO				III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
						KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
TUGAS POKOK									
1	Membuat RKT	0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
2	Membuat Program Pengawasan	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-	
3	Evaluasi Hasil Pengawasan	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-	
4	Melakukan Pembinaan Hasil Pengawasan	0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
5	Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
6	Melaksanakan Rapat Tahunan	0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-	
7	Membuat SOP	0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-	
8	Melakukan Pembinaan Teknis	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-	
9	Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bagi Hakim dan Pegawai	0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
10	Melakukan Rapat Baperjakat	0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
11	Membuat / Menandatangani PMH	0	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
12	Mempelajari Berkas Yang Akan Disidangkan	0	100	Berkas	100	12	Bulan	-	
13	Membuat / Menandatangani PHS	0	100	Berkas	100	12	Bulan	-	
14	Melakukan Persidangan	0	200	Dokumen	100	12	Bulan	-	
15	Melaksanakan Sidang Keliling / Terpadu	0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
16	Melakukan Musyawarah Majelis	0	80	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
17	Mengonsep Putusan	0	100	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
18	Menandatangani Putusan	0	100	Dokumen	100	12	Bulan	-	
19	Melakukan Minutasi Berkas	0	100	Dokumen	100	12	Bulan	-	
20	Melakukan Pemeriksaan Setempat (PS)	0	1	Dokumen	100	12	Bulan	-	
21	Menunjuk Hakim Mediator	0	8	Kegiatan	100	12	Bulan	-	
22	Membuat Laporan Kegiatan Hakim	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-	



Pejabat Penilai,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H

Nip. 19790209.200604.1.003

Banggai, 03 Agustus 2020
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I

Nip. 19790808.200704.1.001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
03 Agustus s/d 31 Desember 2020

Nama : Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.
NIP : 19790808.200704.1.001

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Membuat RKT	0	1 1	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
2	Membuat Program Pengawasan	0	100 2	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	2	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
3	Evaluasi Hasil Pengawasan	0	100 2	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	2	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
4	Melakukan Pembinaan Hasil Pengawasan	0	100 2	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	2	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
5	Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	0	100 4	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	2	Kegiatan	99	4	Bulan	-	225,00	75,00
6	Melaksanakan Rapat Tahunan	0	100 1	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
7	Membuat SOP	0	100 1	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Dokumen	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
8	Melakukan Pembinaan Teknis	0	100 2	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Dokumen	99	4	Bulan	-	225,00	75,00
9	Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bagi Hakim dan Pegawai	0	100 1	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
10	Melakukan Rapat Baperjakat	0	20 1	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
11	Membuat / Menandatangani PMH	0	40 10	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	12	Kegiatan	99	4	Bulan	-	295,00	98,33

12	Mempelajari Berkas Yang Akan Disidangkan	0	40 100	Berkas	100	12 4	Bulan	Rp -	0	197	Berkas	80	4	Bulan	-	353,00	117,67
13	Membuat / Menandatangani PHS	0	4 100	Berkas	100	12 4	Bulan	Rp -	0	197	Berkas	80	4	Bulan	-	353,00	117,67
14	Melakukan Persidangan	0	4 200	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	394	Dokumen	80	4	Bulan	-	353,00	117,67
15	Melaksanakan Sidang Keliling / Terpadu	0	180 2	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	2	Kegiatan	95	4	Bulan	-	271,00	90,33
16	Melakukan Musyawarah Majelis	0	180 80	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	197	Kegiatan	80	4	Bulan	-	402,25	134,08
17	Mengonsep Putusan	0	14 100	Kegiatan	100	12 4	Bulan	Rp -	0	100	Kegiatan	99	4	Bulan	-	275,00	91,67
18	Menandatangani Putusan	0	2 100	Dokumen	100	12 4	Bulan	Rp -	0	197	Dokumen	80	4	Bulan	-	353,00	117,67
19	Melakukan Minutasi Berkas	0	100	Dokumen	100	4	Bulan	Rp -	0	197	Dokumen	80	4	Bulan	-	353,00	117,67
20	Melakukan Pemeriksaan Setempat (PS)	0	1	Dokumen	100	15	Bulan	Rp -	0	1	Dokumen	97	15	Bulan	-	273,00	91,00
21	Menunjuk Hakim Mediator	0	8	Kegiatan	100	16	Bulan	Rp -	0	13	Kegiatan	80	16	Bulan	-	318,50	106,17
22	Membuat Laporan Kegiatan Hakim	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	4	Kegiatan	97	12	Bulan	-	273,00	91,00
Nilai Capaian SKP																	
96,76																	
(Sangat Baik)																	



Banggai, 30 Desember 2020

Pejabat Penilai,

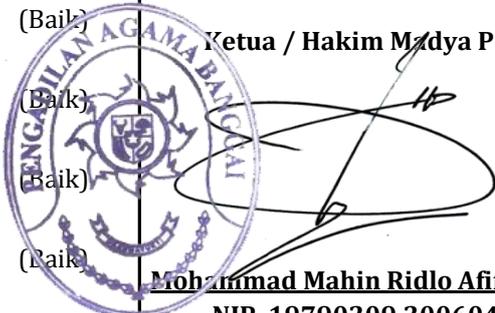
Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Nip. 19790209.200604.1.003

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I

NIP : 19790808.200704.1.001

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	03 Agustus s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = $96,40 + 96,76 / 2$ 96,58 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <p>Orientasi Pelayanan = 91,00 (Sangat Baik)</p> <p>Integritas = 87,00 (Baik)</p> <p>Komitmen = 89,00 (Baik)</p> <p>Disiplin = 83,00 (Baik)</p> <p>Kerjasama = 82,00 (Baik)</p> <p>Kepemimpinan = 83,00 (Baik)</p> <hr/> <p>Jumlah = 515,00 (Sangat Baik)</p> <p>Nilai Rata-rata = 85,83 (Baik)</p>	<p style="text-align: center;">Ketua / Hakim Madya Pratama</p>  <p style="text-align: center;">Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H NIP. 19790209.200604.1.003</p>



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II

JANGKA WAKTU PENILAIAN
03 Agustus s/d 31 Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I			
	b. NIP	19790808.200704.1.001			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk. I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Wakil Ketua / Hakim Pratama Utama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H			
	b. NIP	19591231.198603.1.051			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama, IV/e			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Tinggi Agama Palu			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	96,58	X 60%	57,95	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	91,00	(Sangat Baik)	
		2. Integritas	87,00	(Baik)	
		3. Komitmen	89,00	(Baik)	
		4. Disiplin	83,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	82,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	83,00	(Baik)	
		Jumlah	515,00	(Sangat Baik)	
		Nilai Rata-rata	85,83	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja	85,83	X 40%	34,33		
Nilai Prestasi Kerja				92,28 (Sangat Baik)	

5. **KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)**

Tanggal

6. **TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN**

Tanggal

7. **KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
PENILAI ATAS KEBERATAN**

Tanggal

8. **REKOMENDASI**

9. **DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI**

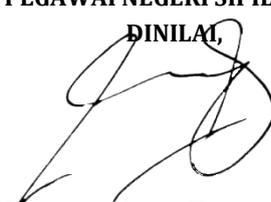


Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.L.M.H

NIP. 19670202.199203.1.006

10. **DITERIMA TANGGAL, 06 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG**

DINILAI,



Muhamad Yahya Tadiudin, S.H.I

NIP. 19790808.200704.1.001

11. **DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI**

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

NIP. 19551231.198203.1.397

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Syamsul Ilmi, S.H.I
b. NIP	: 19890913.201712.1.001
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Muda, III/a
d. Jabatan	: Hakim Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
b. NIP	: 19591231.198603.1.051
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama, IV/e
d. Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
e. Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Agama Palu



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
14 April s/d 31 Desember 2020**

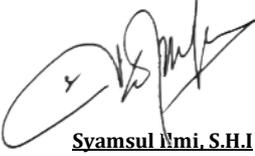
Nama Pegawai : **Syamsul Ilmi, S.H.I**
NIP : 19890913.201712.1.001
Pangkat Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Hakim Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.	1	Nama	Syamsul Ilmi, S.H.I			
2	NIP	19670202.199203.1.006	2	NIP	19890913.201712.1.001			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda, III/a			
4	Jabatan	Ketua / Hakim Madya Pratama	4	Jabatan	Hakim Pratama			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA	
TUGAS POKOK								
1	Membuat Gugatan/Permohonan untuk buta huruf	0	1	Dokumen	100	9	Bulan	-
2	Mempelajari Berkas Perkara	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara	0	160	Kegiatan	100	9	Bulan	-
4	Melakukan Musyawarah Majelis	0	80	Kegiatan	100	9	Bulan	-
5	Membuat Konsep Putusan/Penetapan	0	80	Naskah	100	9	Bulan	-
6	Menandatangani Putusan/Penetapan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	-
7	Membuat Instrumen Persidangan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	-
8	Menganonim Putusan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	-
9	Melakukan Tugas sebagai Mediator	0	28	Kegiatan	100	9	Bulan	-
10	Membuat Laporan Hasil Mediasi	0	14	Dokumen	100	9	Bulan	-
11	Mencatat Laporan Kegiatan Hakim (Buku Agenda Sidang Hakim)	0	28	Laporan	100	9	Bulan	-
12	Melakukan Pengawasan (HAWASBID)	0	3	Kegiatan	100	9	Bulan	-
13	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Triwulan	0	3	Dokumen	100	9	Bulan	-
14	Melakukan sidang di luar Gedung	0	2	Kegiatan	100	9	Bulan	-
15	Melaksanakan isbath terpadu	0	0	Kegiatan	0	0	Bulan	-


 Pejabat Penilai,
Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,M.H.E.S.
 Nip. 19670202.199203.1.006

Banggai, 14 April 2020
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Syamsul Ilmi, S.H.I
 Nip. 19890913.201712.1.001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
14 April s/d 31 Desember 2020

Nama : Syamsul Ilmi, S.H.I
NIP : 19890913.201712.1.001

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Membuat Gugatan/Permohonan untuk buta huruf	0	1	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	0	Dokumen	0	9	Bulan	-	76,00	25,33
2	Mempelajari Berkas Perkara	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	100	Dokumen	80	9	Bulan	-	281,00	93,67
3	Menyidangkan Perkara	0	160	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	200	Kegiatan	80	9	Bulan	-	281,00	93,67
4	Melakukan Musyawarah Majelis	0	80	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	100	Kegiatan	80	9	Bulan	-	281,00	93,67
5	Membuat Konsep Putusan/Penetapan	0	80	Naskah	100	9	Bulan	Rp -	0	80	Naskah	80	9	Bulan	-	256,00	85,33
6	Menandatangani Putusan/Penetapan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	100	Dokumen	80	9	Bulan	-	281,00	93,67
7	Membuat Instrumen Persidangan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	100	Dokumen	80	9	Bulan	-	281,00	93,67
8	Menganonim Putusan	0	80	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	80	Dokumen	80	9	Bulan	-	256,00	85,33
9	Melakukan Tugas sebagai Mediator	0	28	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	14	Kegiatan	80	9	Bulan	-	206,00	68,67
10	Membuat Laporan Hasil Mediasi	0	14	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	7	Dokumen	80	9	Bulan	-	206,00	68,67

11	Mencatat Laporan Kegiatan Hakim (Buku Agenda Sidang Hakim)	0	28	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	28	Kegiatan	80	9	Bulan	-	256,00	85,33
12	Melakukan Pengawasan (HAWASBID)	0	3	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	3	Kegiatan	80	9	Bulan	-	256,00	85,33
13	Membuat Laporan Hasil Pengawasan Triwulan	0	3	Dokumen	100	9	Bulan	Rp -	0	3	Dokumen	80	9	Bulan	-	256,00	85,33
14	Melakukan sidang di luar Gedung	0	2	Kegiatan	100	9	Bulan	Rp -	0	6	Kegiatan	80	9	Bulan	-	456,00	152,00
Nilai Capaian SKP																86,40	
																(Baik)	

Banggai, 30 Desember 2020

Pejabat Penilai,



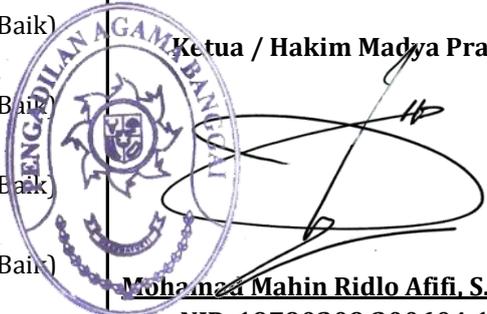
Mohamad Fahrudin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

Nip. 19790209.200604.1.003

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Syamsul Ilmi, S.H.I

NIP : 19890913.201712.1.001

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai																																				
1	2	3	4																																				
1	14 April s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = $85,33+86,40/2$ 85,86 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Orientasi Pelayanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">82,00</td> <td style="width: 15%;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">83,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Komitmen</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">81,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Disiplin</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">82,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">81,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kepemimpinan</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">409,00</td> <td>(Sangat Baik)</td> </tr> <tr> <td>Nilai Rata-rata</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">81,80</td> <td>(Baik)</td> </tr> </table>	Orientasi Pelayanan	=	82,00	(Baik)	Integritas	=	83,00	(Baik)	Komitmen	=	81,00	(Baik)	Disiplin	=	82,00	(Baik)	Kerjasama	=	81,00	(Baik)	Kepemimpinan	=			<hr/>				Jumlah	=	409,00	(Sangat Baik)	Nilai Rata-rata	=	81,80	(Baik)	<p style="text-align: center;">Ketua / Hakim Madya Pratama</p> <div style="text-align: center;">  <p>Mohamza Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H. NIP. 19790209.200604.1.003</p> </div>
Orientasi Pelayanan	=	82,00	(Baik)																																				
Integritas	=	83,00	(Baik)																																				
Komitmen	=	81,00	(Baik)																																				
Disiplin	=	82,00	(Baik)																																				
Kerjasama	=	81,00	(Baik)																																				
Kepemimpinan	=																																						
<hr/>																																							
Jumlah	=	409,00	(Sangat Baik)																																				
Nilai Rata-rata	=	81,80	(Baik)																																				



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II

JANGKA WAKTU PENILAIAN
14 April s/d 31 Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Syamsul Ilmi, S.H.I			
	b. NIP	19890913.201712.1.001			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Muda, III/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Hakim Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H			
	b. NIP	19591231.198603.1.051			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama, IV/e			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Tinggi Agama Palu			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	85,86	X 60%	51,52	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	82,00	(Baik)	
		2. Integritas	83,00	(Baik)	
		3. Komitmen	81,00	(Baik)	
		4. Disiplin	82,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	81,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	0,00	0	
		Jumlah	409,00	(Sangat Baik)	
		Nilai Rata-rata	81,80	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja	81,80	X 40%	32,72		
Nilai Prestasi Kerja				84,24 (Baik)	

5. **KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)**

Tanggal

6. **TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN**

Tanggal

7. **KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
PENILAI ATAS KEBERATAN**

Tanggal

8. **REKOMENDASI**

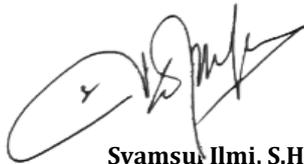
9. **DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI**



Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.L., M.H.

NIP. 19790209.200604.1.003

10. **DITERIMA TANGGAL, 06 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI,**



Syamsul Ilmi, S.H.I

NIP. 19890913.201712.1.001

11. **DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI**

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

NIP. 19591231.198603.1.051

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Dra. Hj. Aisyah
b. NIP	: 19621115.199203.2.002
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk I, III/d
d. Jabatan	: Panitera
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
b. NIP	: 19591231.198603.1.051
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina Utama, IV/e
d. Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
e. Unit Kerja	: Pengadilan Tinggi Agama Palu



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

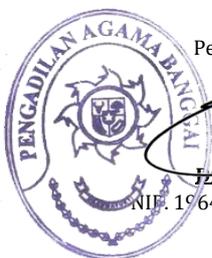
**Jangka Waktu Penilaian
28 Oktober s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Dra. Hj. Aisyah**
NIP : 19621115.199203.2.002
Pangkat Golongan Ruang : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II/b
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
1	Nama	Drs. H. Rusdin	1	Nama	Dra. Hj. Aisyah				
2	NIP	19640915.199403.1.004	2	NIP	19621115.199203.2.002				
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk I, III/d	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk I, III/d				
4	Jabatan	Panitera	4	Jabatan	Panitera				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET					
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
TUGAS POKOK									
1	Menyusun Rencana Kerja		0	1	Kegiatan	100	2	Bulan	-
2	Menyusun Rencana Biaya Proses		0	1	Kegiatan	100	2	Bulan	-
3	Melakukan Pengawasan dan Pembinaan dengan Pejabat/Pegawai Kepaniteraan		0	2	Kegiatan	100	2	Bulan	-
4	Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Wakil Panitera, Panitera Muda, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Bendahara Perkara		0	2	Kegiatan	100	2	Bulan	-
5	Menindaklanjuti Surat Masuk Yang Berkaitan Dengan Administrasi Kepaniteraan		0	8	Surat	100	2	Bulan	-
6	Melakukan Koordinasi Dengan Sekretaris Terkait Anggaran Sidang Di Luar Gedung		0	10	Kegiatan	100	2	Bulan	-
7	Membuat Jadwal Sidang Di Luar Gedung dan Penggunaan Anggaran DIPA		0	10	Kegiatan	100	2	Bulan	-
8	Membuat Penunjukan Panitera Pengganti		0	280	Dokumen	100	2	Bulan	-
9	Membuat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti		0	280	Dokumen	100	2	Bulan	-
10	Membuat dan Menandatangani Laporan Perkara		0	10	Dokumen	100	2	Bulan	-
11	Menandatangani Akta Cerai		0	125	Akta	100	2	Bulan	-
12	Menandatangani Salinan Putusan/Penetapan		0	125	Salinan	100	2	Bulan	-
13	Menandatangani Surat Dinas Yang Bersifat Rutin dan Tidak Rahasia		0	25	Surat	100	2	Bulan	-
14	Mendampingi Hakim di Persidangan dan Mencatat Jalannya Sidang		0	40	Dokumen	100	2	Bulan	-
15	Membuat Berita Acara Sidang		0	40	Dokumen	100	2	Bulan	-
16	Melakukan Pemberkasan Perkara/Minutasi		0	30	Berkas	100	2	Bulan	-



Pejabat Penilai,

Drs. H. Rusdin

NIP. 19640915.199403.1.004

Banggai, 28 Oktober 2020
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Dra. Hj. Aisyah

NIP. 19621115.199203.2.002

Catatan :

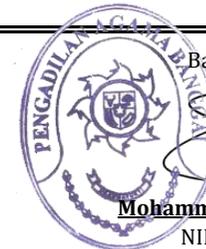
* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
28 Oktober s/d 31 Desember 2020

Nama : Dra. Hj. Aisyah
NIP : 19621115.199203.2.002

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP										
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	Menyusun Rencana Kerja	0	154 1	Kegiatan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	98	2	Bulan	-	274,00	91,33						
2	Menyusun Rencana Biaya Proses	0	154 1	Kegiatan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	1	Kegiatan	97	2	Bulan	-	273,00	91,00						
3	Melakukan Pengawasan dan Pembinaan dengan Pejabat/Pegawai Keaniteraan	0	11 3	Kegiatan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	4	Kegiatan	90	2	Bulan	-	299,33	99,78						
4	Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Wakil Panitera, Panitera Muda, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Bendahara Perkara	0	58 3	Surat	100	12 2	Bulan	Rp -	0	4	Surat	90	2	Bulan	-	299,33	99,78						
5	Menindaklanjuti Surat Masuk Yang Berkaitan Dengan Administrasi Keaniteraan	0	352 8	Surat	100	12 2	Bulan	Rp -	0	10	Surat	95	2	Bulan	-	296,00	98,67						
6	Melakukan Koordinasi Dengan Sekretaris Terkait Anggaran Sidang Di Luar Gedung	0	1 10	Kegiatan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	12	Kegiatan	93	2	Bulan	-	289,00	96,33						
7	Membuat Jadwal Sidang Di Luar Gedung dan Penggunaan Anggaran DIPA	0	4 10	Kegiatan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	12	Kegiatan	92	2	Bulan	-	288,00	96,00						
8	Membuat Penunjukan Panitera Pengganti	0	12 280	Dokumen	100	12 2	Bulan	Rp -	0	300	Dokumen	98	2	Bulan	-	281,14	93,71						
9	Membuat Penunjukan Jusurita/Jurusita Pengganti	0	12 280	Dokumen	100	12 2	Bulan	Rp -	0	300	Dokumen	97	2	Bulan	-	280,14	93,38						
10	Membuat dan Menandatangani Laporan Perkara	0	12 10	Dokumen	100	12 2	Bulan	Rp -	0	12	Dokumen	96	2	Bulan	-	292,00	97,33						
11	Menandatangani Akta Cerai	0	12 125	Akta	100	12 2	Bulan	Rp -	0	140	Akta	97	2	Bulan	-	285,00	95,00						
12	Menandatangani Salinan Putusan/Penetapan	0	12 125	Salinan	100	12 2	Bulan	Rp -	0	140	Salinan	98	2	Bulan	-	286,00	95,33						
13	Menandatangani Surat Dinas Yang Bersifat Rutin dan Tidak Rahasia	0	25	Dokumen	100	2	Bulan	Rp -	0	30	Dokumen	99	2	Bulan	-	295,00	98,33						
14	Mendampingi Hakim di Persidangan dan Mencatat Jalannya Sidang	0	40	Dokumen	100	2	Bulan	Rp -	0	48	Dokumen	93	2	Bulan	-	289,00	96,33						
15	Membuat Berita Acara Sidang	0	40	Dokumen	100	2	Bulan	Rp -	0	48	Dokumen	92	2	Bulan	-	288,00	96,00						
16	Melakukan Pemberkasan Perkara/Minutasi	0	30	Berkas	100	2	Bulan	Rp -	0	35	Berkas	96	2	Bulan	-	288,67	96,22						
Nilai Capaian SKP																							95,91 (Sangat Baik)



Banggai, 30 Desember 2020
Pejabat Penilai,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.M.H
NIP. 19790209.200604.1.003

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Dra. Hj. Aisyah

NIP : 19621115.199203.2.002

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	28 Oktober s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 95,65 + 95,91, 95,80 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <p>Orientasi Pelayanan = 92,00 (Sangat Baik)</p> <p>Integritas = 86,00 (Baik)</p> <p>Komitmen = 86,00 (Baik)</p> <p>Disiplin = 85,00 (Baik)</p> <p>Kerjasama = 85,00 (Baik)</p> <p>Kepemimpinan = 85,00 (Baik)</p> <hr/> <p>Jumlah = 519,00</p> <p>Nilai Rata-rata = 86,50 (Baik)</p>	<p>Ketua / Hakim Madya Pratama</p>  <p>Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.L.M.H NIP. 19790209.200604.1.003</p>



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

JANGKA WAKTU PENILAIAN
28 Oktober s/d 31 Desember 2020

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II/b

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Dra. Hj. Aisyah			
	b. NIP	19621115.199203.2.002			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Panitera			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H			
	b. NIP	19591231.198603.1.051			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina Utama, IV/e			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Tinggi Agama Palu			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 95,50 X 60%			57,30	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	92,00	(Sangat Baik)	
		2. Integritas	86,00	(Baik)	
		3. Komitmen	86,00	(Baik)	
		4 Disiplin	85,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	85,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	85,00	(Baik)	
		Jumlah	519,00	0	
		Nilai Rata-rata	86,50	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja 86,50 X 40%			34,60		
Nilai Prestasi Kerja			91,90 (Sangat Baik)		

5. **KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)**

Tanggal

6. **TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN**

Tanggal

7. **KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
PENILAI ATAS KEBERATAN**

Tanggal

8. **REKOMENDASI**

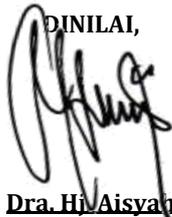
9. **DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI**



Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.L.M.H
NIP. 19790209.200604.1.003

10. **DITERIMA TANGGAL, 06 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG**

DINILAI,



Dra. Hj. Aisyah
NIP. 19621115.199203.2.002

11. **DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI**

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
NIP. 19591231.198603.1.051

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Maswati Masruni, S.H
b. NIP	: 19800528.200312.2.004
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk.I, III/d
d. Jabatan	: Panitera Muda Gugatan
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dra. Hj. Aisyah
b. NIP	: 19621115.199203.2.002
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk I, III/d
d. Jabatan	: Panitera
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31, Desember 2020**

Nama Pegawai : **Maswati Masruni, S.H**
NIP : 19800528.200312.2.004
Pangkat Golongan Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II/b
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
1	Nama	Drs. H. Rusdin	1	Nama	Maswati Masruni, S.H				
2	NIP	19640915.199403.1.004	2	NIP	19800528.200312.2.004				
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk I, III/d	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk.I, III/d				
4	Jabatan	Panitera	4	Jabatan	Panitera Muda Gugatan				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET					
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
TUGAS POKOK									
1	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang		0	145	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Membuat berita acara Persidangan (BAS)		0	145	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putusatan		0	25	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Mengikuti Penetapan (Sita / Ikrar)		0	15	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Melaksanakan Pemberkasan perkara		0	230	Dokumen	100	12	Bulan	-
6	Menerima / Memeriksa Berkas Gugatan yang diajukan		0	230	Dokumen	100	12	Bulan	-
7	Mengisi Buku Register Perkara Gugatan		0	230	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Menaksir Panjar Biaya Perkara		0	230	Laporan	100	12	Bulan	-
9	Merekap Perkara Gugatan		0	10	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Bertanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Meja 1		0	10	Laporan	100	12	Bulan	-
11	Bertanggung Jawab Memvalidasi Data Perkara Pada Aplikasi SIPP		0	10	Laporan	100	12	Bulan	-
12	Mengisi Data Saksi dan Jadwal Sidang Pada Aplikasi SIPP		0	195	Laporan	100	12	Bulan	-
13	Menyerahkan Berkas Perkara Yang Sudah BHT Kepada Panmud Hukum		0	60	Dokumen	100	12	Bulan	-

Pejabat Penilai,

Drs. H. Rusdin
 NIP. 19640915.199403.1.004

Banggai, 02 Januari 2020
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai


Maswati Masruni, S.H
 NIP. 19800528.200312.2.004

Catatan :

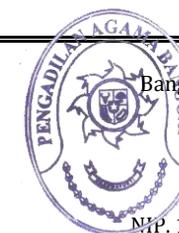
* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31, Desember 2020

Nama : Maswati Masruni, S.H
NIP : 19800528.200312.2.004

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET							AK	REALISASI							PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output		Kual/ Mutu	Waktu		Biaya			Kuant/ Output		Kual/ Mutu	Waktu		Biaya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang	0	145	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	150	Dokumen	96	12	Bulan	-	275,45	91,82	
2	Membuat berita acara Persidangan (BAS)	0	145	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	150	Dokumen	95	12	Bulan	-	274,45	91,48	
3	Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putusatan	0	25	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	30	Dokumen	90	12	Bulan	-	286,00	95,33	
4	Mengikuti Penetapan (Sita / Ikrar)	0	15	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	17	Dokumen	95	12	Bulan	-	284,33	94,78	
5	Melaksanakan Pemberkasan perkara	0	230	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	236	Dokumen	98	12	Bulan	-	276,61	92,20	
6	Menerima / Memeriksa Berkas Gugatan yang diajukan	0	230	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	236	Dokumen	98	12	Bulan	-	276,61	92,20	
7	Mengisi Buku Register Perkara Gugatan	0	230	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	240	Dokumen	95	12	Bulan	-	275,35	91,78	
8	Merekap Perkara Gugatan	0	230	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	240	Laporan	96	12	Bulan	-	276,35	92,12	
9	Merekap Perkara Gugatan	0	10	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Dokumen	96	12	Bulan	-	292,00	97,33	
10	Bertanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Meja 1	0	10	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Laporan	94	12	Bulan	-	290,00	96,67	
11	Bertanggung Jawab Memvalidasi Data Perkara Pada Aplikasi SIPP	0	10	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Laporan	90	12	Bulan	-	286,00	95,33	
12	Mengisi Data Saksi dan Jadwal Sidang Pada Aplikasi SIPP	0	195	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	200	Laporan	97	12	Bulan	-	275,56	91,85	
13	Menyerahkan Berkas Perkara Yang Sudah BHT Kepada Panmud Hukum	0	60	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	62	Dokumen	97	12	Bulan	-	276,33	92,11	
Nilai Capaian SKP																		94,54	
(Sangat Baik)																			



Banggai, 30 Desember 2020
Penjaga Penilai,

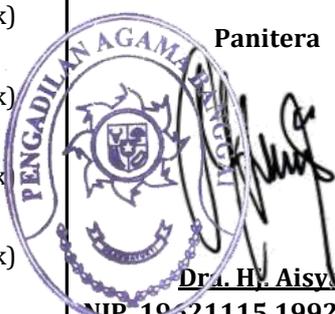
Dsa. Hj. Aisyah

NIP. 19621115.199203.2.002

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Maswati Masruni, S.H

NIP : 19800528.200312.2.004

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai																								
1	2	3	4																								
1	02 Januari s/d 31, Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020, = 94,54 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Orientasi Pelayanan</td> <td style="width: 10%;">= 85,00</td> <td style="width: 30%;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td>= 85,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Komitmen</td> <td>= 87,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Disiplin</td> <td>= 84,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td>= 85,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kepemimpinan</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>= 426,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nilai Rata-rata</td> <td>= 85,20 (Baik)</td> </tr> </table>	Orientasi Pelayanan	= 85,00	(Baik)	Integritas	= 85,00	(Baik)	Komitmen	= 87,00	(Baik)	Disiplin	= 84,00	(Baik)	Kerjasama	= 85,00	(Baik)	Kepemimpinan	=		Jumlah		= 426,00	Nilai Rata-rata		= 85,20 (Baik)	<p style="text-align: right;">Panitera</p>  <p style="text-align: right;">Dr. H. Aisyah NIP. 19621115.199203.2.002</p>
Orientasi Pelayanan	= 85,00	(Baik)																									
Integritas	= 85,00	(Baik)																									
Komitmen	= 87,00	(Baik)																									
Disiplin	= 84,00	(Baik)																									
Kerjasama	= 85,00	(Baik)																									
Kepemimpinan	=																										
Jumlah		= 426,00																									
Nilai Rata-rata		= 85,20 (Baik)																									



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KLAS II/b

JANGKA WAKTU PENILAIAN
02 Januari s/d 31, Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Maswati Masruni, S.H			
	b. NIP	19800528.200312.2.004			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk.I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Panitera Muda Gugatan			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dra. Hj. Aisyah			
	b. NIP	19621115.199203.2.002			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Panitera			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 94,54 X 60%			56,72	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	85,00	(Baik)	
		2. Integritas	85,00	(Baik)	
		3. Komitmen	87,00	(Baik)	
		4. Disiplin	84,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	85,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan			
		Jumlah	426,00		
		Nilai Rata-rata	85,20	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja 85,20 X 40%			34,08		
Nilai Prestasi Kerja			90,80 (Baik)		

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN

Tanggal

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI



Dra. Hj. Aisyah

NIP. 19621115.199203.2.002

10. DITERIMA TANGGAL, 04 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI,



Maswati Masruni, S.H

NIP. 19800528.200312.2.004



DITERIMA TANGGAL, 07 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

NIP. 19790209.200604.1.003



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Muhammad Saleh, S.H.I.**
NIP : 19811215.200904.1.007
Pangkat Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Tahun 2020**

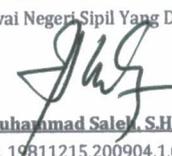
DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Muhammad Saleh, S.H.I.
b. NIP	: 19811215.200904.1.007
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata, III/c
d. Jabatan	: Panitera Muda Hukum
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dra. Aisyah
b. NIP	: 19621115.199203.2.002
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk. I, III/d
d. Jabatan	: Panitera
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Dra. Aisyah	Muhammad Saleh, S.H.I.			
2	NIP	19621115.199203.2.002	19811215.200904.1.007			
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk. I, III/d	Penata, III/c			
4	Jabatan	Panitera	Panitera Muda Hukum			
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	Pengadilan Agama Banggai			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengolah dan Menyajikan Data/Statistik Perkara	0	48 Dokumen	100	12 bln	-
2	Menyusun dan Mengirim Laporan Perkara	0	12 Kegiatan	100	12 bln	-
3	Menerima dan Menyimpan Arsip Perkara In Aktif	0	300 Berkas	100	12 bln	-
4	Menerima, Mengolah dan Menyelesaikan Surat-Surat Bagian Kepaniteraan Hukum	0	24 Dokumen	100	12 bln	-
5	Bertanggung jawab atas Terlaksananya Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	0	12 Kegiatan	100	12 bln	-
6	Bertanggung jawab atas Terlaksananya Pelayanan Meja 3	0	12 Kegiatan	100	12 bln	-
7	Bertanggung jawab atas Terlaksananya Pengunggahan Putusan di Situs Web MA	0	12 Kegiatan	100	12 bln	-
8	Bertanggung jawab atas Validasi Data Perkara pada Aplikasi SIPP	0	12 Kegiatan	100	12 bln	-
9	Mengikuti dan Mencatat Jalannya Persidangan	0	150 Kegiatan	100	12 bln	-
10	Membuat Berita Acara Sidang	0	150 Dokumen	100	12 bln	-
11	Melaksanakan Pemberkasan Perkara/Minutasi	0	70 Berkas	100	12 bln	-
12	Memasukkan Data Sidang dan BAS ke Aplikasi SIPP	0	150 Kegiatan	100	12 bln	-
13	Menyerahkan Berkas Perkara Minutasi ke PM. Gugatan	0	60 Perkara	100	12 bln	-
14	Menyerahkan Berkas Perkara Minutasi ke PM. Permohonan	0	20 Perkara	100	12 bln	-


 Pejabat Penilai,
Dra. Aisyah
 NIP. 19621115.199203.2.002

Banggai, 02 Januari 2020
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Muhammad Saleh, S.H.I.
 NIP. 19811215.200904.1.007

Catatan :
 * AK Bagi PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020

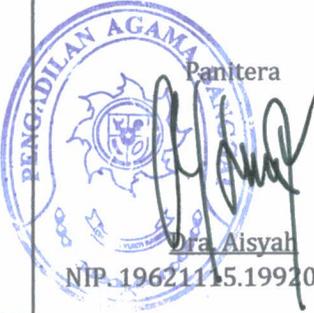
NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mengolah dan Menyajikan Data/Statistik Perkara	0	48 Dokumen	100	12 bln	Rp -	0	60 Dokumen	90	12 bln	Rp -	291,0	97,00
2	Menyusun dan Mengirim Laporan Perkara	0	12 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	12 Kegiatan	90	12 bln	Rp -	266,0	88,67
3	Menerima dan Menyimpan Arsip Perkara In Aktif	0	300 Berkas	100	12 bln	Rp -	0	325 Berkas	90	12 bln	Rp -	274,3	91,44
4	Menerima, Mengolah dan Menyelesaikan Surat-Surat Bagian Kepaniteraan Hukum	0	24 Dokumen	100	12 bln	Rp -	0	36 Dokumen	90	12 bln	Rp -	316,0	105,33
5	Bertanggung Jawab atas Terlaksananya Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan	0	12 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	12 Kegiatan	90	12 bln	Rp -	266,0	88,67
6	Bertanggung Jawab atas Terlaksananya Pelayanan Meja 3	0	12 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	12 Kegiatan	90	12 bln	Rp -	266,0	88,67
7	Bertanggung Jawab atas Terlaksananya Pengunggahan Putusan di Situs Web MA	0	12 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	12 Kegiatan	90	12 bln	Rp -	266,0	88,67
8	Bertanggung Jawab atas Validasi Data Perkara pada Aplikasi SIPP	0	12 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	12 Kegiatan	90	12 bln	Rp -	266,0	88,67
9	Mengikuti dan Mencatat Jalannya Persidangan	0	150 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	250 Kegiatan	85	12 bln	Rp -	327,7	109,22
10	Membuat Berita Acara Sidang	0	150 Dokumen	100	12 bln	Rp -	0	250 Dokumen	85	12 bln	Rp -	327,7	109,22
11	Melaksanakan Pemberkasan Perkara/Minutasi	0	70 Berkas	100	12 bln	Rp -	0	85 Berkas	90	12 bln	Rp -	287,4	95,81
12	Memasukkan Data Sidang dan BAS ke Aplikasi SIPP	0	150 Kegiatan	100	12 bln	Rp -	0	250 Kegiatan	85	12 bln	Rp -	327,7	109,22
13	Menyerahkan Berkas Perkara Minutasi ke PM. Gugatan	0	60 Perkara	100	12 bln	Rp -	0	67 Perkara	90	12 bln	Rp -	277,7	92,56
14	Menyerahkan Berkas Perkara Minutasi ke PM. Permohonan	0	20 Perkara	100	12 bln	Rp -	0	18 Perkara	90	12 bln	Rp -	256,0	85,33
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :													
1													
Nilai Capaian SKP													95,61 (Sangat Baik)


 Banggai, 31 Desember 2020
 Pejabat Penilai,
 Dra. Aisyah
 NIP. 196211151992032.002

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Muhammad Saleh, S.H.I.

NIP : 19811215.200904.1.007

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai																											
1	2	3	4																											
1	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 95,61 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Orientasi Pelayanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">= 83,05</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">= 83,05</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Komitmen</td> <td style="text-align: center;">= 82,00</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Disiplin</td> <td style="text-align: center;">= 82,05</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">= 82,10</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kepemimpinan</td> <td style="text-align: center;">= 82,25</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">= 494,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Rata-rata</td> <td style="text-align: center;">= 82,42</td> <td style="text-align: right;">(Baik)</td> </tr> </table>	Orientasi Pelayanan	= 83,05	(Baik)	Integritas	= 83,05	(Baik)	Komitmen	= 82,00	(Baik)	Disiplin	= 82,05	(Baik)	Kerjasama	= 82,10	(Baik)	Kepemimpinan	= 82,25	(Baik)	<hr/>			Jumlah	= 494,5		Nilai Rata-rata	= 82,42	(Baik)	 <p style="text-align: center;">Panitera <u>Dra. Aisyah</u> NIP. 19621115.199203.2.002</p>
Orientasi Pelayanan	= 83,05	(Baik)																												
Integritas	= 83,05	(Baik)																												
Komitmen	= 82,00	(Baik)																												
Disiplin	= 82,05	(Baik)																												
Kerjasama	= 82,10	(Baik)																												
Kepemimpinan	= 82,25	(Baik)																												
<hr/>																														
Jumlah	= 494,5																													
Nilai Rata-rata	= 82,42	(Baik)																												



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

JANGKA WAKTU PENILAIAN

1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

1.	YANG DINILAI				
	a. Nama	Muhammad Saleh, S.H.I.			
	b. NIP	19811215.200904.1.007			
	c. Pangkat, Gol/Ruang	Penata, III/c			
	d. Jabatan	Panitera Muda Hukum			
	e. Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. Nama	Dra. Aisyah			
	b. NIP	19621115.199203.2.002			
	c. Pangkat, Gol/Ruang	Penata Tk. I, III/d			
	d. Jabatan	Panitera			
	e. Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. Nama	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, Gol/Ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan	Ketua			
	e. Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	95,61	X 60%	57,36	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	83,05	(Baik)	
		2. Integritas	83,05	(Baik)	
		3. Komitmen	82,00	(Baik)	
		4. Disiplin	82,05	(Baik)	
		5. Kerjasama	82,10	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	82,25	(Baik)	
		Jumlah	494,50		
		Nilai Rata-rata	82,42	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja	82,42	X 40%	32,97		
Nilai Prestasi Kerja				90,33 (Baik)	

5. **KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)**

Tanggal

6. **TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN**

Tanggal

7. **KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN**

Tanggal

8. **REKOMENDASI**

9. **DIBUAT TANGGAL, Selasa, 29 Desember 2020
PEJABAT PENILAI**



Dra. Aisyah
NIP. 19621115.199203.2.002

10. **DITERIMA TANGGAL, Rabu, 30 Desember 2020
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG**

DINILAI,



Muhammad Saleh, S.H.I.
NIP. 19811215.200904.1.007

11. **DITERIMA TANGGAL, Senin, 4 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI**

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
NIP. 19790209.200604.1.003

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Rudi Hartono, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19820508.200912.1.001
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata , III/c
d. Jabatan	: Panitera Muda Permohonan
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Dra. Hj. Aisyah
b. NIP	: 19621115.199203.2.002
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk I, III/d
d. Jabatan	: Panitera
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Rudi Hartono, S.H.I.,M.H**
NIP : 19820508.200912.1.001
Pangkat Golongan Ruang : Penata , III/c
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	Drs. H. Rusdin		1	Nama	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H				
2	NIP	19640915.199403.1.004		2	NIP	19820508.200912.1.001				
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk I, III/d		3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata , III/c				
4	Jabatan	Panitera		4	Jabatan	Panitera Muda Permohonan				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai		5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai				
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGET				
		TUGAS POKOK				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengikuti dan Mencatat Jalannya Persidang			0	125	Dokumen	100	12	Bulan	-
2	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)			0	125	Kegiatan	100	12	Bulan	-
3	Melaksanakan Pemberkasan perkara			0	50	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Menerima / memeriksa kelengkapan berkas perkara Permohonan yang diajukan			0	50	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Mengisi data tundaan sidang dan data saksi ke aplikasi SIPP			0	125	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Menaksir panjar biaya perkara Permohonan			0	50	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah BHT kepada Panitera Muda Hukum			0	50	Dokumen	100	12	Bulan	-



Pejabat Penilai,

Drs. H. Rusdin

NIP. 19640915.199403.1.004

Banggai, 02 Januari 2020
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Rudi Hartono, S.H.I.,M.H

NIP. 19820508.200912.1.001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31 Desember 2020

Nama : Rudi Hartono, S.H.I.,M.H
NIP : 19820508.200912.1.001

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Mengikuti dan Mencatat Jalannya Persidang	0	125	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	130	Dokumen	89	12	Bulan	-	269,00	89,67
2	Membuat Berita Acara Sidang (BAS)	0	125	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	130	Kegiatan	89	12	Bulan	-	269,00	89,67
3	Melaksanakan Pemberkasan perkara	0	50	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	55	Dokumen	89	12	Bulan	-	275,00	91,67
4	Menerima / memeriksa kelengkapan berkas perkara Permohonan yang diajukan	0	50	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	69	Dokumen	75	12	Bulan	-	289,00	96,33
5	Mengisi data tundaan sidang dan data saksi ke aplikasi SIPP	0	125	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	130	Kegiatan	87	12	Bulan	-	267,00	89,00
6	Menaksir panjar biaya perkara Permohonan	0	50	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp -	0	69	Kegiatan	75	12	Bulan	-	289,00	96,33
7	Menyerahkan Berkas Perkara yang sudah BHT kepada Panitera Muda Hukum	0	50	Dokumen	100	12	Bulan	Rp -	0	55	Dokumen	85	12	Bulan	-	271,00	90,33
Nilai Capaian SKP																	91,86
(Sangat Baik)																	



Bangka, 30 Desember 2020
Pejabat Penilai,

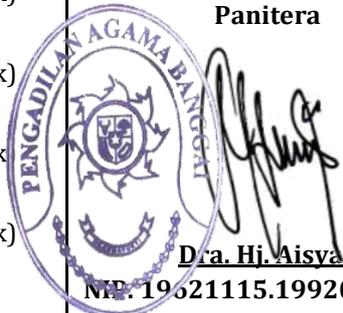
Dra. Hj. Aisyah

NIP. 19621115.199203.2.002

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Rudi Hartono, S.H.I.,M.H

NIP : 19820508.200912.1.001

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai																											
1	2	3	4																											
1	02 Januari s/d 31 Desember 2020	<p>Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 91,86 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Orientasi Pelayanan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">= 90,00</td> <td style="width: 30%;">(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Integritas</td> <td style="text-align: center;">= 81,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Komitmen</td> <td style="text-align: center;">= 81,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Disiplin</td> <td style="text-align: center;">= 79,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kerjasama</td> <td style="text-align: center;">= 78,00</td> <td>(Baik)</td> </tr> <tr> <td>Kepemimpinan</td> <td style="text-align: center;">= -</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">= 409</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Rata-rata</td> <td style="text-align: center;">= 81,80</td> <td>(Baik)</td> </tr> </table>	Orientasi Pelayanan	= 90,00	(Baik)	Integritas	= 81,00	(Baik)	Komitmen	= 81,00	(Baik)	Disiplin	= 79,00	(Baik)	Kerjasama	= 78,00	(Baik)	Kepemimpinan	= -	-	<hr/>			Jumlah	= 409		Nilai Rata-rata	= 81,80	(Baik)	<p>Panitera</p>  <p><u>Dra. Hj. Aisyah</u> NIP. 19621115.199203.2.002</p>
Orientasi Pelayanan	= 90,00	(Baik)																												
Integritas	= 81,00	(Baik)																												
Komitmen	= 81,00	(Baik)																												
Disiplin	= 79,00	(Baik)																												
Kerjasama	= 78,00	(Baik)																												
Kepemimpinan	= -	-																												
<hr/>																														
Jumlah	= 409																													
Nilai Rata-rata	= 81,80	(Baik)																												



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MAHKAMAH AGUNG R.I.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

JANGKA WAKTU PENILAIAN
02 Januari s/d 31 Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Rudi Hartono, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19820508.200912.1.001			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata , III/c			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Panitera Muda Permohonan			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Dra. Hj. Aisyah			
	b. NIP	19621115.199203.2.002			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Panitera			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 91,86 X 60%			55,11	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	90,00	(Baik)	
		2. Integritas	81,00	(Baik)	
		3. Komitmen	81,00	(Baik)	
		4 Disiplin	79,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	78,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	-	-	
		Jumlah	409,00	0	
		Nilai Rata-rata	81,80	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja 81,80 X 40%			32,72		
Nilai Prestasi Kerja			87,83 (Baik)		

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN

Tanggal

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI

Dra. H. Aisyah

NIP. 19621115.199203.2.002

10. DITERIMA TANGGAL, 04 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI,

Rudi Hartono, S.H.I.M.H

NIP. 19820508.200912.1.001

11. DITERIMA TANGGAL, 07 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI



Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.M.H

NIP. 19670202.199203.1.006

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI	
a. Nama	: Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H
b. NIP	: 19860731.200904.2.004
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata, III/c
d. Jabatan	: Kasubbag Umum dan Keuangan
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.
b. NIP	: 19770310.200704.1.002
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Tk. I, III/d
d. Jabatan	: Sekretaris
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
3 ATASAN PEJABAT PENILAI	
a. Nama	: Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H
b. NIP	: 19790209.200604.1.003
c. Pangkat, Gol/Ruang	: Pembina, IV/a
d. Jabatan	: Ketua / Hakim Madya Pratama
e. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31 Desember 2020**

Nama Pegawai : **Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H**
NIP : 19860731.200904.2.004
Pangkat Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai

**BADAN KEPEGAWAIAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II
TAHUN 2020**

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI						
NO			NO	TARGET					
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1	Nama	MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.	1	Nama	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H				
2	NIP	19770310.200704.1.002	2	NIP	19860731.200904.2.004				
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk. I, III/d	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata, III/c				
4	Jabatan	Sekretaris	4	Jabatan	Kasubbag Umum dan Keuangan				
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Banggai				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET					
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
TUGAS POKOK									
1	Melakukan Konsultasi Dengan KPPN yang Berhubungan Dengan Keuangan / Anggaran		0	3	Kegiatan	100	12	Bulan	-
2	Menguji Surat Perintah Membayar		0	90	Kegiatan	100	12	Bulan	-
3	Menandatangani Surat Perintah Membayar		0	90	Dokumen	100	12	Bulan	-
4	Meneliti Gaji Induk dan Tunjangan Pegawai		0	13	Dokumen	100	12	Bulan	-
5	Meneliti Laporan Keuangan Remunerasi		0	12	Laporan	100	12	Bulan	-
6	Membuat Rencana Kegiatan Pelaksanaan Anggaran yang Berhubungan Dengan Keuangan		0	4	Laporan	100	12	Bulan	-
7	Meneliti dan Memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Kas		0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Melakukan Rekonsiliasi Dengan Operator SAIBA		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
9	Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Atau Pimpinan yang Berhubungan Dengan Keuangan		0	5	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Menindaklanjuti Surat Masuk yang Berhubungan Dengan Keuangan		0	100	Surat	100	12	Bulan	-
11	Monitoring dan Evaluasi / Paraf Surat Keluar dan Masuk (Lembar Disposisi/Mendistribusikan per Bagian)		0	50	Surat	100	12	Bulan	-
12	Monitoring dan evaluasi / paraf SK KPA perihal pinjam pakai rumah dinas jabatan, kendaraan dinas, laptop serta berita acara serah terima		0	10	SK	100	12	Bulan	-
13	Monitoring dan evaluasi register DBR, DBL, KIB		0	13	Daftar	100	12	Bulan	-
14	Monitoring dan evaluasi hasil rekonsiliasi dengan KPKNL SIMAK-BMN 01-04, persediaan, laporan BMN 01-04 ke PTA Palu		0	2	Laporan	100	12	Bulan	-
15	Monitoring dan evaluasi hasil rekonsiliasi internal antara SIMAK-BMN dan SAIBA (Dipa 01 dan 04)		0	2	Laporan	100	12	Bulan	-
16	Monitoring dan evaluasi aplikasi untuk persediaan (pembelian / pengeluaran ATK), mutasi barang inventaris, neraca & opname fisik		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
17	Melakukan pengawasan terhadap kurir/ekspeditor surat keluar		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
18	Monitoring dan evaluasi pengkatalogkan / pengisian daftar pinjam pakai buku-buku perpustakaan		0	3	Judul Buku	100	12	Bulan	-
19	Monitoring dan evaluasi hasil input ke dalam aplikasi komdanas mengenai CAL-BMN (DIPA 01 dan 04)		0	2	Laporan	100	12	Bulan	-

20	Melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan / pejabat penilai dan rumah tangga (kebersihan, piket, jaga malam)	0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
21	menginput data mutasi barang / jasa ke aplikasi SIMAK-BMN	0	12	Laporan	100	12	Bulan	-
22	Membuat dan mencetak DBR, DIL, KIB	0	13	Daftar	100	12	Bulan	-
23	Melakukan, mengarsipkan rekonsiliasi internal antara data SIMAK-BMN dan SAIBA Tahunan	0	2	BA	100	12	Bulan	-
24	melakukan rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan KPKNL tahunan	0	2	BA	100	12	Bulan	-
25	Membuat, mengarsipkan mengirimkan lopran BMN tahunan ke korwil	0	2	Laporan	100	12	Bulan	-
26	Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data hasil opname fisik barang persediaan ke dalam aplikasi Persediaan	0	12	Laporan	100	12	Bulan	-
27	Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data hasil opname fisik aplikasi SIMAK-BMN	0	2	Laporan	100	12	Bulan	-
28	Membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN	0	2	Laporan	100	12	Bulan	-
29	Melaksanakan perawatan barang milik negara	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-
30	Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan perpustakaan	0	3	Kegiatan	100	12	Bulan	-
31	Membuat SK tentang penanggungjawab BMN	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-
32	Menyediakan kuitansi/pertanggungjawaban pengeluaran uang dari rekanan	0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
33	Melakukan tindak lanjut terhadap surat masuk yang berkaitan dengan bidang umum	0	30	Kegiatan	100	12	Bulan	-
34	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan	0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-



Pejabat Penilai,

MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.
NIP. 49770310.200704.1.002

Banggai, 02 Januari 2020
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H
NIP. 19860731.200904.2.004

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

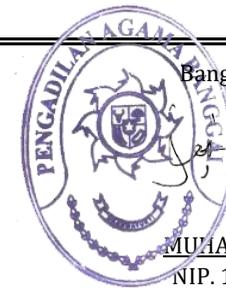
**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian
02 Januari s/d 31 Desember 2020

Nama : Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H
NIP : 19860731.200904.2.004

NO	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Melakukan Konsultasi Dengan KPPN yang Berhubungan Dengan Keuangan / Anggaran	0	3	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	3	Kegiatan	98	12	Bulan	-	274,00	91,33
2	Menguji Surat Perintah Membayar	0	90	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	110	Kegiatan	92	12	Bulan	-	290,22	96,74
3	Menandatangani Surat Perintah Membayar	0	90	Dokumen	100	12	Bulan	Rp - 0	0	110	Dokumen	94	12	Bulan	-	292,22	97,41
4	Meneliti Gaji Induk dan Tunjangan Pegawai	0	13	Dokumen	100	12	Bulan	Rp - 0	0	13	Dokumen	95	12	Bulan	-	271,00	90,33
5	Meneliti Laporan Keuangan Remunerasi	0	12	Laporan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	13	Laporan	93	12	Bulan	-	277,33	92,44
6	Membuat Rencana Kegiatan Pelaksanaan Anggaran yang Berhubungan Dengan Keuangan	0	4	Laporan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	5	Laporan	93	12	Bulan	-	294,00	98,00
7	Meneliti dan Memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Kas	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	Rp - 0	0	2	Dokumen	95	12	Bulan	-	271,00	90,33
8	Melakukan Rekonsiliasi Dengan Operator SAIBA	0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	12	Kegiatan	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
9	Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Atau Pimpinan yang Berhubungan Dengan Keuangan	0	5	Dokumen	100	12	Bulan	Rp - 0	0	6	Dokumen	91	12	Bulan	-	287,00	95,67
10	Menindaklanjuti Surat Masuk yang Berhubungan Dengan Keuangan	0	100	Surat	100	12	Bulan	Rp - 0	0	105	Surat	92	12	Bulan	-	273,00	91,00
11	Monitoring dan Evaluasi / Paraf Surat Keluar dan Masuk (Lembar Disposisi/Mendistribusikan per Bagian)	0	50	Surat	100	12	Bulan	Rp - 0	0	55	Surat	93	12	Bulan	-	279,00	93,00
12	Monitoring dan evaluasi / paraf SK KPA perihal pinjam pakai rumah dinas jabatan, kendaraan dinas, laptop serta berita acara serah terima	0	10	SK	100	12	Bulan	Rp - 0	0	10	SK	96	12	Bulan	-	272,00	90,67
13	Monitoring dan evaluasi register DBR, DBL, KIB	0	13	Daftar	100	12	Bulan	Rp - 0	0	11	Daftar	91	12	Bulan	-	251,62	83,87
14	Monitoring dan evaluasi hasil rekonsiliasi dengan KPKNL SIMAK-BMN 01-04, persediaan, laporan BMN 01-04 ke PTA Palu	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	2	Laporan	98	12	Bulan	-	274,00	91,33
15	Monitoring dan evaluasi hasil rekonsiliasi internal antara SIMAK-BMN dan SAIBA (Dipa 01 dan 04)	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	2	Laporan	95	12	Bulan	-	271,00	90,33
16	Monitoring dan evaluasi aplikasi untuk persediaan (pembelian / pengeluaran ATK), mutasi barang inventaris, neraca & opname fisik	0	23	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	20	Kegiatan	95	12	Bulan	-	257,96	85,99
17	Melakukan pengawasan terhadap kurir/ekspeditor surat keluar	0	26	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp - 0	0	28	Kegiatan	87	12	Bulan	-	270,69	90,23
18	Monitoring dan evaluasi pengkatalogan / pengisian daftar pinjam pakai buku-buku perpustakaan	0	3	Judul Buku	100	12	Bulan	Rp - 0	0	3	Judul Buku	97	12	Bulan	-	273,00	91,00

19	Monitoring dan evaluasi hasil input ke dalam aplikasi komdanas mengenai CAL-BMN (DIPA 01 dan 04)	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	Laporan	89	12	Bulan	-	265,00	88,33
20	Melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan / pejabat penilai dan rumah tangga (kebersihan, piket, jaga malam)	0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Kegiatan	92	12	Bulan	-	268,00	89,33
21	menginput data mutasi barang / jasa ke aplikasi SIMAK-BMN	0	12	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Laporan	92	12	Bulan	-	268,00	89,33
22	Membuat dan mencetak DBR, DIL, KIB	0	13	Daftar	100	12	Bulan	Rp	-	0	13	Daftar	92	12	Bulan	-	268,00	89,33
23	Melakukan, mengarsipkan rekonsiliasi internal antara data SIMAK-BMN dan SAIBA Tahunan	0	2	BA	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	BA	93	12	Bulan	-	269,00	89,67
24	melakukan rekonsiliasi data SIMAK-BMN debngan KPKNL tahunan	0	2	BA	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	BA	94	12	Bulan	-	270,00	90,00
25	Membuat, mengarsipkan mengirimkan lopran BMN tahunan ke korwil	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	Laporan	93	12	Bulan	-	269,00	89,67
26	Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data hasil opname fisik barang persediaan ke dalam aplikasi Persediaan	0	12	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	12	Laporan	93	12	Bulan	-	269,00	89,67
27	Melakukan opname fisik persediaan dan menginput data hasil opname fisik aplikasi SIMAK-BMN	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	Laporan	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
28	Membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN	0	2	Laporan	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	Laporan	95	12	Bulan	-	271,00	90,33
29	Melaksanakan perawatan barang milik negara	0	4	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	4	Kegiatan	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
30	Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan perpustakaan	0	3	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	3	Kegiatan	93	12	Bulan	-	269,00	89,67
31	Membuat SK tentang penanggungjawab BMN	0	2	Dokumen	100	12	Bulan	Rp	-	0	2	Dokumen	96	12	Bulan	-	272,00	90,67
32	Menyediakan kuitansi/pertanggungjawaban pengeluaran uang dari rekanan	0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	1	Kegiatan	92	12	Bulan	-	268,00	89,33
33	Melakukan tindak lanjut terhadap surat masuk yang berkaitan dengan bidang umum	0	30	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	31	Kegiatan	92	12	Bulan	-	271,33	90,44
34	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan	0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	Rp	-	0	10	Kegiatan	86	12	Bulan	-	245,33	81,78
Nilai Capaian SKP																	90,39	
Nilai Capaian SKP																	(Baik)	



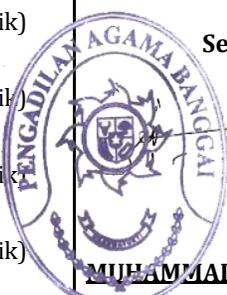
Banggai, 30 Desember 2020
Pejabat Penilai,

MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.
NIP. 19770310.200704.1.002

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PNS

Nama : Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H

NIP : 19860731.200904.2.004

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4
1	02 Januari s/d 31 Desember 2020	Penilaian SKP sampai dengan akhir Desember 2020 = 90,39 sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut : Orientasi Pelayanan = 86,00 (Baik) Integritas = 85,00 (Baik) Komitmen = 85,00 (Baik) Disiplin = 85,00 (Baik) Kerjasama = 85,00 (Baik) Kepemimpinan = 84,00 - Jumlah = 510 Nilai Rata-rata = 85,00 (Baik)	 <p align="right">Sekretaris</p>  <p align="right">MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H. NIP. 19770310.200704.1.002</p>



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BADAN KEPEGAWAIAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KELAS II

JANGKA WAKTU PENILAIAN
02 Januari s/d 31 Desember 2020

1.	YANG DINILAI				
	a. N A M A	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H			
	b. NIP	19860731.200904.2.004			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata, III/c			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Kasubbag Umum dan Keuangan			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.I.			
	b. NIP	19770310.200704.1.002			
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata Tk. I, III/d			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Sekretaris			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI				
	a. N A M A	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H			
	b. NIP	19790209.200604.1.003			
	c. Pangkat, golongan ruang	Pembina, IV/a			
	d. Jabatan/Pekerjaan	Ketua / Hakim Madya Pratama			
	e. Unit Organisasi	Pengadilan Agama Banggai			
4.	UNSUR YANG DINILAI			JUMLAH	
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 90,39 X 60%			54,23	
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan	86,00	(Baik)	
		2. Integritas	85,00	(Baik)	
		3. Komitmen	85,00	(Baik)	
		4. Disiplin	85,00	(Baik)	
		5. Kerjasama	85,00	(Baik)	
		6. Kepemimpinan	84,00	-	
		Jumlah	510,00	0	
		Nilai Rata-rata	85,00	(Baik)	
Nilai Perilaku kerja 85,00 X 40%			34,00		
Nilai Prestasi Kerja			88,23 (Baik)		

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN

Tanggal

8. REKOMENDASI :

Tanggal

9. DIBUAT TANGGAL, 30 Desember 2020
PEJABAT PENILAI

MUHAMMAD MUSYAFFA. S.H.I.
NIP. 19770310.200704.1.002

10. DITERIMA TANGGAL, 04 Januari 2021
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG

Syahrani Rahmawati Tiloli. S.H
NIP. 19860731.200904.2.004



11. DITERIMA TANGGAL, 07 Januari 2021
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

Mohammad Mahin Ridlo Afifi. S.H.I., M.H
NIP. 19790209.200604.1.003



9. Data Bezetting Pengadilan Agama Banggai



DATA BEZETTING PEGAWAI DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H 197902092006041003	Pembina IV/a	2020-10-01	1572/DJA/KP.04.1/ SK/9/2020	Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Banggai	2020-08- 27	181/KMA/SK/VII/ 2020	S2
2	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. 197908082007041001	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	529 TAHUN 2019	Wakil Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Banggai	2020-08- 31	181/KMA/SK/VII/ 2020	S1
3	Syamsul Ilmi, S.H.I. 198909132017121001	Penata Muda III/a	2017-12-01	1382/SEK/CPNS.04. 1/SK/XI/2017	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Banggai	2020-04- 13	980/DJA/KP.04.6/ SK/3/2020	S2
4	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. 199504092017122003	Penata Muda III/a	2017-12-01	1386/SEK/CPNS.04. 1/SK/XI/2017	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Banggai	2020-09- 02	1267/DJA/KP.04.6 /SK/7/2020	S1
5	Dra. Aisyah, 196211151992032002	Penata Tingkat I III/d	2006-10-01	UP.IV/100/SEK/SK/ 2007	Panitera Tingkat Pertama, Panitera	2020-10- 27	2145/DJA/KP.04.6 /SK/9/2020	S1
6	Muhammad Musyaffa, S.H.I. 197703102007041002	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	W.19- A/1188/KP.04.1/09 /2019	Sekretaris, Sekretaris	2019-10- 14	833/SEK/Kp.I/SK /X/2019	S1
7	Maswati Masruni, S.H. 198005282003122004	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	3284/DjA/KP.04.1/ SK/10/2016	Panitera Muda, Panitera Muda Gugatan	2019-06- 27	2041 Tahun 2019	S1
8	Muhammad Saleh, S.H.I. 198112152009041007	Penata III/c	2017-04-01	371/DjA/KP.04.1/S K/03/2017	Panitera Muda, Panitera Muda Hukum	2019-06- 27	2042 TAHUN 2019	S1
9	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H. 198607312009042004	Penata III/c	2017-04-01	W19- A8/664/KP.04/V/2 017	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2017-07- 18	43B/SEK/KP.I/SK /IV/2017	S1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rudi Hartono, S.H.I., M.H. 198205082009121001	Penata III/c	2018-04-01	606/DjA/Kp.04.1/S K/03/2018	Panitera Muda, Panitera Muda Permohonan	2019-06- 27	2043 TAHUN 2019	S2
11	Pahlawanto, S.IP. 198211152015041001	Penata Muda III/a	2020-04-01	1191/DjA/KP.04.1/ SK/5/2020	Juru Sita Pengganti, Panitera	2019-07- 01	W19- A8/445/KP.04.6/ VI/2019	S1


Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,
Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
 NIP. 197902092006041003



10.
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pengadilan Agama Banggai



DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H	197902092006041003	Ketua Pengadilan	2020-08-27	14 tahun 8 bulan	IV/a	2020-10-01	PASCASARJANA	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	2017
2	Dra. Aisyah,	196211151992032002	Panitera Tingkat Pertama	2020-10-27	28 tahun 9 bulan	III/d	2006-10-01	STRATA I	IAIN Alauddin Makassar	1990
3	Maswati Masruni, S.H.	198005282003122004	Panitera Muda	2019-06-27	17 tahun 0 bulan	III/d	2016-10-01	STRATA I	Univ. Muhammadiyah Palu	2002
4	Muhammad Musyaffa, S.H.I.	197703102007041002	Sekretaris	2019-10-14	13 tahun 8 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	Univ. Muhammadiyah Palu	2002
5	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.	197908082007041001	Wakil Ketua Pengadilan	2020-08-31	13 tahun 8 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	STAIN Manado	2003
6	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	198607312009042004	Kepala Sub Bagian	2017-07-18	11 tahun 8 bulan	III/c	2017-04-01	STRATA I	Universitas Sam Ratulangi	2007
7	Muhammad Saleh, S.H.I.	198112152009041007	Panitera Muda	2019-06-27	11 tahun 8 bulan	III/c	2017-04-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	2004
8	Rudi Hartono, S.H.I., M.H.	198205082009121001	Panitera Muda	2019-06-27	11 tahun 0 bulan	III/c	2018-04-01	PASCASARJANA	Universitas Muslim Indonesia Makasar	2009
9	Syamsul Ilmi, S.H.I.	198909132017121001	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-13	3 tahun 0 bulan	III/a	2017-12-01	PASCASARJANA	UMI Makassar	2015

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.	199504092017122003	Hakim Tingkat Pertama	2020-09-02	3 tahun 0 bulan	III/a	2017-12-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	2016
11	Pahlawanto, S.IP.	198211152015041001	Juru Sita Pengganti	2019-07-01	5 tahun 8 bulan	III/a	2020-04-01	STRATA I	Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk	2016



Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohammad Malan Ridlo Afifi, S.H.I. M.H.
 NIP. 197902092006041003



11.

Daftar Urut Senioritas (DUS) Pengadilan Agama Banggai



DAFTAR URUTAN SENIORITAS (DUS) HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

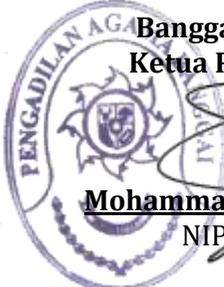
NO	NAMA	NIP	JABATAN		MAS A KERJ A	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKA N	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H	197902092006041003	Ketua Pengadilan	2020-08-27	14 tahun 8 bulan	IV/a	2020-10-01	PASCASARJANA	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	2017
2	Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.	197908082007041001	Wakil Ketua Pengadilan	2020-08-31	13 tahun 8 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	STAIN Manado	2003
3	Syamsul Ilmi, S.H.I.	198909132017121001	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-13	3 tahun 0 bulan	III/a	2017-12-01	PASCASARJANA	UMI Makassar	2015
4	Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.	199504092017122003	Hakim Tingkat Pertama	2020-09-02	3 tahun 0 bulan	III/a	2017-12-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	2016


Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
 NIP. 197902092006041003

DAFTAR URUTAN SENIORITAS (DUS) PANITERA DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MAS A KERJ A	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKA N	INSTANSI PENDIDIKA N	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dra. Aisyah,	196211151992032002	Panitera Tingkat Pertama	2020-10-27	28 tahun 9 bulan	III/d	2006-10-01	STRATA I	IAIN Alauddin Makassar	1990
2	Maswati Masruni, S.H.	198005282003122004	Panitera Muda	2019-06-27	17 tahun 0 bulan	III/d	2016-10-01	STRATA I	Univ. Muhammadiyah Palu	2002
3	Muhammad Saleh, S.H.I.	198112152009041007	Panitera Muda	2019-06-27	11 tahun 8 bulan	III/c	2017-04-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	2004
4	Rudi Hartono, S.H.I., M.H.	198205082009121001	Panitera Muda	2019-06-27	11 tahun 0 bulan	III/c	2018-04-01	PASCASARJAN A	Universitas Muslim Indonesia Makasar	2009


Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,
Mohammad Mahid Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
 NIP. 197902092006041003

DAFTAR URUTAN SENIORITAS (DUS) JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MAS A KERJ A	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKA N	INSTANSI PENDIDIKA N	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pahlawanto, S.IP.	198211152015041001	Juru Sita Pengganti	2019-07-01	5 tahun 8 bulan	III/a	2020-04-01	STRATA I	Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk	2016

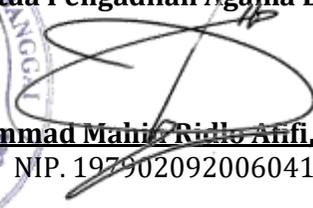


Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohammad Mahjo Ridlo Afri, S.H.I. M.H.
NIP. 197902092006041003

DAFTAR URUTAN SENIORITAS (DUS) KESEKRETARIATAN DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MAS A KERJ A	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKA N	INSTANSI PENDIDIKA N	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Muhammad Musyaffa, S.H.I.	197703102007041002	Sekretaris	2019-10-14	13 tahun 8 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	Univ. Muhammadiyah Palu	2002
2	Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.	198607312009042004	Kepala Sub Bagian	2017-07-18	11 tahun 8 bulan	III/c	2017-04-01	STRATA I	Universitas Sam Ratulangi	2007


Banggai Laut, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Banggai,

Mohammad Mahir Riddo Anfi, S.H.I., M.H.
 NIP. 197902092006041003

Pengadilan Agama Banggai

Jln. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut

Telp./ Fax (0462) 21544 Kode Pos 94791



pa-banggai.go.id



pa.banggai@yahoo.co.id



[pengadilan agama banggai](https://www.facebook.com/pengadilan.agama.banggai)



[pa.banggai_official](https://www.instagram.com/pa.banggai_official)